



Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan

POTRET PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**“STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN YANG TERINTEGRASI”
untuk mencapai Pemerataan Pendidikan yang Berkualitas dan Berkeadilan.**

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan
Setjen, Kemendikbud
Renotel Bogor, 25 Juli 2019

Daftar Isi

- Pendahuluan
- Pengelolaan Data dan Informasi
- Pendayagunaan Data dan Informasi
- Strategi

17 Maret 2019

Tribunnews.comSelasa, 14 Mei 2019CariNetworkftG+rssLogin

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

BerandaAktifitas AKDAktifitas PimpinanLegislasiSosokKunjungan KerjaKegiatan SetjenParlementaria

Home » DPR RI » Berita

Berita Parlemen

Pendidikan Indonesia Belum Merata

Minggu, 17 Maret 2019 12:44 WIB



ftWhatsAppinShare

Gedung DPR RI

Tribunnews.com/Wahyu Aji

Dunia pendidikan di Indonesia saat ini memang masih belum merata, terlebih bila membandingkan kualitas, sarana dan prasarana antara yang ada di Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa. Menurut Anggota Komisi X DPR RI, Popong Utje Djundjuran, hal tersebut harus disyukuri oleh dunia pendidikan di Pulau Jawa, bukan sebaliknya mengeluh dan selalu minta penambahan sarana dan prasarana.

.....

08 Februari 2019

Gubuk PAUD SAAJA, Potret Pendidikan Belum Merata di Jakarta

Pebriansyah Ariefana | Muhammad Yasir

Jum'at, 08 Februari 2019 | 12:18 WIB



Sekolah Alternatif Anak Jalanan (SAAJA). (Suara.com/Yasir)

Ayo baris dan salim sama kakak, begitu anak-anak menyambut kami.

Suara.com - Sebuah bangunan gubuk beratapkan rumbia berdiri tegak di tengah-tengah rimba beton di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Di sana ada **Sekolah Alternatif Anak Jalanan (SAAJA)**.

Seperti namanya, SAAJA menjadi alternatif ruang bermain dan belajar bagi anak-anak dari keluarga yang berada di garis kemiskinan sosial.

Iklan ditutup oleh Google



18 Agustus 2017

[Home](#) / [News](#) / [Edukasi](#)

BrandzView

Konten ini merupakan kerja sama Kompas.com dan Tanoto Foundation

72 Tahun Merdeka, Apa Kabar Pendidikan Indonesia?

HARIS PRAHARA

Kompas.com - 18/08/2017, 06:49 WIB



Ilustrasi pendidikan nasional (M LATIEF/KOMPAS.com)

9 September 2015

Langganan Sekarang, Baca Berita Lebih Gampang

BERITA SATU

e-PaperBTTVfTwitterInstagramYouTube

Search...

HOME BOLA DUNIA EKONOMI POLITIK **NASIONAL** MEGAPOLITAN HIBURAN GAYA HIDUP KESEHATAN OLAHRAGA OTOMOTIF DIGITAL OPINI FOKUS MULTIMEDIA

Kualitas Pendidikan Indonesia Masih Belum Merata



Seorang guru olah raga sedang memberikan arahan gerakan kepada anak didiknya yang duduk di kelas satu sekolah dasar (SD) di halaman SDN 11,12,13,15,16,17 Pagi dan Petang di Jalan B Raya, RT03/RW09, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, 6 Agustus 2015 (Foto: Suara Pembaruan / Carlos Barus)

Fatima Bona / HS Rabu, 9 September 2015 | 21:35 WIB

Jakarta - Kualitas pendidikan Indonesia sampai saat ini belum merata. Banyak sekolah di tanah air yang masih terkendala dengan fasilitas-fasilitas



Pendidikan Tak Merata, Kualitas Masyarakat Tertinggal

ESTER LINC NAPITUPULU

Kompas.com - 13/09/2012, 16:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Pendidikan merupakan sarana utama pembentukan generasi penerus bangsa. Semakin maju kualitas pendidikan, maka semakin maju pula negara tersebut. Guna meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas, pemerintah juga membutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

Tidak meratanya pendidikan juga mengakibatkan kualitas masyarakat Indonesia tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Padahal pendidikan merupakan faktor utama dalam membangun karakter bangsa dan faktor untuk menggerakkan perekonomian suatu bangsa.

Berdasarkan data, perkembangan pendidikan Indonesia masih tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Menurut Education For All Global Monitoring Report 2011 yang dikeluarkan oleh UNESCO setiap tahun dan berisi hasil pemantauan pendidikan dunia, dari 127 negara, Education Development Index (EDI) Indonesia berada pada posisi ke-69. Indonesia kalah dibandingkan Malaysia (65) dan Brunei (34).

Selain itu, akses pendidikan di Indonesia masih perlu mendapat perhatian, lebih dari 1,5 juta anak tiap tahun tidak dapat melanjutkan sekolah. Sementara dari sisi kualitas guru dan komitmen mengajar terdapat lebih dari 54 persen guru memiliki standar kualifikasi yang perlu ditingkatkan dan 13,19 persen bangunan sekolah dalam kondisi perlu diperbaiki.

Iklan ditutup oleh Google


Stop lihat iklan ini

Mengapa iklan ini? @





29 September 2010

HARIAN KOMPAS KOMPAS TV LIVE RADIO ^{NEW} KOMPASIANA.COM KOMPASKARIER.COM GRAMEDIA.COM GRIDOTO.COM BOLASPORT.COM GRID.ID KONTAN.CO.ID KGMEDIA.ID

KOMPAS.com  [REGISTER](#) | [LOGIN](#) [PREMIUM](#)

[NEWS](#) [MONEY](#) [BOLA](#) [TEKNO](#) [SAINS](#) [ENTERTAINMENT](#) [OTOMOTIF](#) [LIFESTYLE](#) [PROPERTI](#) [TRAVEL](#) [EDUKASI](#) [KOLOM](#) [IMAGES](#) [TV](#) [VIK](#) ^{NEW} [JEO](#) [JOGMAR](#)

BAGIKAN:   Pendidikan Dasar Tak Merata

Iklan ditutup oleh Google

[Home](#) / [News](#) / [Edukasi](#)

Pendidikan Dasar Tak Merata

Kompas.com - 29/09/2010, 06:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah klaim pemerintah atas pencapaian MDGs bidang pendidikan dasar yang semakin dekat pada target, pemerataan akses pendidikan juga dipertanyakan. Mencuat juga keraguan terhadap relevansinya dengan mutu pendidikan.

Selain itu juga dipertanyakan kontribusinya untuk membuat anak-anak bangsa mampu "bertahan hidup" dalam perubahan zaman.

Pada laporan pencapaian MDGs Indonesia Tahun 2010 disebutkan, angka partisipasi murni (APM) SD/MI (perbandingan antara murid sekolah usia 7-12 tahun dan penduduk usia 7-12 tahun) pada 2008 telah mencapai 95,14 persen. Pada data setahun berikutnya di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), APM SD/MI sudah mencapai 95,23 persen.

Jika dilihat secara rinci per provinsi, ternyata ada 14 provinsi di bawah rerata

Iklan
ditutup
oleh
Google

Iklan ditutup oleh Google

tiket.com	No Baggage	Jakarta (JKT) Ke Kupang (KOE)	No Baggage	Bandung (BDO) Ke Kupang (KOE)
		Rp 2.110.500 Book		Rp 2.261.200 Book

JPNN.COM / Pendidikan / 62% Anggaran Pendidikan Di Daerah, Kemendikbud Hanya Rp 35,9...

62% Anggaran Pendidikan di Daerah, Kemendikbud Hanya Rp 35,9 T

Kamis, 21 Februari 2019 - 07:03 WIB



jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan, alokasi anggaran fungsi pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebanyak Rp 492,5 triliun telah sesuai dengan amanat konstitusi. Sebagian besar anggaran fungsi pendidikan tersebut dialokasikan untuk transfer ke daerah.

tiket.com
No Baggage

2019-06-22
Jakarta (JKT) Ke Kupang (KOE)
Rp 2.110.500
No Baggage

2019-06-20
Kupang (KOE) Ke Jakarta (JKT)
Rp 2.085.500
No Baggage


21 Februari 2019

Sri Mulyani : Kualitas Pendidikan di Indonesia Timpang Antara Desa & Kota

Marieska Harya Virdhani, Jurnalis - Selasa 26 Juli 2016 13:13 WIB

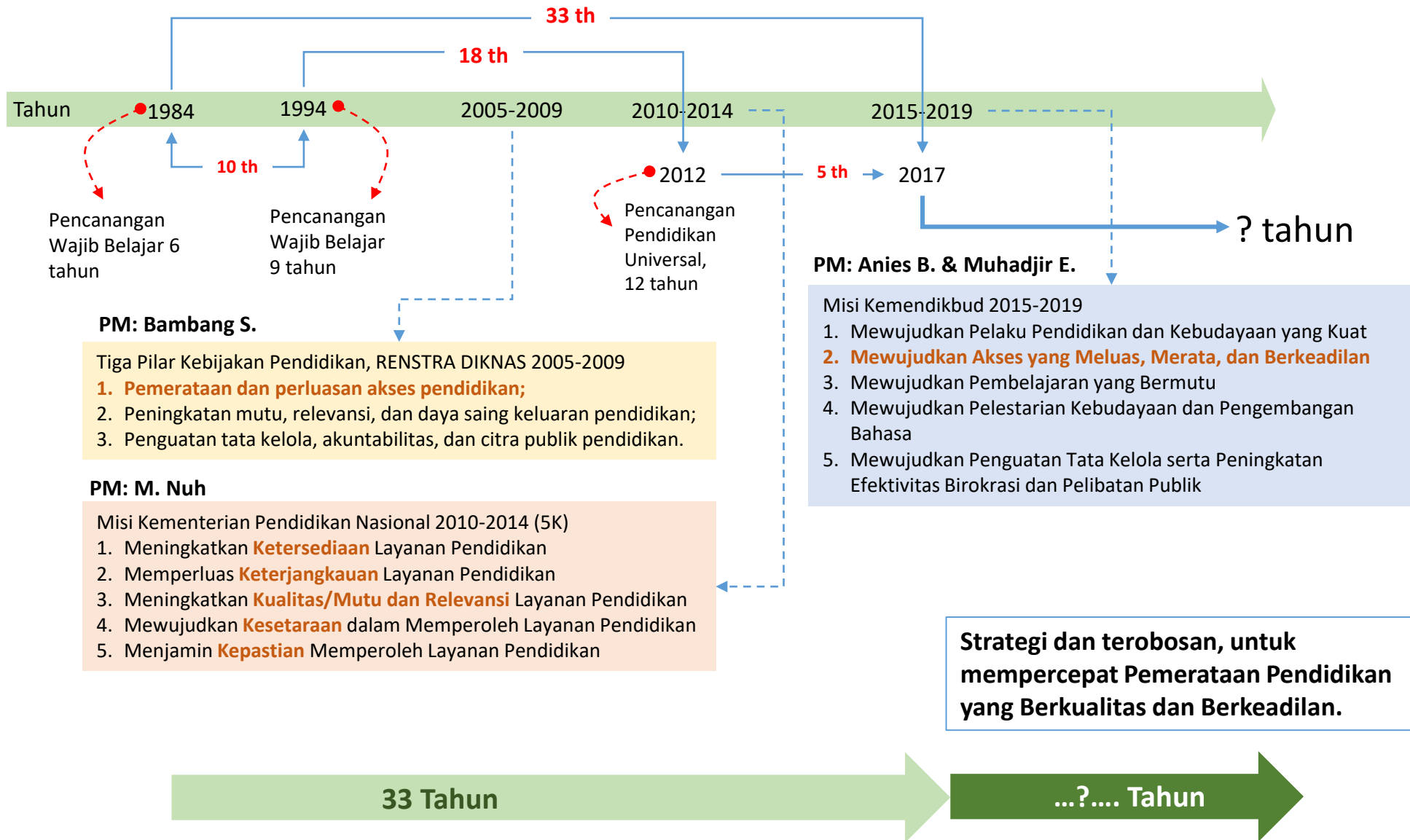


Sri Mulyani saat melakukan kuliah umum di Universitas Indonesia (UI). (Foto: Marieska/Okezone)

26 Juli 2016

Perkembangan Kebijakan Pemerintah untuk Pemerataan Pendidikan,

Tertuang dalam Tiga Pilar Kemdiknas (2005-2009), Lima Misi 5K Kemdiknas (2010-2014), dan 5 Misi Kemendikbud (2015-2019)



Pemerataan Pendidikan yang Berkualitas dan Berkeadilan.



Strategi pembangunan pendidikan yang terintegrasi, untuk mencapai pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Hal ini perlu dilakukan sesuai dengan amanat yang tertuang dalam UUD 45, bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Dan Konsep mulia tentang Pendidikan Nasional yang tertuang dalam UU Sisdiknas no 20 Tahun 2003.

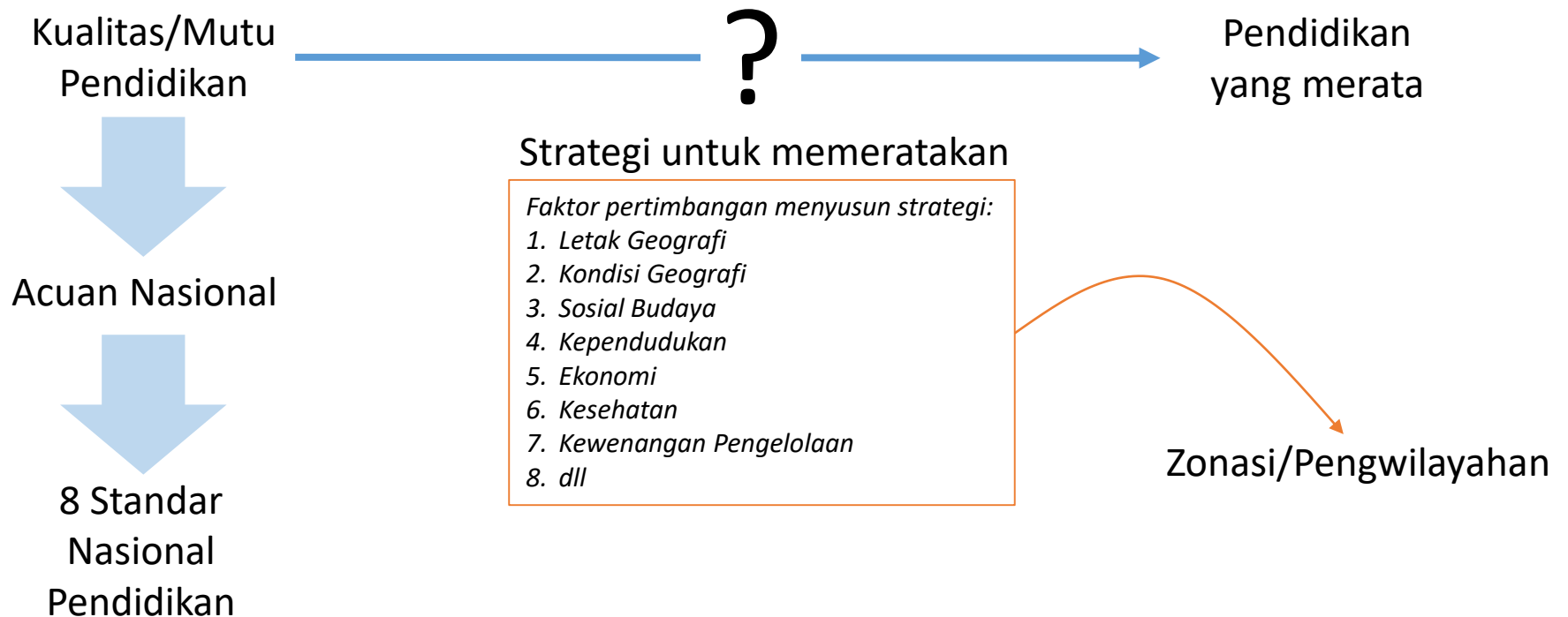
Capaian Pendidikan Nasional Tahun 2018 secara umum dapat dilihat dari tiga indikator nasional:

1. Capaian APK/APM disetiap jenjang
2. Capaian Akreditasi Sekolah
3. Capaian UN tahun 2018

Dari tiga indikator diatas dapat dilihat bahwa belum optimalnya hasil pengelolaan pendidikan, maka perlu dorongan secara nasional suatu strategi dalam bentuk intervensi yang terintegrasi dan terencana.

ALUR PIKIR

Pemerataan Pendidikan yang Berkualitas dan Berkeadilan



(20523829) SMAN PLUS SUKOWONO

▲ JL. Sumberkalong, Sumberwaru, Kec. Sukowono, Kab. Jember Prov. Jawa Timur (master referensi)



Guru : 29
 Siswa Laki-laki : 320
 Siswa Perempuan : 240
 Rombongan Belajar : 17

Kurikulum : K-13
 Penyelenggaraan : Sehari Penuh/5h
 Manajemen Berbasis Sekolah : ☐
 Semester Data : 2018/2019-2

Akses Internet : ☐
 Sumber Listrik : ☒
 Daya Listrik : 77,000
 Luas Tanah : 7,454 M²

Detail Sekolah (DAPODIK) Klik Disini

Akreditasi : A

Kepala Sekolah : Suryadi

Operator : Irsyadur Rofiq

Berikan saran, komentar dan informasi Anda untuk SMAN PLUS SUKOWONO

Sekolah dapat memperbaiki data melalui :

- ☒ Aplikasi Dapodikdasmen
- ☒ Verifikasi Validasi Satuan Pendidikan
- ☒ Verifikasi Validasi Peserta Didik
- ☒ Verifikasi Validasi PTK

Ruang Kelas : 15 *
 Laboratorium : 1 *
 Perpustakaan : 0 *
 Sanitasi Siswa : 8 *

SMAN Plus Sukowono memiliki 17 rombel, 560 peserta didik, jumlah guru 29, dan Akreditasi A Tahun 2014.

- Kurikulum yang digunakan Kurikulum 13
- Persentase Guru Kualifikasi = 96,55%
- Persentase Guru Sertifikasi = 58,62%
- Rasio Siswa – Guru = 19,31
- Rasio Siswa – Rombel = 32,94
- Persentase Ruang Kelas Layak = 93,75%

Indek_UN

UKG

PMP17

39,13

68,48

5,70

Proses Pembelajaran

Rasio Siswa Rombel

32.94

Rasio Siswa Ruang Kelas *

37.33

Rasio Siswa Guru

19.31

Persentase Guru Kualifikasi

96.55

Persentase Guru Sertifikasi

58.62

Persentase Guru PNS

68.97

Persentase Ruang Kelas Layak

93.75

Evaluasi sekolah dengan menggunakan 4 (empat) indikator nasional, menunjukkan bahwa SMAN Plus Sukowono memiliki Akreditasi A, Nilai PMP Tahun 2017 diatas rerata nasional, dan hasil UKG juga diatas rerata nasional, namun hasil UN tahun 2018 menunjukkan hasil capaian masih dibawah rerata nasional.

(10400367) SMAN 1 KAMPAR TIMUR

JL. NEGARA KM.40 PEKANBARU-BANGKINANG, Pulau Rambai, Kec. Kampa, Kab. Kampar Prov. Riau ([master referensi](#))



Guru : 70
Siswa Laki-laki : 442
Siswa Perempuan : 590
Rombongan Belajar : 34

Kurikulum : K-13
Penyelenggaraan : Sehari Penuh/5h
Manajemen Berbasis Sekolah : ☐
Semester Data : 2018/2019-2

Akses Internet : ☒
Sumber Listrik : ☒
Daya Listrik : 13,300
Luas Tanah : 30,000 M²

Detail Sekolah (DAPODIK) Klik Disini

Akreditasi : A

Kepala Sekolah : Kiram

Operator : RACHMAD WIRATNO

Berikan saran, komentar dan informasi Anda untuk SMAN 1 KAMPAR TIMUR

Sekolah dapat memperbaiki data melalui :

- ☒ Aplikasi Dapodikdasmen
- ☒ Verifikasi-Validasi Satuan Pendidikan
- ☒ Verifikasi-Validasi Peserta Didik
- ☒ Verifikasi-Validasi PTK

Ruang Kelas : 31 *
Laboratorium : 3 *
Perpustakaan : 1 *
Sanitasi Siswa : 2 *

Proses Pembelajaran

Rasio Siswa Rombel	30.35
Rasio Siswa Ruang Kelas *	33.29
Rasio Siswa Guru	14.74
Persentase Guru Kualifikasi	97.14
Persentase Guru Sertifikasi	65.71
Persentase Guru PNS	64.29
Persentase Ruang Kelas Layak	100

SMAN 1 Kampar Timur memiliki 34 rombongan belajar, 1032 peserta didik, jumlah guru 70, dan Akreditasi A Tahun 2018.

- Kurikulum yang digunakan Kurikulum 13
- Persentase Guru Kualifikasi = 97,14%
- Persentase Guru Sertifikasi = 65,71%
- Rasio Siswa – Guru = 14,74
- Rasio Siswa – Rombongan Belajar = 30,35
- Persentase Ruang Kelas Layak = 100%

Evaluasi sekolah dengan menggunakan 4 (empat) indikator nasional, menunjukkan bahwa SMAN 1 Kampar Timur memiliki Akreditasi A, Nilai PMP Tahun 2017 diatas rerata nasional, dan hasil UKG juga diatas rerata nasional, namun hasil UN tahun 2018 menunjukkan hasil capaian masih dibawah rerata nasional.

(10400367) SMAN 1 KAMPAR TIMUR

JL. NEGARA KM.40 PEKANBARU-BANGKINANG, Pulau Rambai, Kec. Kampa, Kab. Kampar Prov. Riau (master referensi)

Indek_UN

39,34

UKG

60,85

PMP17

6,26



Guru : 70
Siswa Laki-laki : 442
Siswa Perempuan : 590
Rombongan Belajar : 34

Kurikulum : K-13
Penyelenggaraan : Sehari Penuh/5h
Manajemen Berbasis Sekolah : ☐
Semester Data : 2018/2019-2

Akses Internet : ☒
Sumber Listrik : ☒
Daya Listrik : 13,300
Luas Tanah : 30,000 M²

Detail Sekolah (DAPODIK) Klik Disini

Akreditasi : A

Kepala Sekolah : Kiram

Operator : RACHMAD WIRATNO

Berikan saran, komentar dan informasi Anda untuk SMAN 1 KAMPAR TIMUR

Sekolah dapat memperbaiki data melalui :

- ☒ Aplikasi Dapodikdasmen
- ☒ Verifikasi Validasi Satuan Pendidikan
- ☒ Verifikasi Validasi Peserta Didik
- ☒ Verifikasi Validasi PTK

Ruang Kelas : 31 *
Laboratorium : 3 *
Perpustakaan : 1 *
Sanitasi Siswa : 2 *

Proses Pembelajaran

Rasio Siswa Rombel 30.35

Rasio Siswa Ruang Kelas * 33.29

Rasio Siswa Guru 14.74

Persentase Guru Kualifikasi 97.14

Persentase Guru Sertifikasi 65.71

Persentase Guru PNS 64.29

Persentase Ruang Kelas Layak 100

SMAN 1 Kampar Timur memiliki 34 rombongan belajar, 1032 peserta didik, jumlah guru 70, dan Akreditasi A Tahun 2018.

- Kurikulum yang digunakan Kurikulum 13
- Persentase Guru Kualifikasi = 97,14%
- Persentase Guru Sertifikasi = 65,71%
- Rasio Siswa – Guru = 14,74
- Rasio Siswa – Rombongan Belajar = 30,35
- Persentase Ruang Kelas Layak = 100%

Evaluasi sekolah dengan menggunakan 4 (empat) indikator nasional, menunjukkan bahwa SMAN 1 Kampar Timur memiliki Akreditasi A, Nilai PMP Tahun 2017 diatas rerata nasional, dan hasil UKG juga diatas rerata nasional, namun hasil UN tahun 2018 menunjukkan hasil capaian masih dibawah rerata nasional.

(20321837) SMAN 1 ROWOSARI

JL. BAHARI KM.5 ROWOSARI, Tambaksari, Kec. Rowosari, Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah ([master referensi](#))



Guru : 30
Siswa Laki-laki : 146
Siswa Perempuan : 209
Rombongan Belajar : 14

Kurikulum : K-13
Penyelenggaraan : Sehari Penuh/5h
Manajemen Berbasis Sekolah : ☐
Semester Data : 2018/2019-2

Akses Internet : ☒
Sumber Listrik : ☒
Daya Listrik : 15,000
Luas Tanah : 13,575 M²

Detail Sekolah (DAPODIK) Klik Disini

Akreditasi : A

Kepala Sekolah : Suharto, S.pd. M.pd

Operator : Iwan Setiawan

Berikan saran, komentar dan informasi Anda untuk SMAN 1 ROWOSARI

Sekolah dapat memperbaiki data melalui :

- ☒ Aplikasi Dapodikdasmen
- ☒ Verifikasi-Validasi Satuan Pendidikan
- ☒ Verifikasi-Validasi Peserta Didik
- ☒ Verifikasi-Validasi PTK

Ruang Kelas : 14 *
Laboratorium : 4 *
Perpustakaan : 1 *
Sanitasi Siswa : 2 *

Proses Pembelajaran

Rasio Siswa Rombel	25.36
Rasio Siswa Ruang Kelas *	25.36
Rasio Siswa Guru	11.83
Persentase Guru Kualifikasi	100
Persentase Guru Sertifikasi	53.33
Persentase Guru PNS	53.33
Persentase Ruang Kelas Layak	100

SMAN 1 Rowosari memiliki 14 rombel, 355 peserta didik, jumlah guru 30, dan Akreditasi A Tahun 2018.

- Kurikulum yang digunakan Kurikulum 13
- Persentase Guru Kualifikasi = 100%
- Persentase Guru Sertifikasi = 53,33%
- Rasio Siswa – Guru = 11,83
- Rasio Siswa – Rombel = 25,36
- Persentase Ruang Kelas Layak = 100%

Evaluasi sekolah dengan menggunakan 4 (empat) indikator nasional, menunjukkan bahwa SMAN 1 Rowosari memiliki Akreditasi A, Nilai PMP Tahun 2017 diatas rerata nasional, dan hasil UKG juga diatas rerata nasional, namun hasil UN tahun 2018 menunjukkan hasil capaian masih dibawah rerata nasional.

Indek_UN

UKG

PMP17

40,37

62,75

5,48

(20321837) SMAN 1 ROWOSARI

JL. BAHARI KM.5 ROWOSARI, Tambaksari, Kec. Rowosari, Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah (master referensi)



Guru : 30
 Siswa Laki-laki : 146
 Siswa Perempuan : 209
 Rombongan Belajar : 14

Kurikulum : K-13
 Penyelenggaraan : Sehari Penuh/5h
 Manajemen Berbasis Sekolah : ☐
 Semester Data : 2018/2019-2

Akses Internet : ☒
 Sumber Listrik : ☒
 Daya Listrik : 15,000
 Luas Tanah : 13,575 M²

Detail Sekolah (DAPODIK) Klik Disini

Akreditasi : A

Kepala Sekolah : Suharto, S.pd. M.pd

Operator : Iwan Setiawan

 Berikan saran, komentar dan informasi Anda
 untuk SMAN 1 ROWOSARI

Sekolah dapat memperbaiki data melalui :

- ☒ Aplikasi Dapodikdasmen
- ☒ Verifikasi-Validasi Satuan Pendidikan
- ☒ Verifikasi-Validasi Peserta Didik
- ☒ Verifikasi-Validasi PTK

Ruang Kelas : 14 *
 Laboratorium : 4 *
 Perpustakaan : 1 *
 Sanitasi Siswa : 2 *

Proses Pembelajaran

Rasio Siswa Rombel 25.36

Rasio Siswa Ruang Kelas * 25.36

Rasio Siswa Guru 11.83

Persentase Guru Kualifikasi 100

Persentase Guru Sertifikasi 53.33

Persentase Guru PNS 53.33

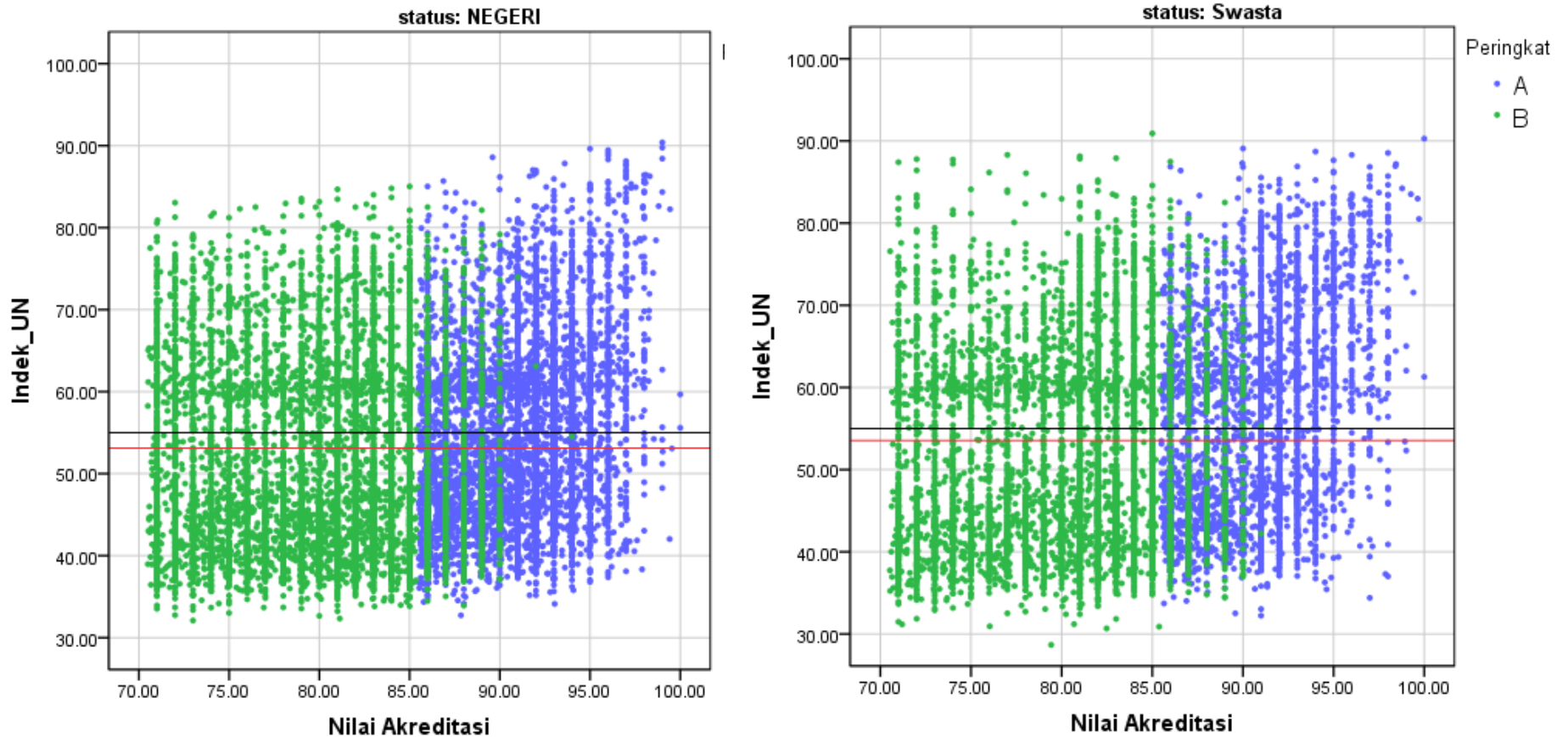
Persentase Ruang Kelas Layak 100

SMAN 1 Rowosari memiliki 14 rombel, 355 peserta didik, jumlah guru 30, dan Akreditasi A Tahun 2018.

- Kurikulum yang digunakan Kurikulum 13
- Persentase Guru Kualifikasi = 100%
- Persentase Guru Sertifikasi = 53,33%
- Rasio Siswa – Guru = 11,83
- Rasio Siswa – Rombel = 25,36
- Persentase Ruang Kelas Layak = 100%

Evaluasi sekolah dengan menggunakan 4 (empat) indikator nasional, menunjukkan bahwa SMAN 1 Rowosari memiliki Akreditasi A, Nilai PMP Tahun 2017 diatas rerata nasional, dan hasil UKG juga diatas rerata nasional, namun hasil UN tahun 2018 menunjukkan hasil capaian masih dibawah rerata nasional.

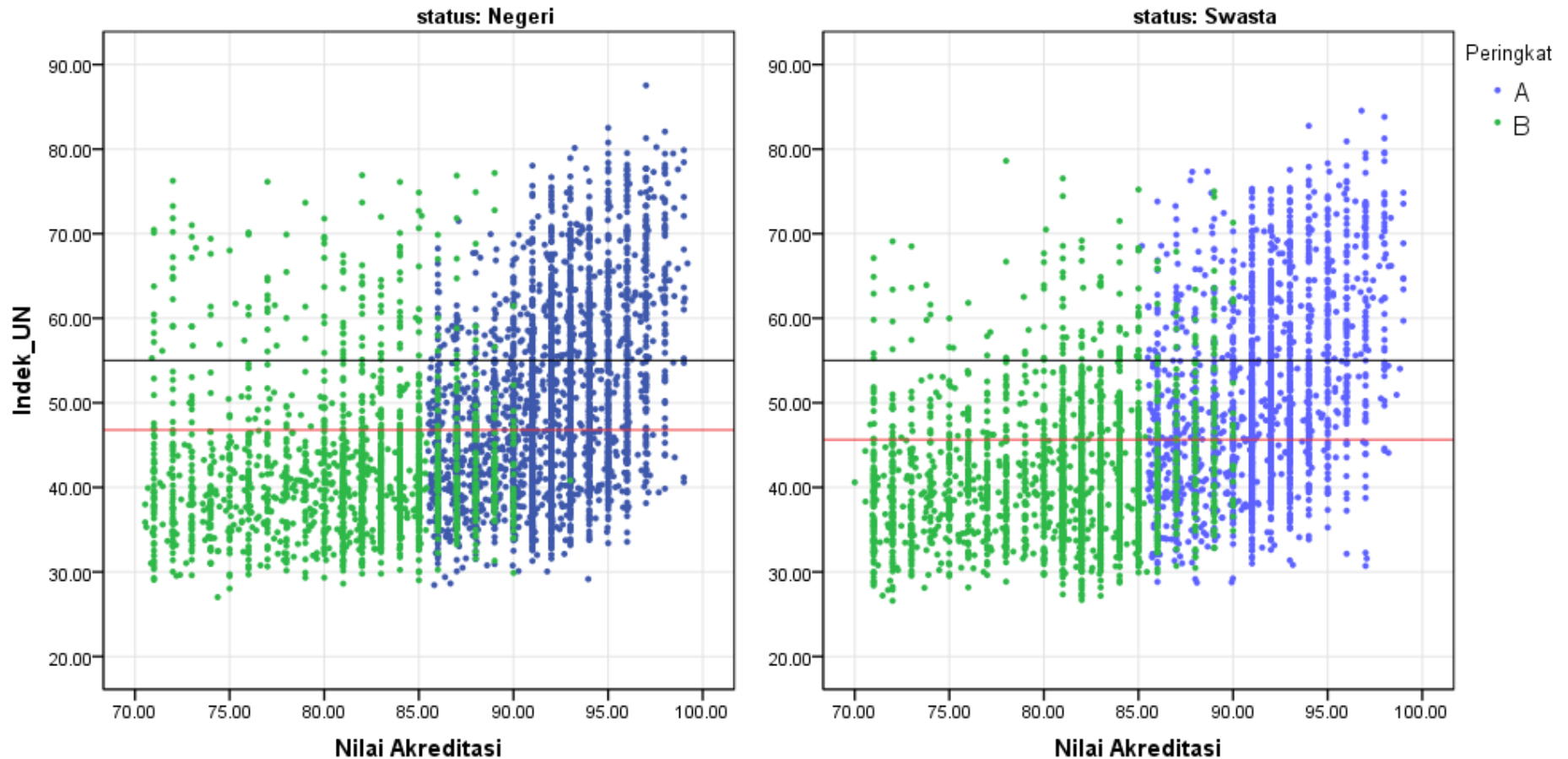
Grafik Sebaran SMP menurut Akreditasi vs Indeks UN 2018 (Akreditasi sd tahun 2018)



Sebagian besar SMP Negeri maupun Swasta yang memiliki Akreditasi A atau B, namun hasil capaian UN tahun 2018 masih dibawah nilai kelulusan UN (55) dan rata-rata nasional.
(Titik biru adalah SMP dengan Akreditasi A dan Titik Hijau adalah SMP dengan Akreditasi B)

Grafik Sebaran SMA menurut Akreditasi vs Indeks UN 2018

(Akreditasi tahun 2012 sd tahun 2018)



Sebagian besar SMA Negeri maupun Swasta yang memiliki Akreditasi A atau B, namun hasil capain UN tahun 2018 masih dibawah nilai kelulusan UN (55) dan rata-rata nasional.

(Titik biru adalah SMA dengan Akreditasi A dan Titik Hijau adalah SMA dengan Akreditasi B)

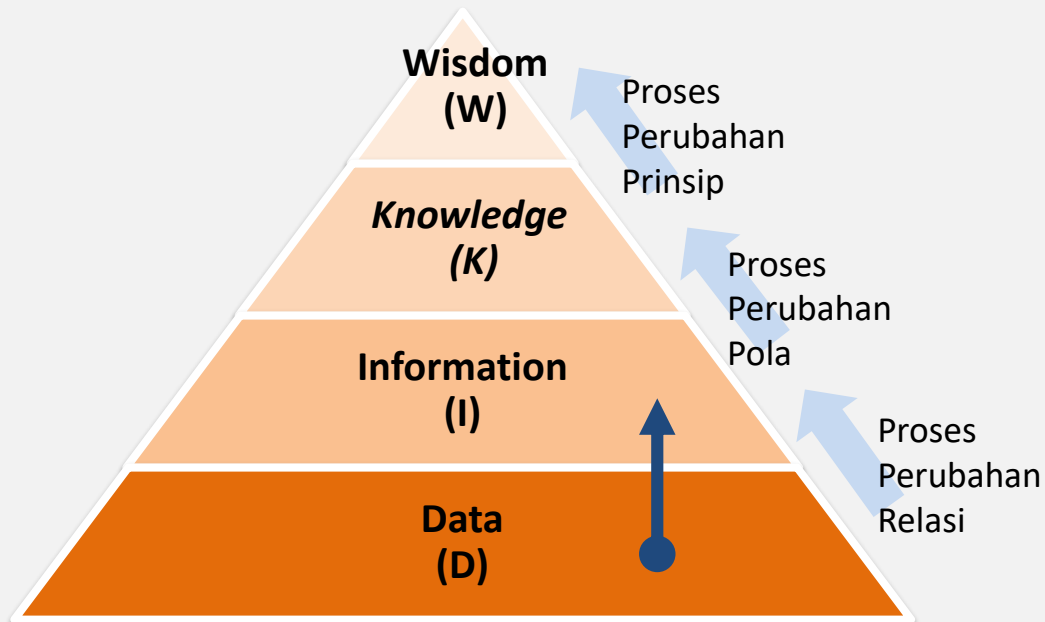
Siklus Manajemen Pembangunan



dadang-solihin.blogspot.com

DIMENSI SISTEM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

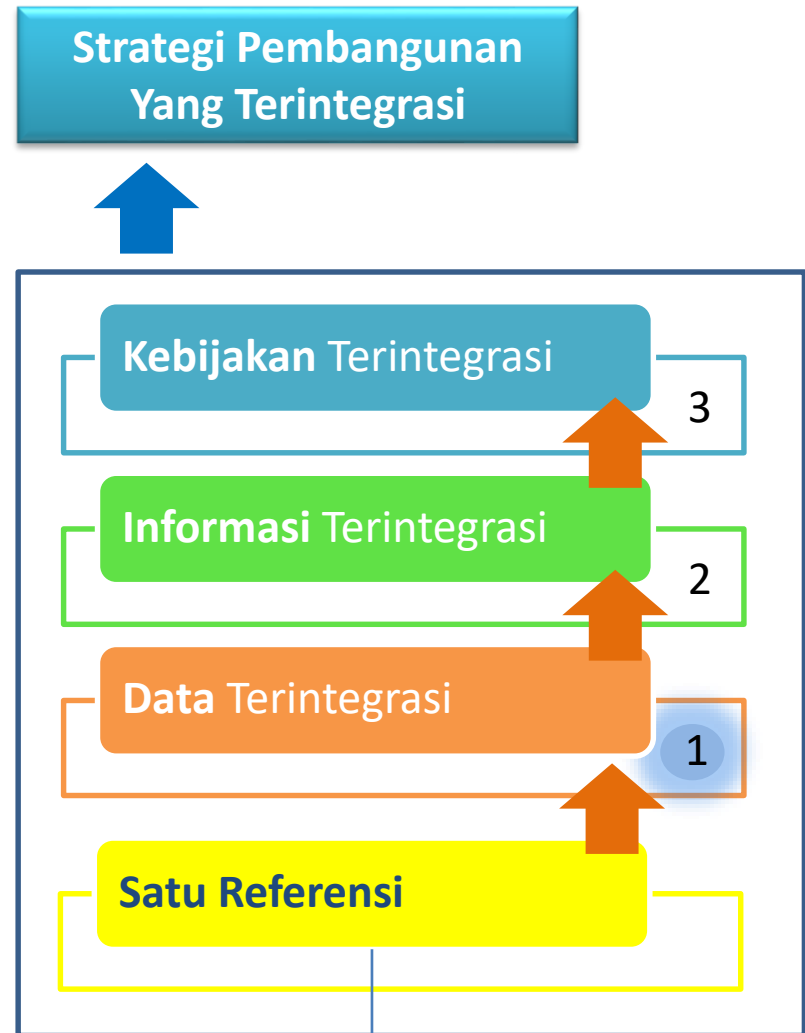
Hirarki Manajemen Pengetahuan



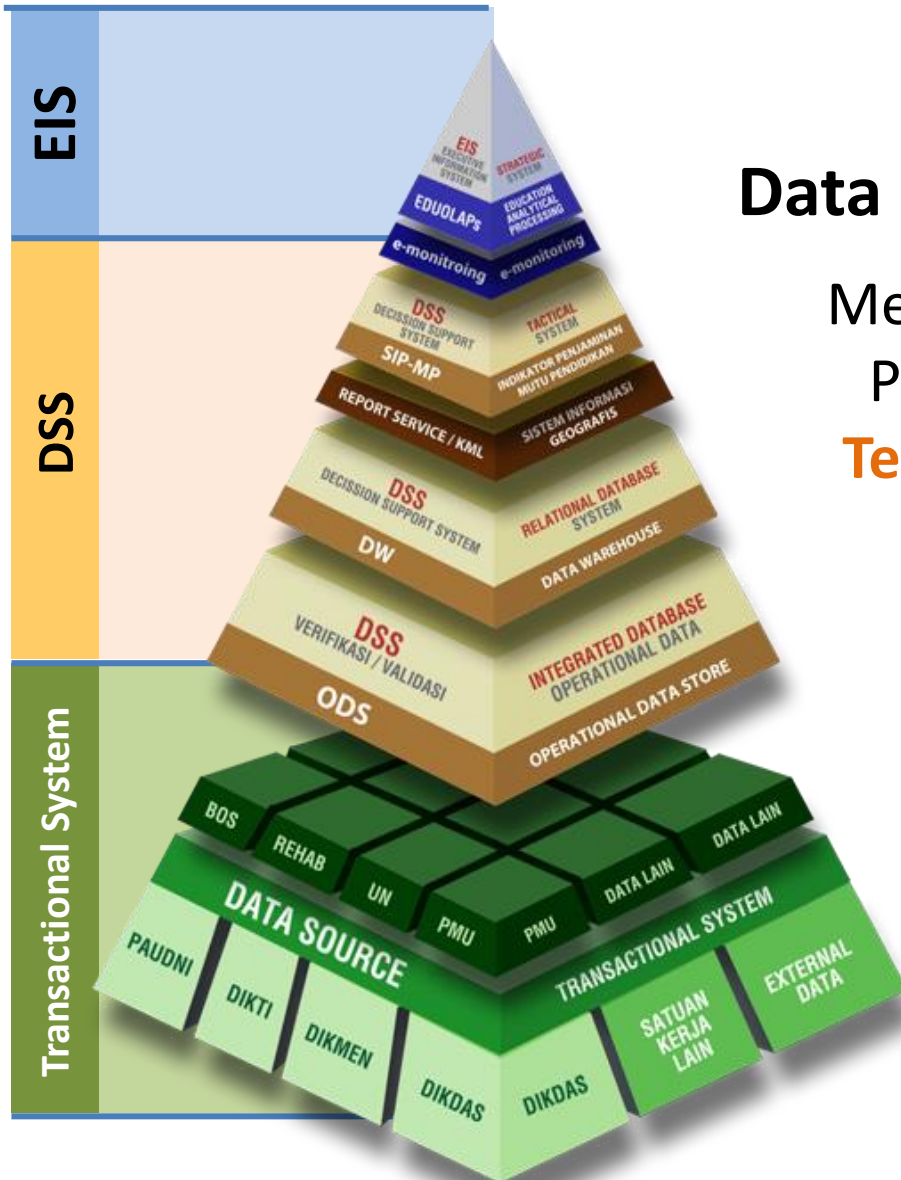
*) Rowley, Jennifer (2007). "The wisdom hierarchy: representations of the DIKW hierarchy". *Journal of Information and Communication Science* **33** (2): 163–180

- **Satuan Pendidikan = NPSN**
(NPSN = Nomor Pokok Sekolah Nasional)
- **Peserta Didik = NISN**
(NISN = Nomor Identitas Siswa Nasional)
- **Guru dan Tenaga Kependidikan = NUPTK**
(NUPTK = Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan)

Derivatif Strategi Pembangunan



Menurut fungsi Sistem



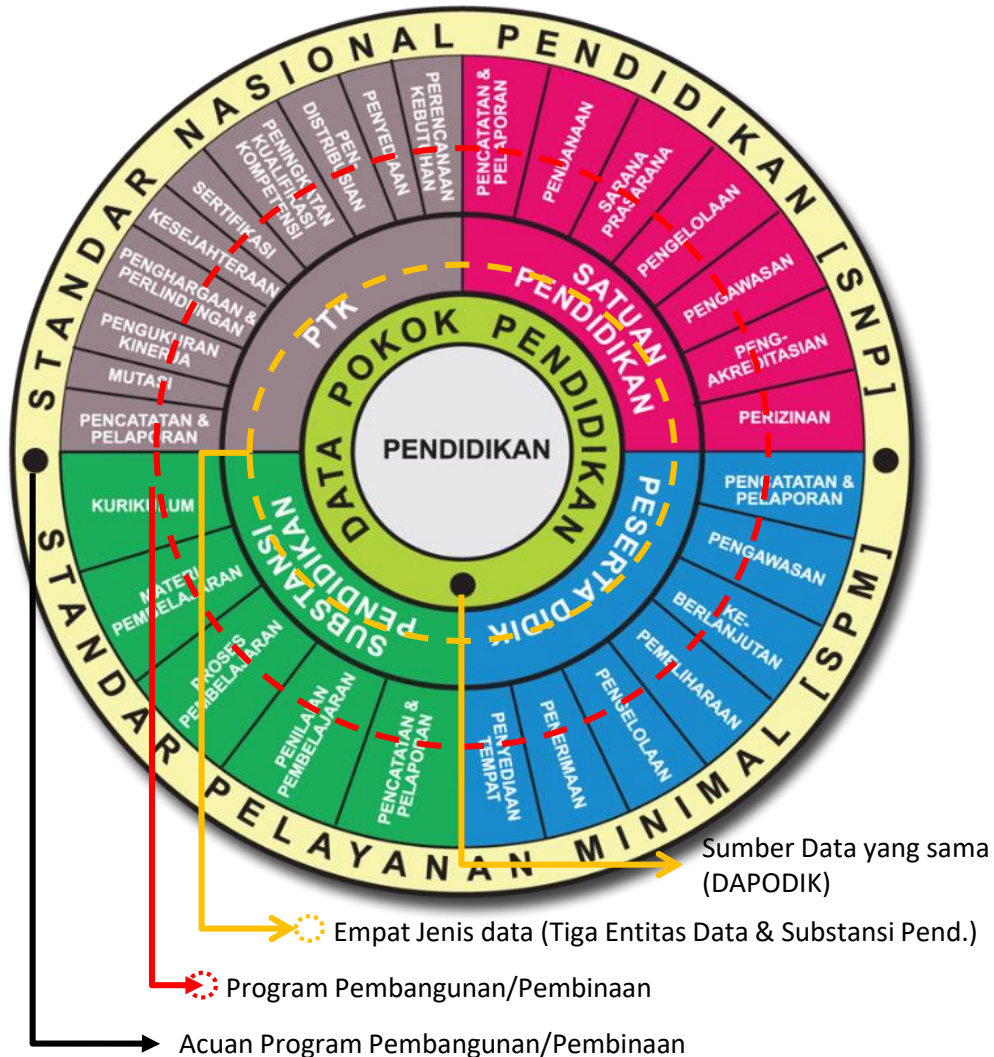
DAPODIKBUD

Data Pokok Pendidikan-Kebudayaan

Merupakan Sistem Pengelolaan Data Pendidikan dan Kebudayaan yang **Terintegrasi**, untuk menunjang Tata Kelola Data dan Informasi yang terpadu.

SATU DATA

EMPAT BAGIAN PENTING KONSEP DASAR DAPODIK



DAPODIK adalah suatu konsep pengelolaan Data Pendidikan yang **bersifat Relational dan Longitudinal**, sehingga program-program pembangunan pendidikan dapat terarah dan akan mempermudah dalam menyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan pendidikan dalam rangka peningkatan Mutu Pendidikan yang Merata dan Tepat Sasaran.

Acuan pembangunan pendidikan nasional adalah terpenuhinya SPM dan SNP dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Untuk mewujudkan pembangunan pendidikan tersebut dibagi menjadi empat faktor/bidang garapan yaitu:

1. PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan)
2. Satuan Pendidikan
3. Peserta Didik, dan
4. Substansi Pendidikan.

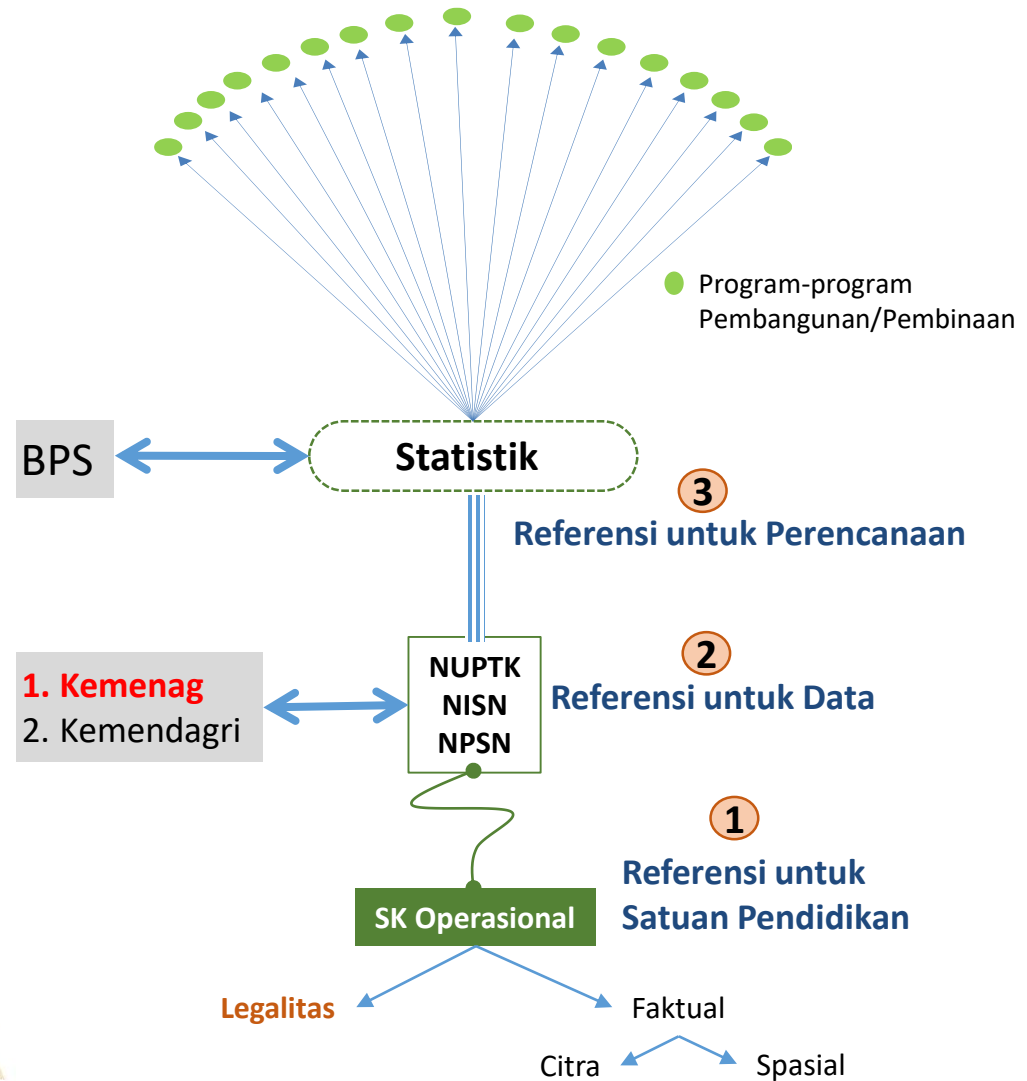
Didalam implementasinya keempat faktor pendidikan harus tergambarkan atau didukung dengan Data Pokok Pendidikan yang sama sumbernya.



Tari Kataga

25 Mei 2018, SDN Pogu Katoda,
Wanokaka, Sumba Barat (Foto Mike Feng Naftali)

Optimalisasi Koordinasi dengan lembaga yang berwenang (sesuai sifat referensi data)



Standar dalam UU no.20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional



Pasal 1, Ayat 17: Standar nasional pendidikan adalah **kriteria minimal** tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia



Pasal 1, Ayat 3 : Sistem pendidikan nasional adalah **keseluruhan komponen** pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional

1.2

BSNP

4/28/2019



SNP dan Akreditasi

Penyelarasan antara Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan sistem akreditasi mutlak dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran yang berkualitas di satuan pendidikan.

Penyelarasan ini merupakan amanah undang-undang sistem pendidikan nasional. Selain itu juga merupakan bentuk respon terhadap tren dunia internasional sebagaimana dilaporkan Bank Dunia yang menyatakan bahwa di berbagai negara belum terjadi pembelajaran di sekolah.

Penyelarasan dimulai dari membangun kesadaran tentang pentingnya standar, menyamakan persepsi terhadap makna dan cara mengimplementasikan standar serta mengukur pencapaian standar melalui akreditasi.

Sumber BSNP

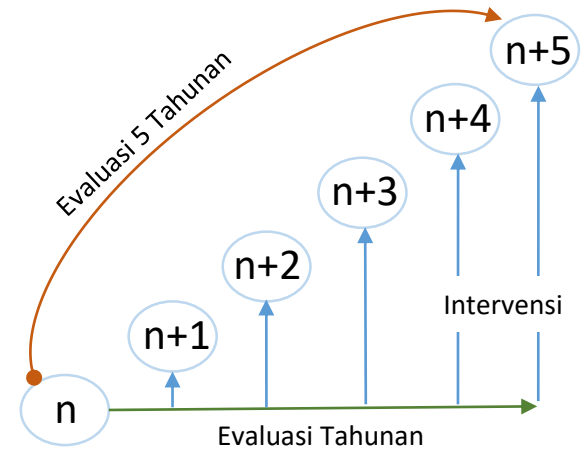
Evaluasi Pendidikan Nasional di Kemendikbud sesuai dengan tujuannya

Sistem Informasi **Penjamin Mutu Pendidikan (PMP)** ini digunakan untuk:

1. Memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian Standar Nasional Pendidikan pada satuan pendidikan dan/atau program keahlian
2. Memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian Standar Nasional Pendidikan

Tujuan **UKG**

- Pemetaan penguasaan kompetensi guru (kompetensi pedagogik serta profesional) sebagai basic pertimbangan proses program pembinaan serta pengembangan profesi guru dalam bentuk aktivitas pengembangan keprofesian berkepanjangan.
- Sebagai entry point penilaian kinerja guru serta sebagai alat kontrol proses penilaian kinerja guru.



Ujian Nasional (UN)

Diselenggarakan untuk **mengukur pencapaian kompetensi lulusan peserta didik** pada jenjang satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagai hasil dari proses pembelajaran sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Selain itu, salah satu kegunaan hasil UN adalah **untuk melakukan pemetaan tingkat pencapaian hasil belajar siswa pada satuan pendidikan**. Salah satu upaya untuk mewujudkan pendidikan berkualitas diperlukan adanya sistem penilaian yang dapat dipercaya (*credible*), dapat diterima (*acceptable*), dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*)

I. Indikator Nasional yang digunakan

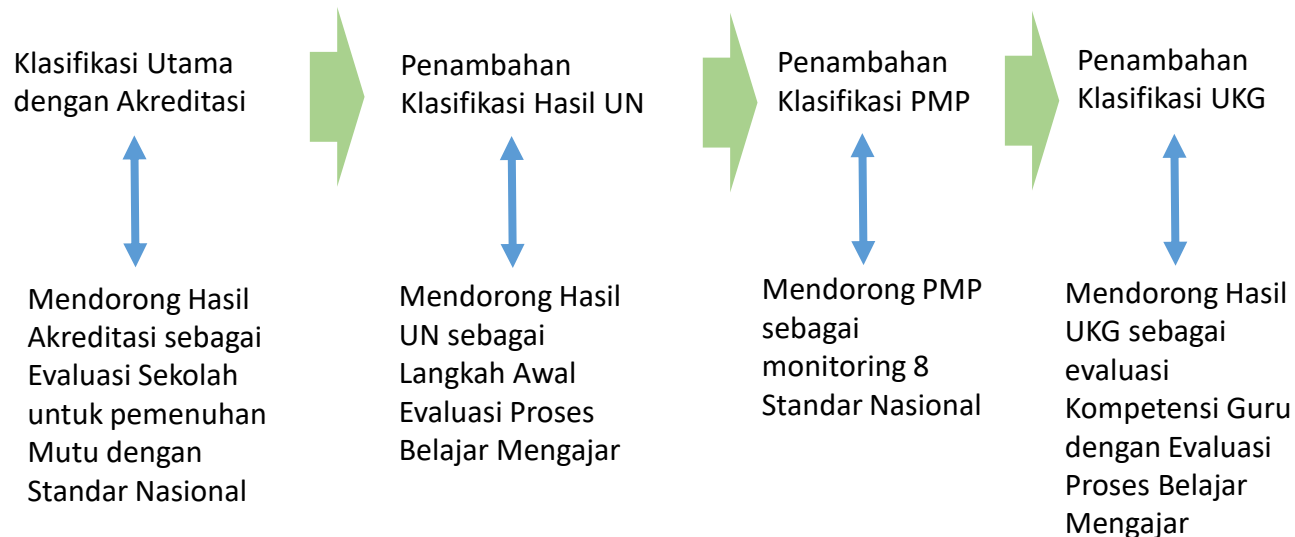
A. Indikator Utama: Akreditasi Sekolah (BAN-SM)

B. Indikator Kontrol:

1. UN (Puspendik-Balitbang)
2. PMP (Dirjen Dikdasmen)
3. UKG (Dirjen GTK)

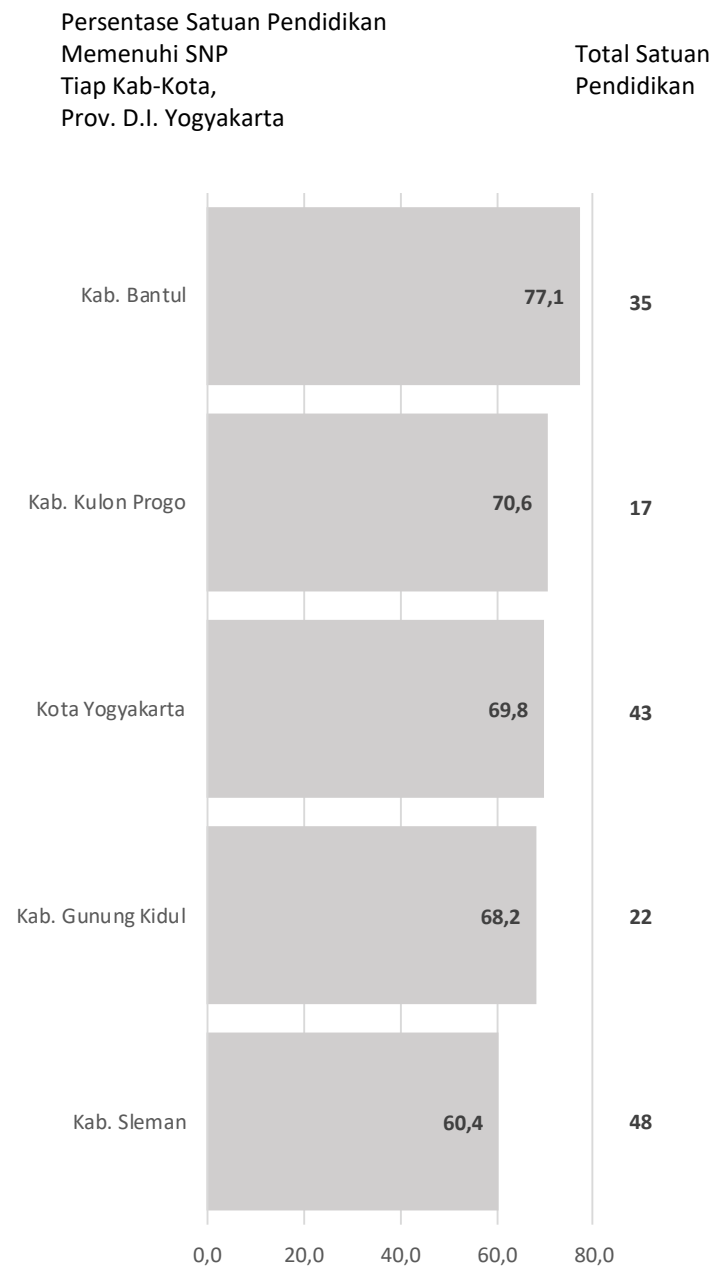
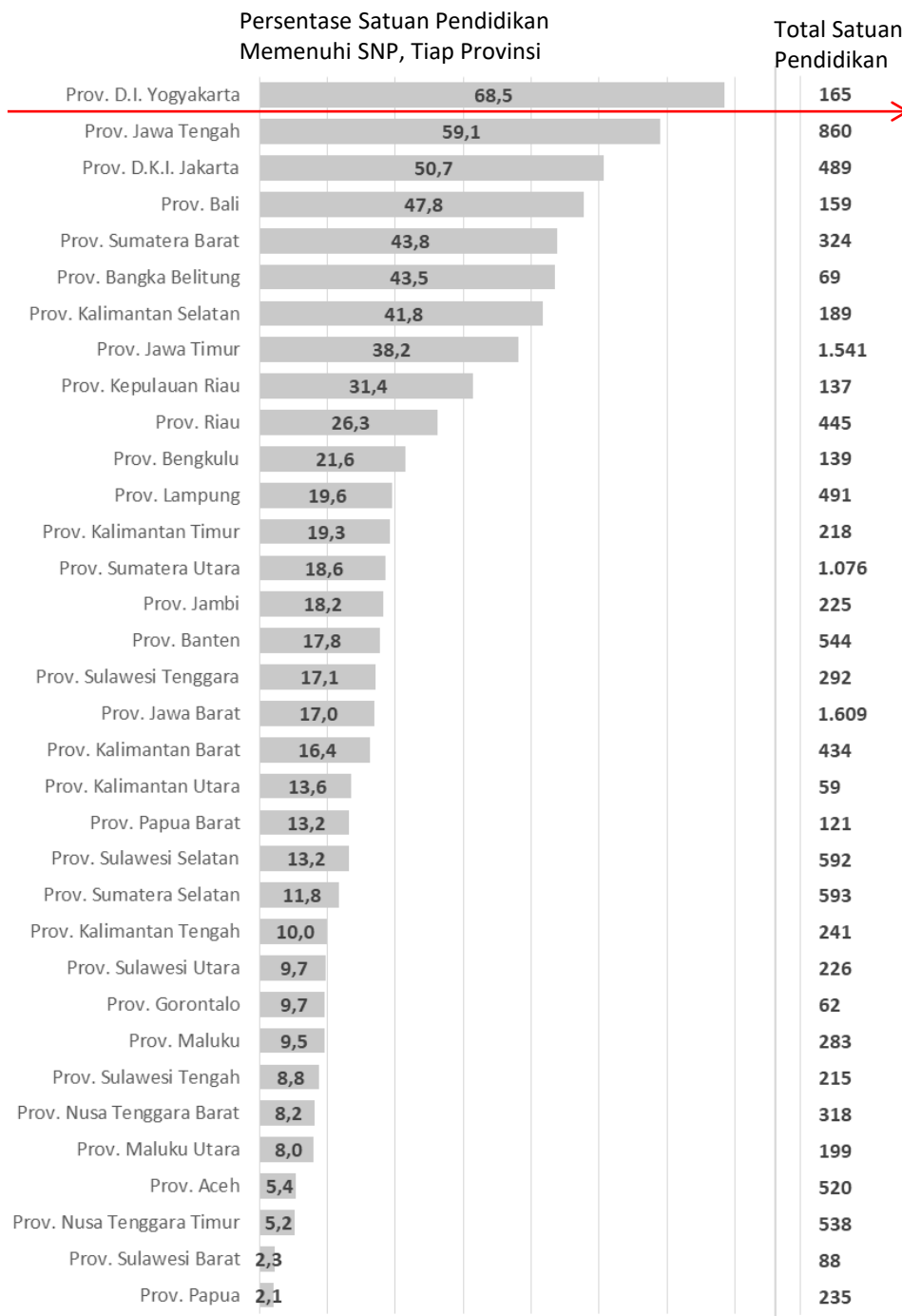
II. Klasifikasi dengan Indikator Utama dan Indikator Kontrol secara bertingkat

Alur Klasifikasi Satuan Pendidikan



Jumlah Satuan Pendidikan yang memenuhi Standar Nasional,
(Kondisi 2 Mei 2019)

Jenis	Total Sekolah	Memenuhi SNP	
		Jumlah	%
SD	148.805	44.893	30,2%
SMP	39.423	10.540	26,7%
SMA	13.709	3.220	23,5%
SMK	13.929	1.700	12,2%



Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Total Satuan Pendidikan

Prov. D.I. Yogyakarta	68,5	165
Prov. Jawa Tengah	59,1	860
Prov. D.K.I. Jakarta	50,7	489
Prov. Bali	47,8	159
Prov. Sumatera Barat	43,8	324
Prov. Bangka Belitung	43,5	69
Prov. Kalimantan Selatan	41,8	189
Prov. Jawa Timur	38,2	1.541
Prov. Kepulauan Riau	31,4	137
Prov. Riau	26,3	445
Prov. Bengkulu	21,6	139
Prov. Lampung	19,6	491
Prov. Kalimantan Timur	19,3	218
Prov. Sumatera Utara	18,6	1.076
Prov. Jambi	18,2	225
Prov. Banten	17,8	544
Prov. Sulawesi Tenggara	17,1	292
Prov. Jawa Barat	17,0	1.609
Prov. Kalimantan Barat	16,4	434
Prov. Kalimantan Utara	13,6	59
Prov. Papua Barat	13,2	121
Prov. Sulawesi Selatan	13,2	592
Prov. Sumatera Selatan	11,8	593
Prov. Kalimantan Tengah	10,0	241
Prov. Sulawesi Utara	9,7	226
Prov. Gorontalo	9,7	62
Prov. Maluku	9,5	283
Prov. Sulawesi Tengah	8,8	215
Prov. Nusa Tenggara Barat	8,2	318
Prov. Maluku Utara	8,0	199
Prov. Aceh	5,4	520
Prov. Nusa Tenggara Timur	5,2	538
Prov. Sulawesi Barat	2,3	88
Prov. Papua	2,1	235

Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP Tiap Kab-Kota, Prov. Jawa Tengah

Total Satuan Pendidikan

Kab. Purbalingga	93,8	16
Kota Salatiga	88,9	9
Kab. Rembang	85,7	14
Kab. Karanganyar	78,6	14
Kota Pekalongan	77,8	9
Kab. Wonogiri	77,3	22
Kab. Banjarnegara	76,9	13
Kab. Kudus	76,5	17
Kab. Wonosobo	75,0	16
Kota Surakarta	71,4	35
Kab. Banyumas	70,3	37
Kab. Jepara	69,6	23
Kab. Temanggung	68,8	16
Kota Magelang	66,7	12
Kab. Sukoharjo	66,7	27
Kab. Klaten	66,7	27
Kab. Purworejo	65,2	23
Kab. Semarang	64,0	25
Kota Tegal	63,6	11
Kab. Cilacap	63,4	41
Kab. Pekalongan	61,1	18
Kab. Boyolali	60,0	30
Kab. Magelang	58,3	36
Kab. Pati	56,0	25
Kota Semarang	52,0	75
Kab. Brebes	51,6	31
Kab. Blora	50,0	24
Kab. Tegal	46,2	26
Kab. Sragen	45,8	24
Kab. Kebumen	45,8	24
Kab. Pemasang	43,5	23
Kab. Batang	40,0	15
Kab. Kendal	36,4	33
Kab. Demak	35,3	34
Kab. Grobogan	34,3	35

Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Total Satuan Pendidikan

Prov. D.I. Yogyakarta	68,5	165
Prov. Jawa Tengah	59,1	860
Prov. D.K.I. Jakarta	50,7	489
Prov. Bali	47,8	159
Prov. Sumatera Barat	43,8	324
Prov. Bangka Belitung	43,5	69
Prov. Kalimantan Selatan	41,8	189
Prov. Jawa Timur	38,2	1.541
Prov. Kepulauan Riau	31,4	137
Prov. Riau	26,3	445
Prov. Bengkulu	21,6	139
Prov. Lampung	19,6	491
Prov. Kalimantan Timur	19,3	218
Prov. Sumatera Utara	18,6	1.076
Prov. Jambi	18,2	225
Prov. Banten	17,8	544
Prov. Sulawesi Tenggara	17,1	292
Prov. Jawa Barat	17,0	1.609
Prov. Kalimantan Barat	16,4	434
Prov. Kalimantan Utara	13,6	59
Prov. Papua Barat	13,2	121
Prov. Sulawesi Selatan	13,2	592
Prov. Sumatera Selatan	11,8	593
Prov. Kalimantan Tengah	10,0	241
Prov. Sulawesi Utara	9,7	226
Prov. Gorontalo	9,7	62
Prov. Maluku	9,5	283
Prov. Sulawesi Tengah	8,8	215
Prov. Nusa Tenggara Barat	8,2	318
Prov. Maluku Utara	8,0	199
Prov. Aceh	5,4	520
Prov. Nusa Tenggara Timur	5,2	538
Prov. Sulawesi Barat	2,3	88
Prov. Papua	2,1	235

Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP Tiap Kab-Kota, Prov. DKI Jakarta

Total Satuan Pendidikan

Kota Jakarta Pusat	60,7	56
Kota Jakarta Timur	54,1	122
Kota Jakarta Barat	50,8	118
Kota Jakarta Selatan	48,5	103
Kota Jakarta Utara	42,7	89
Kab. Kepulauan Seribu	0,0	1

Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Total Satuan Pendidikan

Prov. D.I. Yogyakarta	68,5	165
Prov. Jawa Tengah	59,1	860
Prov. D.K.I. Jakarta	50,7	489
Prov. Bali	47,8	159
Prov. Sumatera Barat	43,8	324
Prov. Bangka Belitung	43,5	69
Prov. Kalimantan Selatan	41,8	189
Prov. Jawa Timur	38,2	1.541
Prov. Kepulauan Riau	31,4	137
Prov. Riau	26,3	445
Prov. Bengkulu	21,6	139
Prov. Lampung	19,6	491
Prov. Kalimantan Timur	19,3	218
Prov. Sumatera Utara	18,6	1.076
Prov. Jambi	18,2	225
Prov. Banten	17,8	544
Prov. Sulawesi Tenggara	17,1	292
Prov. Jawa Barat	17,0	1.609
Prov. Kalimantan Barat	16,4	434
Prov. Kalimantan Utara	13,6	59
Prov. Papua Barat	13,2	121
Prov. Sulawesi Selatan	13,2	592
Prov. Sumatera Selatan	11,8	593
Prov. Kalimantan Tengah	10,0	241
Prov. Sulawesi Utara	9,7	226
Prov. Gorontalo	9,7	62
Prov. Maluku	9,5	283
Prov. Sulawesi Tengah	8,8	215
Prov. Nusa Tenggara Barat	8,2	318
Prov. Maluku Utara	8,0	199
Prov. Aceh	5,4	520
Prov. Nusa Tenggara Timur	5,2	538
Prov. Sulawesi Barat	2,3	88
Prov. Papua	2,1	235

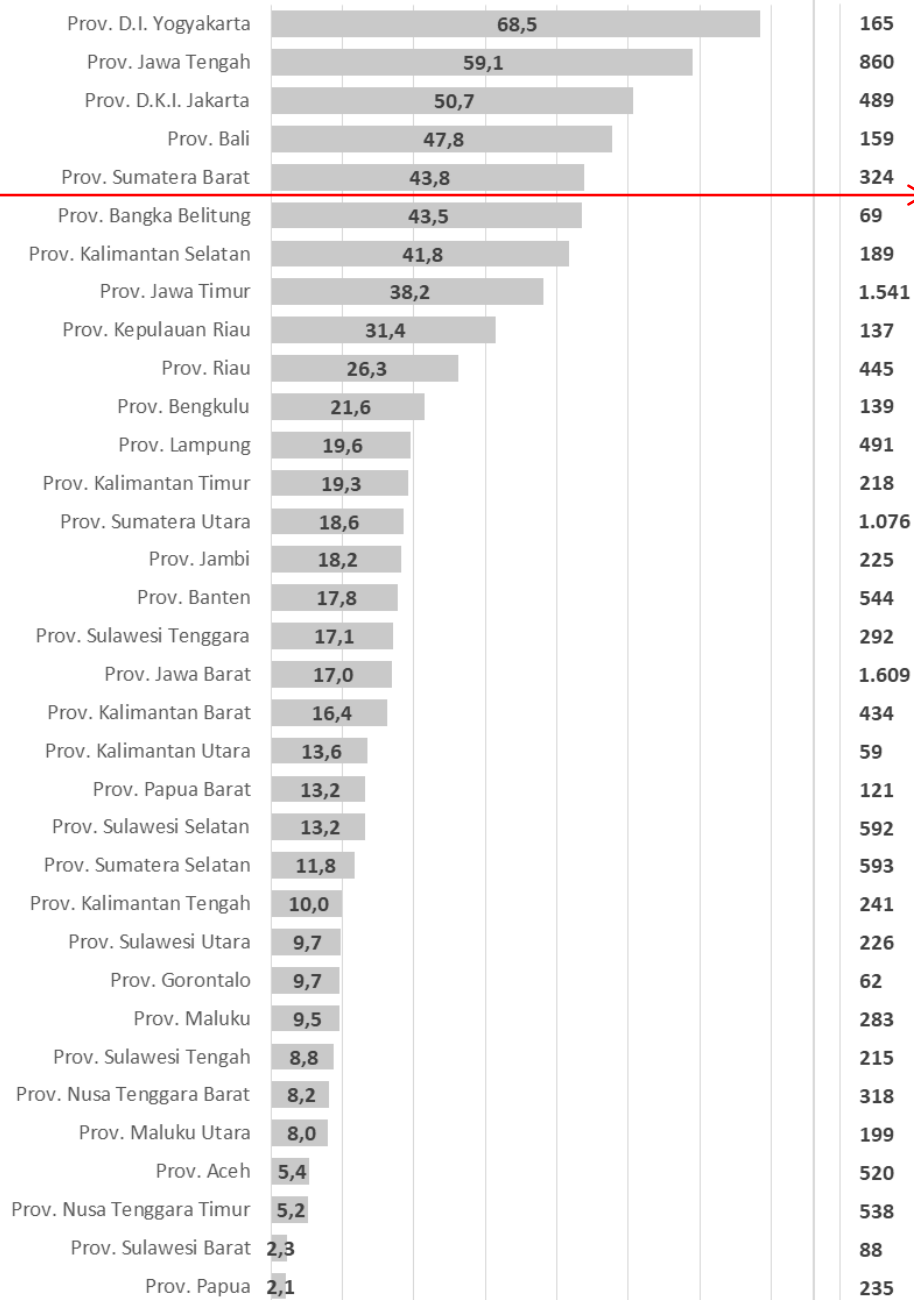
Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP Tiap Kab-Kota, Prov. Bali

Total Satuan Pendidikan

Kab. Gianyar	63,6	11
Kab. Karang Asem	61,1	18
Kab. Badung	57,1	21
Kota Denpasar	56,3	32
Kab. Klungkung	45,5	11
Kab. Buleleng	39,4	33
Kab. Tabanan	35,7	14
Kab. Jembrana	30,8	13
Kab. Bangli	16,7	6

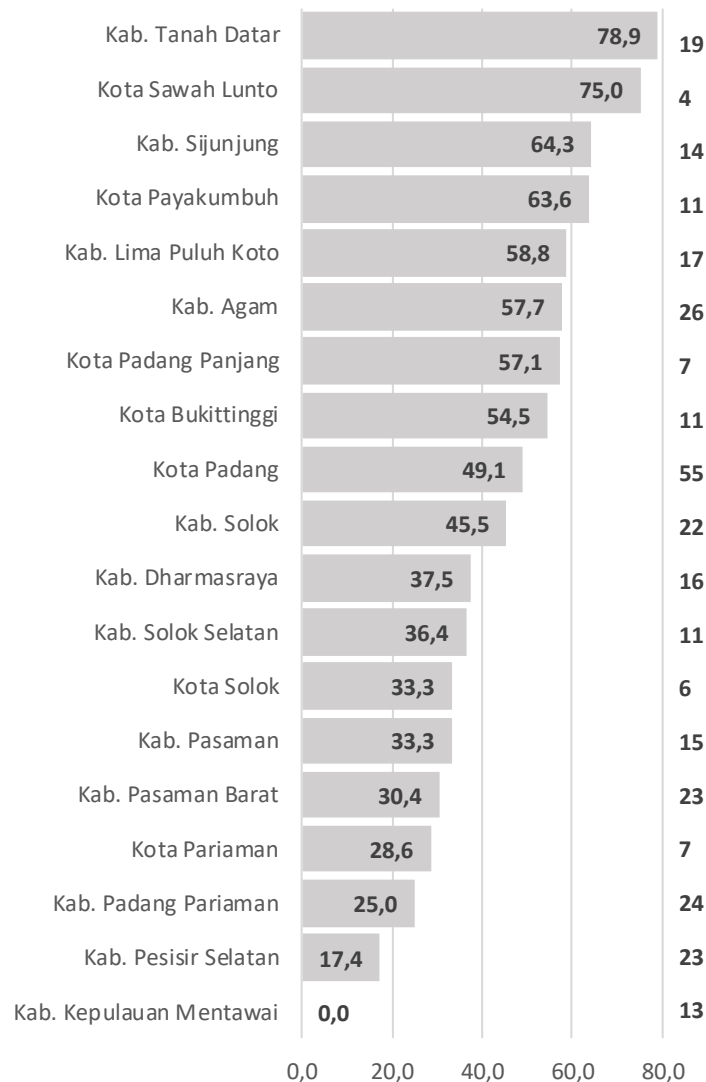
Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Total Satuan Pendidikan



Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP Tiap Kab-Kota, Prov. Sumatera Barat

Total Satuan Pendidikan



Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Total Satuan Pendidikan

Prov. D.I. Yogyakarta	68,5	165
Prov. Jawa Tengah	59,1	860
Prov. D.K.I. Jakarta	50,7	489
Prov. Bali	47,8	159
Prov. Sumatera Barat	43,8	324
Prov. Bangka Belitung	43,5	69
Prov. Kalimantan Selatan	41,8	189
Prov. Jawa Timur	38,2	1.541
Prov. Kepulauan Riau	31,4	137
Prov. Riau	26,3	445
Prov. Bengkulu	21,6	139
Prov. Lampung	19,6	491
Prov. Kalimantan Timur	19,3	218
Prov. Sumatera Utara	18,6	1.076
Prov. Jambi	18,2	225
Prov. Banten	17,8	544
Prov. Sulawesi Tenggara	17,1	292
Prov. Jawa Barat	17,0	1.609
Prov. Kalimantan Barat	16,4	434
Prov. Kalimantan Utara	13,6	59
Prov. Papua Barat	13,2	121
Prov. Sulawesi Selatan	13,2	592
Prov. Sumatera Selatan	11,8	593
Prov. Kalimantan Tengah	10,0	241
Prov. Sulawesi Utara	9,7	226
Prov. Gorontalo	9,7	62
Prov. Maluku	9,5	283
Prov. Sulawesi Tengah	8,8	215
Prov. Nusa Tenggara Barat	8,2	318
Prov. Maluku Utara	8,0	199
Prov. Aceh	5,4	520
Prov. Nusa Tenggara Timur	5,2	538
Prov. Sulawesi Barat	2,3	88
Prov. Papua	2,1	235

Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP Tiap Kab-Kota, Prov. Bangka Belitung

Total Satuan Pendidikan

Kab. Belitung	71,4	7
Kab. Bangka	56,3	16
Kota Pangkalpinang	45,5	11
Kab. Belitung Timur	42,9	7
Kab. Bangka Barat	40,0	10
Kab. Bangka Tengah	28,6	7
Kab. Bangka Selatan	18,2	11

Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Total Satuan Pendidikan

Prov. D.I. Yogyakarta	68,5	165
Prov. Jawa Tengah	59,1	860
Prov. D.K.I. Jakarta	50,7	489
Prov. Bali	47,8	159
Prov. Sumatera Barat	43,8	324
Prov. Bangka Belitung	43,5	69
Prov. Kalimantan Selatan	41,8	189
Prov. Jawa Timur	38,2	1.541
Prov. Kepulauan Riau	31,4	137
Prov. Riau	26,3	445
Prov. Bengkulu	21,6	139
Prov. Lampung	19,6	491
Prov. Kalimantan Timur	19,3	218
Prov. Sumatera Utara	18,6	1.076
Prov. Jambi	18,2	225
Prov. Banten	17,8	544
Prov. Sulawesi Tenggara	17,1	292
Prov. Jawa Barat	17,0	1.609
Prov. Kalimantan Barat	16,4	434
Prov. Kalimantan Utara	13,6	59
Prov. Papua Barat	13,2	121
Prov. Sulawesi Selatan	13,2	592
Prov. Sumatera Selatan	11,8	593
Prov. Kalimantan Tengah	10,0	241
Prov. Sulawesi Utara	9,7	226
Prov. Gorontalo	9,7	62
Prov. Maluku	9,5	283
Prov. Sulawesi Tengah	8,8	215
Prov. Nusa Tenggara Barat	8,2	318
Prov. Maluku Utara	8,0	199
Prov. Aceh	5,4	520
Prov. Nusa Tenggara Timur	5,2	538
Prov. Sulawesi Barat	2,3	88
Prov. Papua	2,1	235

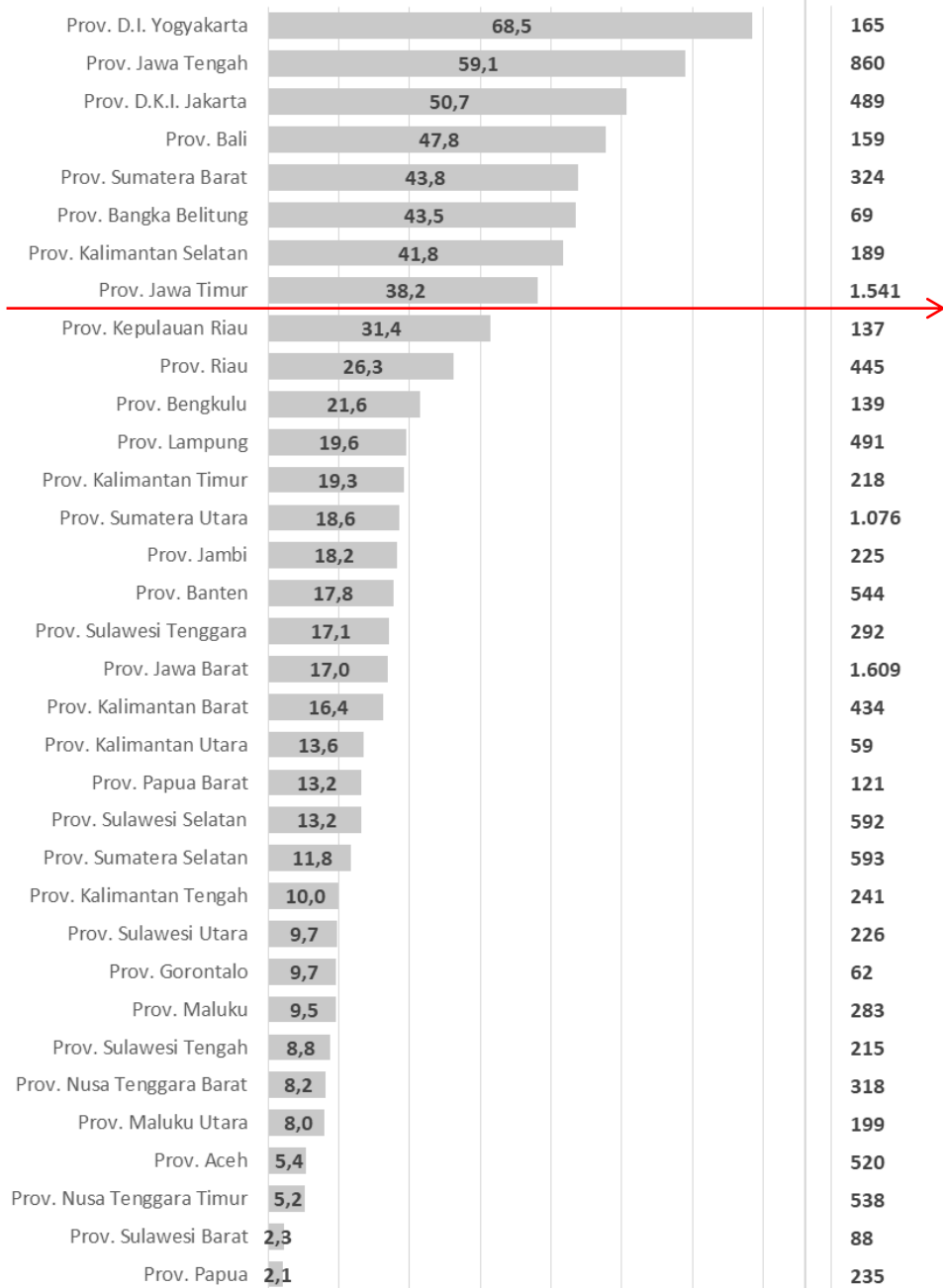
Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP Tiap Kab-Kota, Prov. Kalimantan Selatan

Total Satuan Pendidikan

Kab. Hulu Sungai Tengah	60,0	10
Kota Banjarmasin	58,6	29
Kab. Hulu Sungai Selatan	55,6	9
Kab. Tabalong	50,0	12
Kota Banjarbaru	46,2	13
Kab. Kotabaru	42,3	26
Kab. Tanah Bumbu	41,7	12
Kab. Tanah Laut	41,2	17
Kab. Barito Kuala	33,3	18
Kab. Hulu Sungai Utara	28,6	7
Kab. Banjar	27,8	18
Kab. Balangan	18,2	11
Kab. Tapin	14,3	7

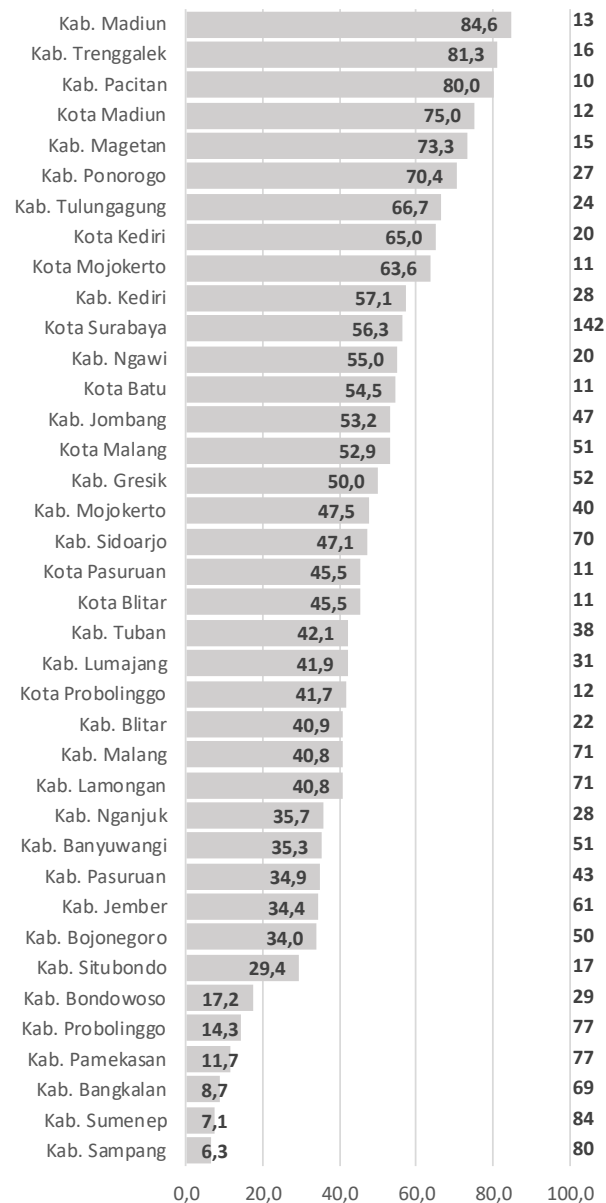
Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Total Satuan
Pendidikan



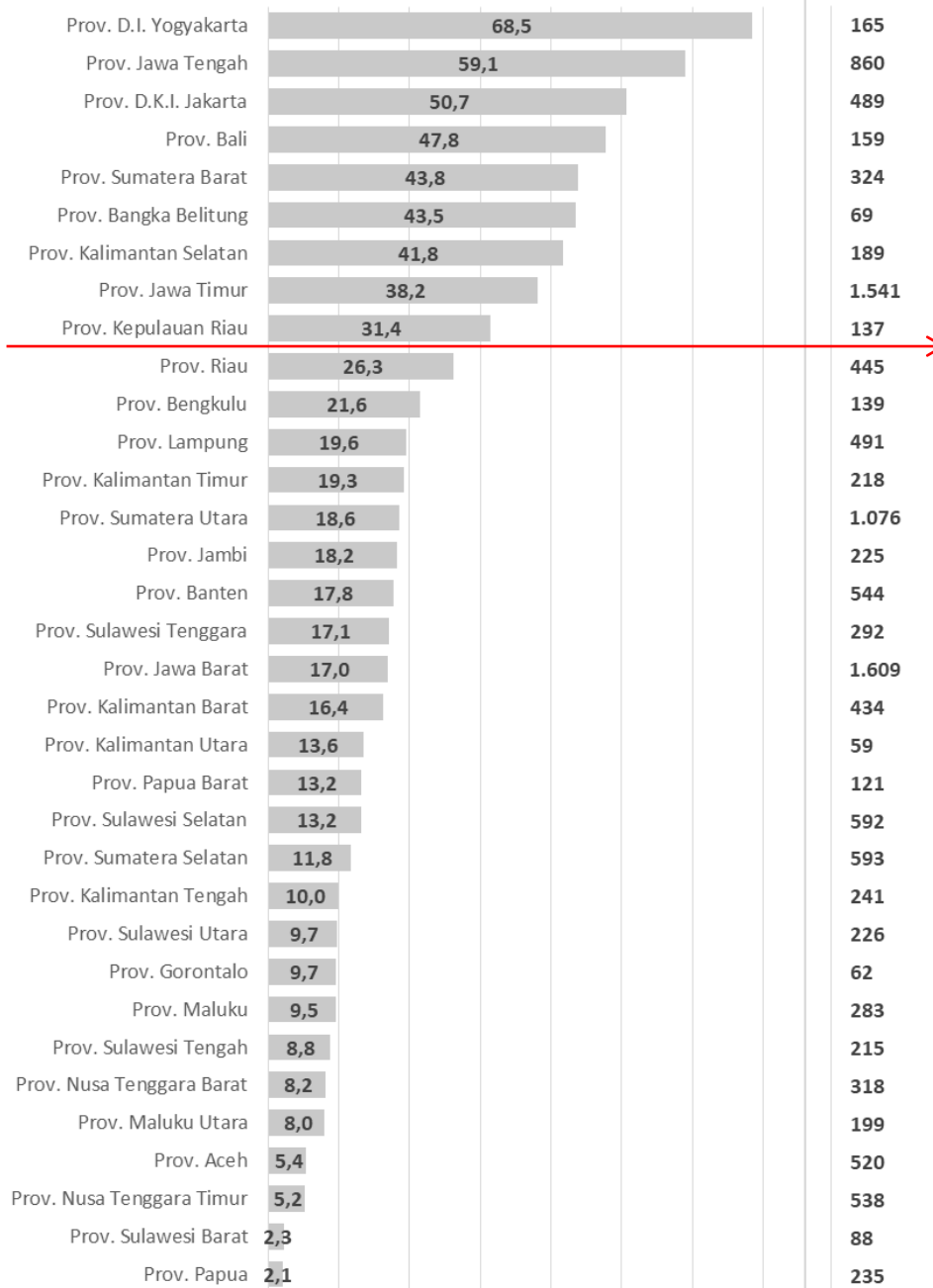
Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP
Tiap Kab-Kota, Prov. Jawa Timur

Total Satuan
Pendidikan



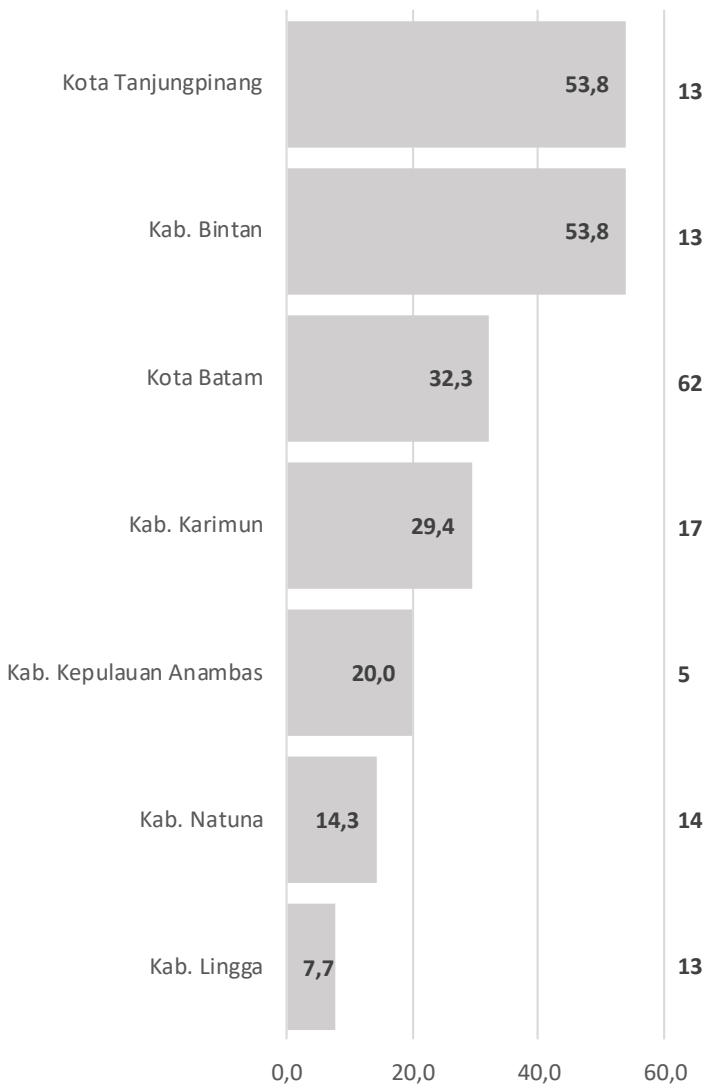
Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Total Satuan Pendidikan



Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP Tiap Kab-Kota, Prov. Kepulauan Riau

Total Satuan Pendidikan



Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Total Satuan Pendidikan

Prov. D.I. Yogyakarta	68,5	165
Prov. Jawa Tengah	59,1	860
Prov. D.K.I. Jakarta	50,7	489
Prov. Bali	47,8	159
Prov. Sumatera Barat	43,8	324
Prov. Bangka Belitung	43,5	69
Prov. Kalimantan Selatan	41,8	189
Prov. Jawa Timur	38,2	1.541
Prov. Kepulauan Riau	31,4	137
Prov. Riau	26,3	445
Prov. Bengkulu	21,6	139
Prov. Lampung	19,6	491
Prov. Kalimantan Timur	19,3	218
Prov. Sumatera Utara	18,6	1.076
Prov. Jambi	18,2	225
Prov. Banten	17,8	544
Prov. Sulawesi Tenggara	17,1	292
Prov. Jawa Barat	17,0	1.609
Prov. Kalimantan Barat	16,4	434
Prov. Kalimantan Utara	13,6	59
Prov. Papua Barat	13,2	121
Prov. Sulawesi Selatan	13,2	592
Prov. Sumatera Selatan	11,8	593
Prov. Kalimantan Tengah	10,0	241
Prov. Sulawesi Utara	9,7	226
Prov. Gorontalo	9,7	62
Prov. Maluku	9,5	283
Prov. Sulawesi Tengah	8,8	215
Prov. Nusa Tenggara Barat	8,2	318
Prov. Maluku Utara	8,0	199
Prov. Aceh	5,4	520
Prov. Nusa Tenggara Timur	5,2	538
Prov. Sulawesi Barat	2,3	88
Prov. Papua	2,1	235

Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP Tiap Kab-Kota, Prov. Riau

Total Satuan Pendidikan

Kota Pekanbaru	54,1	61
Kab. Pelalawan	37,5	24
Kota Dumai	33,3	15
Kab. Kuantan Singingi	33,3	21
Kab. Siak	28,6	35
Kab. Rokan Hulu	26,5	34
Kab. Indragiri Hulu	25,9	27
Kab. Indragiri Hilir	25,0	44
Kab. Bengkalis	17,4	46
Kab. Rokan Hilir	17,2	64
Kab. Kampar	9,8	51
Kab. Kepulauan Meranti	8,7	23

Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Total Satuan Pendidikan

Prov. D.I. Yogyakarta	68,5	165
Prov. Jawa Tengah	59,1	860
Prov. D.K.I. Jakarta	50,7	489
Prov. Bali	47,8	159
Prov. Sumatera Barat	43,8	324
Prov. Bangka Belitung	43,5	69
Prov. Kalimantan Selatan	41,8	189
Prov. Jawa Timur	38,2	1.541
Prov. Kepulauan Riau	31,4	137
Prov. Riau	26,3	445
Prov. Bengkulu	21,6	139
Prov. Lampung	19,6	491
Prov. Kalimantan Timur	19,3	218
Prov. Sumatera Utara	18,6	1.076
Prov. Jambi	18,2	225
Prov. Banten	17,8	544
Prov. Sulawesi Tenggara	17,1	292
Prov. Jawa Barat	17,0	1.609
Prov. Kalimantan Barat	16,4	434
Prov. Kalimantan Utara	13,6	59
Prov. Papua Barat	13,2	121
Prov. Sulawesi Selatan	13,2	592
Prov. Sumatera Selatan	11,8	593
Prov. Kalimantan Tengah	10,0	241
Prov. Sulawesi Utara	9,7	226
Prov. Gorontalo	9,7	62
Prov. Maluku	9,5	283
Prov. Sulawesi Tengah	8,8	215
Prov. Nusa Tenggara Barat	8,2	318
Prov. Maluku Utara	8,0	199
Prov. Aceh	5,4	520
Prov. Nusa Tenggara Timur	5,2	538
Prov. Sulawesi Barat	2,3	88
Prov. Papua	2,1	235

Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP Tiap Kab-Kota, Prov. Bengkulu

Total Satuan Pendidikan

Kab. Bengkulu Utara	44,4	18
Kota Bengkulu	34,6	26
Kab. Lebong	28,6	7
Kab. Rejang Lebong	22,2	18
Kab. Bengkulu Selatan	21,4	14
Kab. Kepahiang	12,5	8
Kab. Muko-muko	11,8	17
Kab. Kaur	7,7	13
Kab. Seluma	0,0	11
Kab. Bengkulu Tengah	0,0	7

Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Total Satuan Pendidikan

Prov. D.I. Yogyakarta	68,5	165
Prov. Jawa Tengah	59,1	860
Prov. D.K.I. Jakarta	50,7	489
Prov. Bali	47,8	159
Prov. Sumatera Barat	43,8	324
Prov. Bangka Belitung	43,5	69
Prov. Kalimantan Selatan	41,8	189
Prov. Jawa Timur	38,2	1.541
Prov. Kepulauan Riau	31,4	137
Prov. Riau	26,3	445
Prov. Bengkulu	21,6	139
Prov. Lampung	19,6	491
Prov. Kalimantan Timur	19,3	218
Prov. Sumatera Utara	18,6	1.076
Prov. Jambi	18,2	225
Prov. Banten	17,8	544
Prov. Sulawesi Tenggara	17,1	292
Prov. Jawa Barat	17,0	1.609
Prov. Kalimantan Barat	16,4	434
Prov. Kalimantan Utara	13,6	59
Prov. Papua Barat	13,2	121
Prov. Sulawesi Selatan	13,2	592
Prov. Sumatera Selatan	11,8	593
Prov. Kalimantan Tengah	10,0	241
Prov. Sulawesi Utara	9,7	226
Prov. Gorontalo	9,7	62
Prov. Maluku	9,5	283
Prov. Sulawesi Tengah	8,8	215
Prov. Nusa Tenggara Barat	8,2	318
Prov. Maluku Utara	8,0	199
Prov. Aceh	5,4	520
Prov. Nusa Tenggara Timur	5,2	538
Prov. Sulawesi Barat	2,3	88
Prov. Papua	2,1	235

Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP Tiap Kab-Kota, Prov. Lampung

Total Satuan Pendidikan

Kota Metro	70,6	17
Kab. Pringsewu	40,9	22
Kota Bandar Lampung	36,9	65
Kab. Lampung Tengah	22,7	66
Kab. Pesawaran	20,0	20
Kab. Tulang Bawang	16,0	25
Kab. Lampung Timur	14,6	48
Kab. Lampung Selatan	14,3	56
Kab. Lampung Utara	12,5	48
Kab. Tanggamus	12,0	25
Kab. Tulang Bawang Barat	6,3	16
Kab. Lampung Barat	5,6	18
Kab. Way Kanan	5,1	39
Kab. Pesisir Barat	0,0	12
Kab. Mesuji	0,0	14

Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Total Satuan Pendidikan

Prov. D.I. Yogyakarta	68,5	165
Prov. Jawa Tengah	59,1	860
Prov. D.K.I. Jakarta	50,7	489
Prov. Bali	47,8	159
Prov. Sumatera Barat	43,8	324
Prov. Bangka Belitung	43,5	69
Prov. Kalimantan Selatan	41,8	189
Prov. Jawa Timur	38,2	1.541
Prov. Kepulauan Riau	31,4	137
Prov. Riau	26,3	445
Prov. Bengkulu	21,6	139
Prov. Lampung	19,6	491
Prov. Kalimantan Timur	19,3	218
Prov. Sumatera Utara	18,6	1.076
Prov. Jambi	18,2	225
Prov. Banten	17,8	544
Prov. Sulawesi Tenggara	17,1	292
Prov. Jawa Barat	17,0	1.609
Prov. Kalimantan Barat	16,4	434
Prov. Kalimantan Utara	13,6	59
Prov. Papua Barat	13,2	121
Prov. Sulawesi Selatan	13,2	592
Prov. Sumatera Selatan	11,8	593
Prov. Kalimantan Tengah	10,0	241
Prov. Sulawesi Utara	9,7	226
Prov. Gorontalo	9,7	62
Prov. Maluku	9,5	283
Prov. Sulawesi Tengah	8,8	215
Prov. Nusa Tenggara Barat	8,2	318
Prov. Maluku Utara	8,0	199
Prov. Aceh	5,4	520
Prov. Nusa Tenggara Timur	5,2	538
Prov. Sulawesi Barat	2,3	88
Prov. Papua	2,1	235

Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP Tiap Kab-Kota, Prov. Kalimantan Timur

Total Satuan Pendidikan

Kota Bontang	45,5	11
Kota Balikpapan	39,1	23
Kota Samarinda	31,6	38
Kab. Berau	21,1	19
Kab. Kutai Kartanegara	17,6	51
Kab. Paser	11,1	18
Kab. Kutai Timur	4,5	22
Kab. Penajam Paser Utara	0,0	8
Kab. Mahakam Ulu	0,0	6
Kab. Kutai Barat	0,0	22

Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Total Satuan Pendidikan

Prov. D.I. Yogyakarta	68,5	165
Prov. Jawa Tengah	59,1	860
Prov. D.K.I. Jakarta	50,7	489
Prov. Bali	47,8	159
Prov. Sumatera Barat	43,8	324
Prov. Bangka Belitung	43,5	69
Prov. Kalimantan Selatan	41,8	189
Prov. Jawa Timur	38,2	1.541
Prov. Kepulauan Riau	31,4	137
Prov. Riau	26,3	445
Prov. Bengkulu	21,6	139
Prov. Lampung	19,6	491
Prov. Kalimantan Timur	19,3	218
Prov. Sumatera Utara	18,6	1.076
Prov. Jambi	18,2	225
Prov. Banten	17,8	544
Prov. Sulawesi Tenggara	17,1	292
Prov. Jawa Barat	17,0	1.609
Prov. Kalimantan Barat	16,4	434
Prov. Kalimantan Utara	13,6	59
Prov. Papua Barat	13,2	121
Prov. Sulawesi Selatan	13,2	592
Prov. Sumatera Selatan	11,8	593
Prov. Kalimantan Tengah	10,0	241
Prov. Sulawesi Utara	9,7	226
Prov. Gorontalo	9,7	62
Prov. Maluku	9,5	283
Prov. Sulawesi Tengah	8,8	215
Prov. Nusa Tenggara Barat	8,2	318
Prov. Maluku Utara	8,0	199
Prov. Aceh	5,4	520
Prov. Nusa Tenggara Timur	5,2	538
Prov. Sulawesi Barat	2,3	88
Prov. Papua	2,1	235

Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP Tiap Kab-Kota, Prov. Sumatera Utara

Total Satuan Pendidikan

Kab. Karo	54,2	24
Kota Tebing Tinggi	40,0	15
Kota Pematangsiantar	40,0	30
Kab. Pakpak Bharat	40,0	5
Kab. Toba Samosir	33,3	15
Kota Medan	29,5	217
Kota Tanjung Balai	27,3	11
Kota Gunungsitoli	27,3	11
Kab. Samosir	26,7	15
Kota Sibolga	22,2	9
Kab. Padang Lawas	20,0	10
Kab. Labuhan Batu	20,0	30
Kab. Tapanuli Utara	19,2	26
Kab. Labuhan Batu Utara	17,6	17
Kota Padang Sidempuan	16,7	18
Kab. Dairi	16,7	24
Kab. Asahan	15,9	44
Kab. Deli Serdang	15,6	135
Kab. Langkat	14,7	68
Kota Binjai	14,3	28
Kab. Simalungun	14,0	50
Kab. Humbang Hasudutan	13,3	15
Kab. Labuhan Batu Selatan	11,8	17
Kab. Serdang Bedagai	9,8	41
Kab. Tapanuli Selatan	8,3	12
Kab. Mandailing Natal	8,3	24
Kab. Nias Utara	6,3	16
Kab. Nias Selatan	3,1	65
Kab. Tapanuli Tengah	0,0	23
Kab. Padang Lawas utara	0,0	11
Kab. Nias Barat	0,0	16
Kab. Nias	0,0	12
Kab. Batubara	0,0	22

Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Total Satuan Pendidikan

Prov. D.I. Yogyakarta	68,5	165
Prov. Jawa Tengah	59,1	860
Prov. D.K.I. Jakarta	50,7	489
Prov. Bali	47,8	159
Prov. Sumatera Barat	43,8	324
Prov. Bangka Belitung	43,5	69
Prov. Kalimantan Selatan	41,8	189
Prov. Jawa Timur	38,2	1.541
Prov. Kepulauan Riau	31,4	137
Prov. Riau	26,3	445
Prov. Bengkulu	21,6	139
Prov. Lampung	19,6	491
Prov. Kalimantan Timur	19,3	218
Prov. Sumatera Utara	18,6	1.076
Prov. Jambi	18,2	225
Prov. Banten	17,8	544
Prov. Sulawesi Tenggara	17,1	292
Prov. Jawa Barat	17,0	1.609
Prov. Kalimantan Barat	16,4	434
Prov. Kalimantan Utara	13,6	59
Prov. Papua Barat	13,2	121
Prov. Sulawesi Selatan	13,2	592
Prov. Sumatera Selatan	11,8	593
Prov. Kalimantan Tengah	10,0	241
Prov. Sulawesi Utara	9,7	226
Prov. Gorontalo	9,7	62
Prov. Maluku	9,5	283
Prov. Sulawesi Tengah	8,8	215
Prov. Nusa Tenggara Barat	8,2	318
Prov. Maluku Utara	8,0	199
Prov. Aceh	5,4	520
Prov. Nusa Tenggara Timur	5,2	538
Prov. Sulawesi Barat	2,3	88
Prov. Papua	2,1	235

Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP Tiap Kab-Kota, Prov. Jambi

Total Satuan Pendidikan

Kota Jambi	27.9	43
Kab. Merangin	26.1	23
Kab. Tanjung Jabung Timur	25.0	12
Kab. Tebo	20.0	20
Kab. Batang Hari	20.0	15
Kab. Tanjung Jabung Barat	15.4	26
Kota Sungai Penuh	14.3	7
Kab. Muaro Jambi	13.6	22
Kab. Bungo	13.6	22
Kab. Sarolangun	9.5	21
Kab. Kerinci	0.0	14

Titik merah merupakan sekolah SMA yang memenuhi SNP, dan sebarannya tidak merata di Prov. Jambi

PETA TUTUPAN SEBARAN SATUAN PENDIDIKAN SMA SNP DAN BELUM SNP

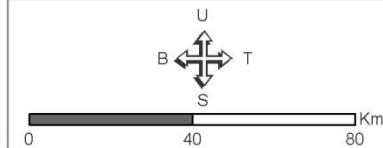
PROVINSI
JAMBI



INSET

Legenda

- SMA Negeri SNP
- SMA Negeri Belum SNP
- ▲ SMA Swasta SNP
- ▲ SMA Swasta Belum SNP
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Garis Pantai
- Alang - Alang / Tanah Kosong
- Sawah
- Hutan
- Perkebunan/Kebun
- Tegalan/Ladang
- Pemukiman / Bangunan
- Perairan
- Tambak
- Pasir Pantai



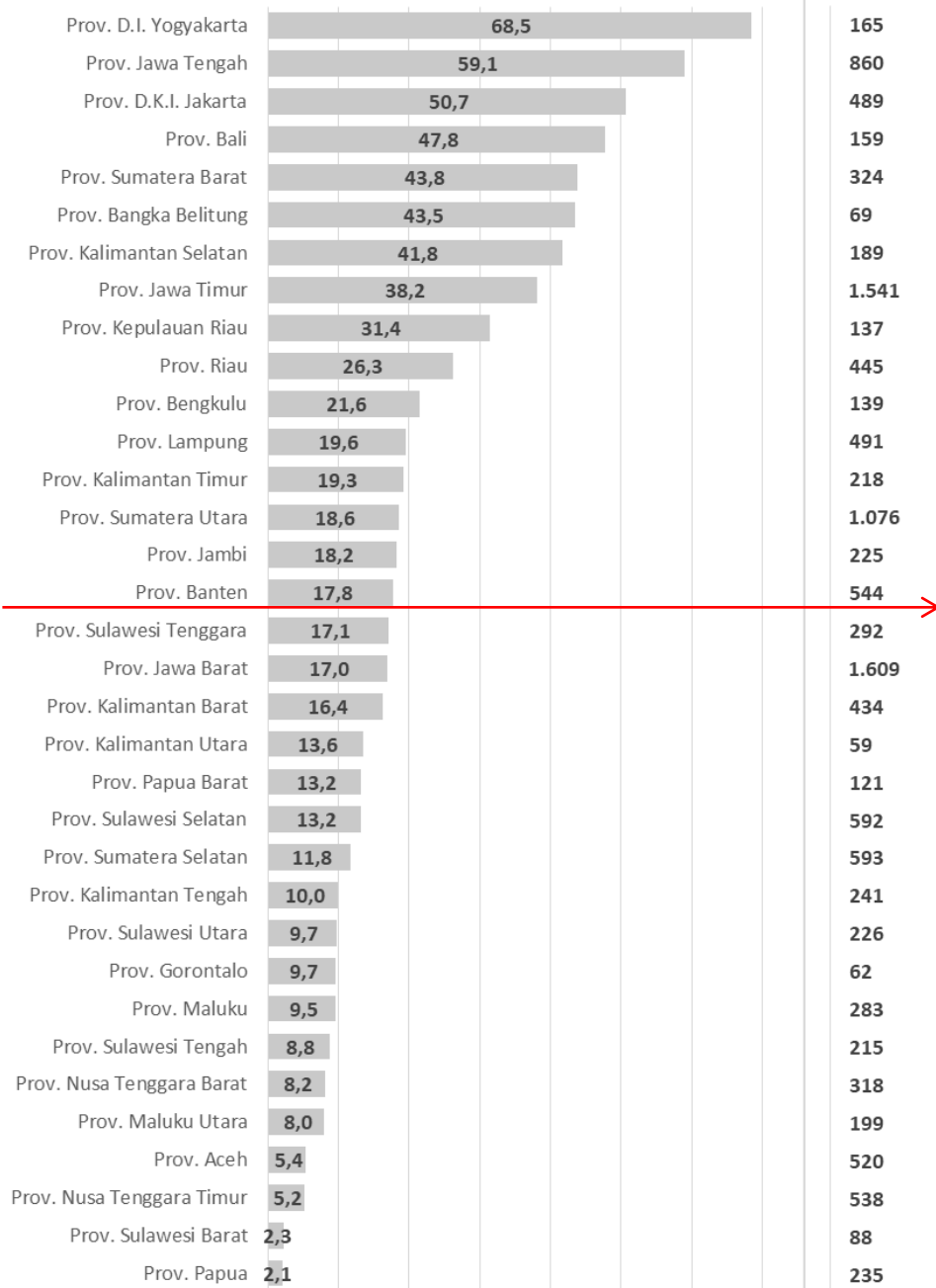
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sumber:

1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. Badan Informasi Geospasial, Tahun 2016-2019
3. Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), Tahun 2019
4. Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK)
- Validasi Kemendikbud
4. Pengolahan Data, Juni 2019

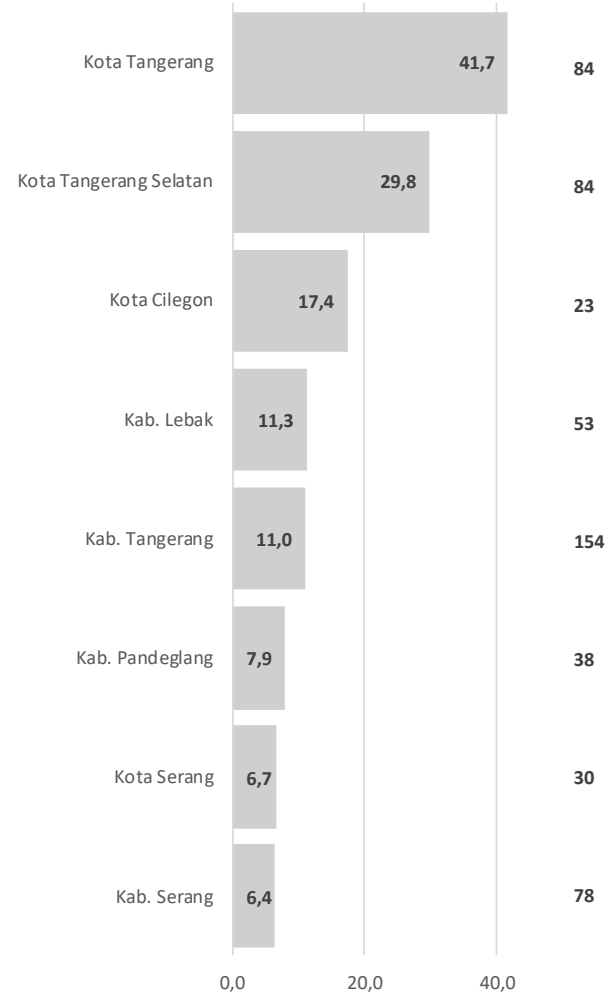
Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Total Satuan Pendidikan



Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP Tiap Kab-Kota, Prov. Banten

Total Satuan Pendidikan



Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Total Satuan Pendidikan

Prov. D.I. Yogyakarta	68,5	165
Prov. Jawa Tengah	59,1	860
Prov. D.K.I. Jakarta	50,7	489
Prov. Bali	47,8	159
Prov. Sumatera Barat	43,8	324
Prov. Bangka Belitung	43,5	69
Prov. Kalimantan Selatan	41,8	189
Prov. Jawa Timur	38,2	1.541
Prov. Kepulauan Riau	31,4	137
Prov. Riau	26,3	445
Prov. Bengkulu	21,6	139
Prov. Lampung	19,6	491
Prov. Kalimantan Timur	19,3	218
Prov. Sumatera Utara	18,6	1.076
Prov. Jambi	18,2	225
Prov. Banten	17,8	544
Prov. Sulawesi Tenggara	17,1	292
Prov. Jawa Barat	17,0	1.609
Prov. Kalimantan Barat	16,4	434
Prov. Kalimantan Utara	13,6	59
Prov. Papua Barat	13,2	121
Prov. Sulawesi Selatan	13,2	592
Prov. Sumatera Selatan	11,8	593
Prov. Kalimantan Tengah	10,0	241
Prov. Sulawesi Utara	9,7	226
Prov. Gorontalo	9,7	62
Prov. Maluku	9,5	283
Prov. Sulawesi Tengah	8,8	215
Prov. Nusa Tenggara Barat	8,2	318
Prov. Maluku Utara	8,0	199
Prov. Aceh	5,4	520
Prov. Nusa Tenggara Timur	5,2	538
Prov. Sulawesi Barat	2,3	88
Prov. Papua	2,1	235

Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP Tiap Kab-Kota, Prov. Sulawesi Tenggara

Total Satuan Pendidikan

Kab. Buton Tengah	38,9	18
Kab. Buton Selatan	28,6	14
Kab. Buton	28,6	21
Kab. Konawe Utara	27,3	11
Kab. Wakatobi	26,3	19
Kab. Kolaka	25,0	12
Kab. Muna	23,5	34
Kab. Konawe Kepulauan	20,0	5
Kab. Konawe Selatan	14,3	28
Kab. Kolaka Timur	14,3	14
Kab. Bombana	14,3	21
Kota Baubau	9,1	11
Kab. Buton Utara	9,1	11
Kota Kendari	3,8	26
Kab. Konawe	3,6	28
Kab. Muna Barat	0,0	11
Kab. Kolaka Utara	0,0	8

Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Total Satuan Pendidikan

Prov. D.I. Yogyakarta	68,5	165
Prov. Jawa Tengah	59,1	860
Prov. D.K.I. Jakarta	50,7	489
Prov. Bali	47,8	159
Prov. Sumatera Barat	43,8	324
Prov. Bangka Belitung	43,5	69
Prov. Kalimantan Selatan	41,8	189
Prov. Jawa Timur	38,2	1.541
Prov. Kepulauan Riau	31,4	137
Prov. Riau	26,3	445
Prov. Bengkulu	21,6	139
Prov. Lampung	19,6	491
Prov. Kalimantan Timur	19,3	218
Prov. Sumatera Utara	18,6	1.076
Prov. Jambi	18,2	225
Prov. Banten	17,8	544
Prov. Sulawesi Tenggara	17,1	292
Prov. Jawa Barat	17,0	1.609
Prov. Kalimantan Barat	16,4	434
Prov. Kalimantan Utara	13,6	59
Prov. Papua Barat	13,2	121
Prov. Sulawesi Selatan	13,2	592
Prov. Sumatera Selatan	11,8	593
Prov. Kalimantan Tengah	10,0	241
Prov. Sulawesi Utara	9,7	226
Prov. Gorontalo	9,7	62
Prov. Maluku	9,5	283
Prov. Sulawesi Tengah	8,8	215
Prov. Nusa Tenggara Barat	8,2	318
Prov. Maluku Utara	8,0	199
Prov. Aceh	5,4	520
Prov. Nusa Tenggara Timur	5,2	538
Prov. Sulawesi Barat	2,3	88
Prov. Papua	2,1	235

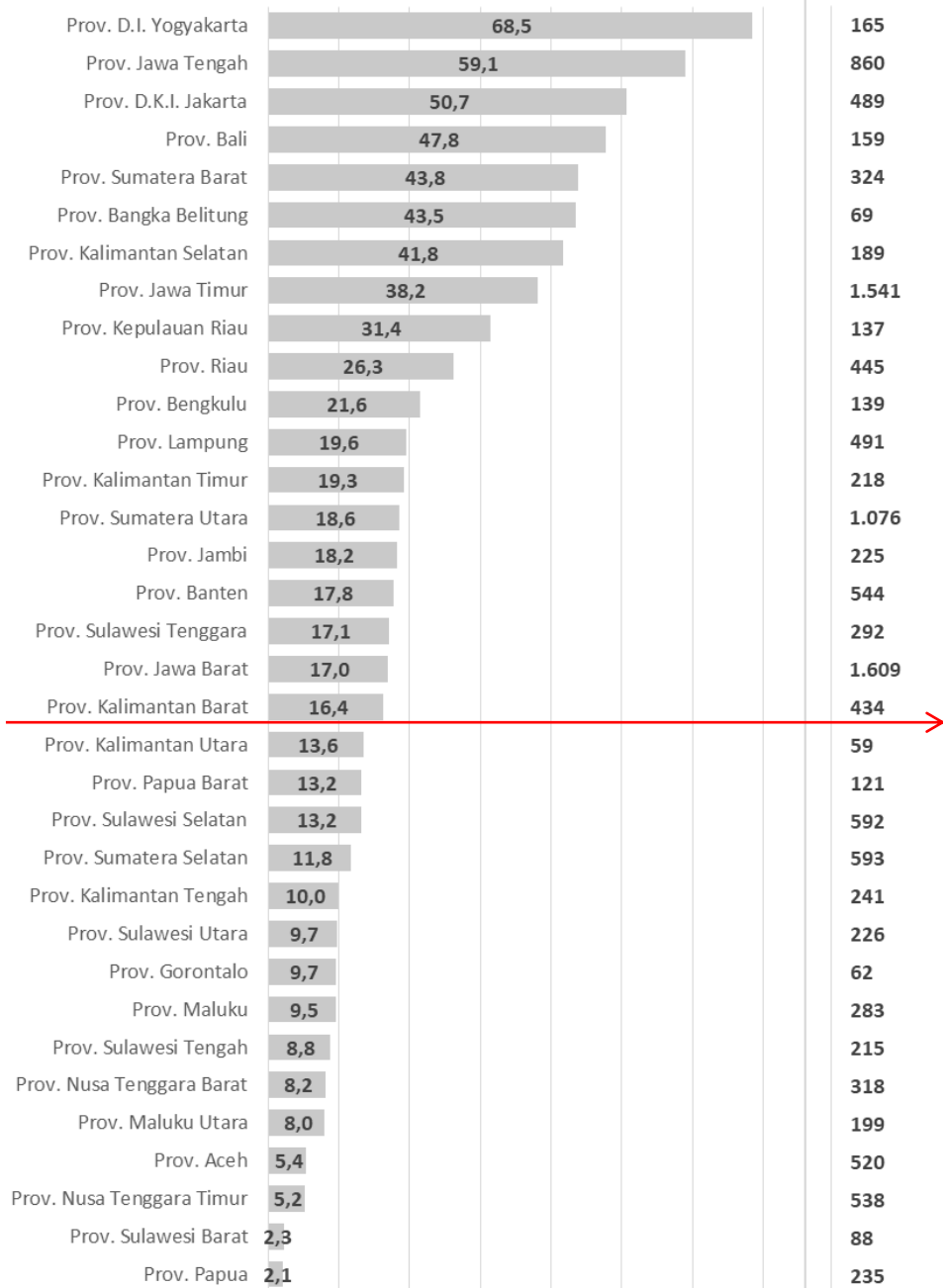
Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP Tiap Kab-Kota, Prov. Jawa Barat

Total Satuan Pendidikan

Kab. Majalengka	45,5	22
Kota Bandung	41,2	136
Kab. Kuningan	39,3	28
Kota Tasikmalaya	35,7	28
Kota Cirebon	32,0	25
Kab. Ciamis	30,8	26
Kab. Purwakarta	28,0	25
Kota Cimahi	25,0	16
Kota Bekasi	25,0	112
Kab. Sumedang	23,1	26
Kota Bogor	22,6	53
Kota Depok	22,2	63
Kota Banjar	20,0	5
Kab. Subang	17,0	47
Kab. Pangandaran	16,7	6
Kab. Tasikmalaya	14,9	67
Kab. Bandung	13,0	108
Kab. Cirebon	12,8	47
Kab. Indramayu	10,7	56
Kab. Bogor	10,7	178
Kab. Karawang	10,2	49
Kab. Bandung Barat	8,2	61
Kab. Cianjur	6,5	92
Kab. Bekasi	6,1	115
Kab. Garut	5,6	124
Kota Sukabumi	5,6	18
Kab. Sukabumi	3,9	76

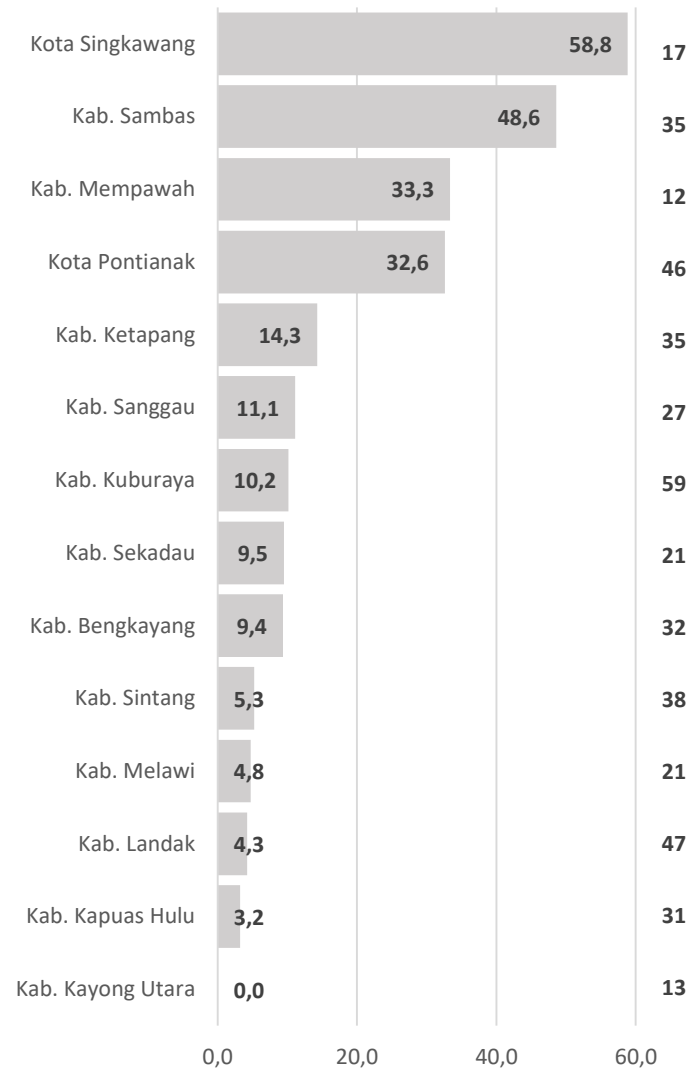
Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Total Satuan Pendidikan



Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP Tiap Kab-Kota, Prov. Kalimantan Barat

Total Satuan Pendidikan



Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Total Satuan Pendidikan

Prov. D.I. Yogyakarta	68,5	165
Prov. Jawa Tengah	59,1	860
Prov. D.K.I. Jakarta	50,7	489
Prov. Bali	47,8	159
Prov. Sumatera Barat	43,8	324
Prov. Bangka Belitung	43,5	69
Prov. Kalimantan Selatan	41,8	189
Prov. Jawa Timur	38,2	1.541
Prov. Kepulauan Riau	31,4	137
Prov. Riau	26,3	445
Prov. Bengkulu	21,6	139
Prov. Lampung	19,6	491
Prov. Kalimantan Timur	19,3	218
Prov. Sumatera Utara	18,6	1.076
Prov. Jambi	18,2	225
Prov. Banten	17,8	544
Prov. Sulawesi Tenggara	17,1	292
Prov. Jawa Barat	17,0	1.609
Prov. Kalimantan Barat	16,4	434
Prov. Kalimantan Utara	13,6	59
Prov. Papua Barat	13,2	121
Prov. Sulawesi Selatan	13,2	592
Prov. Sumatera Selatan	11,8	593
Prov. Kalimantan Tengah	10,0	241
Prov. Sulawesi Utara	9,7	226
Prov. Gorontalo	9,7	62
Prov. Maluku	9,5	283
Prov. Sulawesi Tengah	8,8	215
Prov. Nusa Tenggara Barat	8,2	318
Prov. Maluku Utara	8,0	199
Prov. Aceh	5,4	520
Prov. Nusa Tenggara Timur	5,2	538
Prov. Sulawesi Barat	2,3	88
Prov. Papua	2,1	235

Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP Tiap Kab-Kota, Prov. Kalimantan Utara

Total Satuan Pendidikan

Kota Tarakan	44,4	9
Kab. Bulungan	28,6	14
Kab. Tana Tidung	0,0	3
Kab. Nunukan	0,0	14
Kab. Malinau	0,0	19

Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Total Satuan Pendidikan

Prov. D.I. Yogyakarta	68,5	165
Prov. Jawa Tengah	59,1	860
Prov. D.K.I. Jakarta	50,7	489
Prov. Bali	47,8	159
Prov. Sumatera Barat	43,8	324
Prov. Bangka Belitung	43,5	69
Prov. Kalimantan Selatan	41,8	189
Prov. Jawa Timur	38,2	1.541
Prov. Kepulauan Riau	31,4	137
Prov. Riau	26,3	445
Prov. Bengkulu	21,6	139
Prov. Lampung	19,6	491
Prov. Kalimantan Timur	19,3	218
Prov. Sumatera Utara	18,6	1.076
Prov. Jambi	18,2	225
Prov. Banten	17,8	544
Prov. Sulawesi Tenggara	17,1	292
Prov. Jawa Barat	17,0	1.609
Prov. Kalimantan Barat	16,4	434
Prov. Kalimantan Utara	13,6	59
Prov. Papua Barat	13,2	121
Prov. Sulawesi Selatan	13,2	592
Prov. Sumatera Selatan	11,8	593
Prov. Kalimantan Tengah	10,0	241
Prov. Sulawesi Utara	9,7	226
Prov. Gorontalo	9,7	62
Prov. Maluku	9,5	283
Prov. Sulawesi Tengah	8,8	215
Prov. Nusa Tenggara Barat	8,2	318
Prov. Maluku Utara	8,0	199
Prov. Aceh	5,4	520
Prov. Nusa Tenggara Timur	5,2	538
Prov. Sulawesi Barat	2,3	88
Prov. Papua	2,1	235

Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP Tiap Kab-Kota, Prov. Papua Barat

Total Satuan Pendidikan

Kab. Teluk Bintuni	33,3	15
Kab. Raja Ampat	20,0	15
Kab. Manokwari Selatan	20,0	5
Kab. Fak-Fak	16,7	6
Kab. Sorong	15,8	19
Kota Sorong	10,0	20
Kab. Manokwari	6,7	15
Kab. Teluk Wondama	0,0	3
Kab. Tambrauw	0,0	5
Kab. Sorong Selatan	0,0	4
Kab. Pegunungan Arfak	0,0	7
Kab. Maybrat	0,0	3
Kab. Kaimana	0,0	4

Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Total Satuan Pendidikan

Prov. D.I. Yogyakarta	68,5	165
Prov. Jawa Tengah	59,1	860
Prov. D.K.I. Jakarta	50,7	489
Prov. Bali	47,8	159
Prov. Sumatera Barat	43,8	324
Prov. Bangka Belitung	43,5	69
Prov. Kalimantan Selatan	41,8	189
Prov. Jawa Timur	38,2	1.541
Prov. Kepulauan Riau	31,4	137
Prov. Riau	26,3	445
Prov. Bengkulu	21,6	139
Prov. Lampung	19,6	491
Prov. Kalimantan Timur	19,3	218
Prov. Sumatera Utara	18,6	1.076
Prov. Jambi	18,2	225
Prov. Banten	17,8	544
Prov. Sulawesi Tenggara	17,1	292
Prov. Jawa Barat	17,0	1.609
Prov. Kalimantan Barat	16,4	434
Prov. Kalimantan Utara	13,6	59
Prov. Papua Barat	13,2	121
Prov. Sulawesi Selatan	13,2	592
Prov. Sumatera Selatan	11,8	593
Prov. Kalimantan Tengah	10,0	241
Prov. Sulawesi Utara	9,7	226
Prov. Gorontalo	9,7	62
Prov. Maluku	9,5	283
Prov. Sulawesi Tengah	8,8	215
Prov. Nusa Tenggara Barat	8,2	318
Prov. Maluku Utara	8,0	199
Prov. Aceh	5,4	520
Prov. Nusa Tenggara Timur	5,2	538
Prov. Sulawesi Barat	2,3	88
Prov. Papua	2,1	235

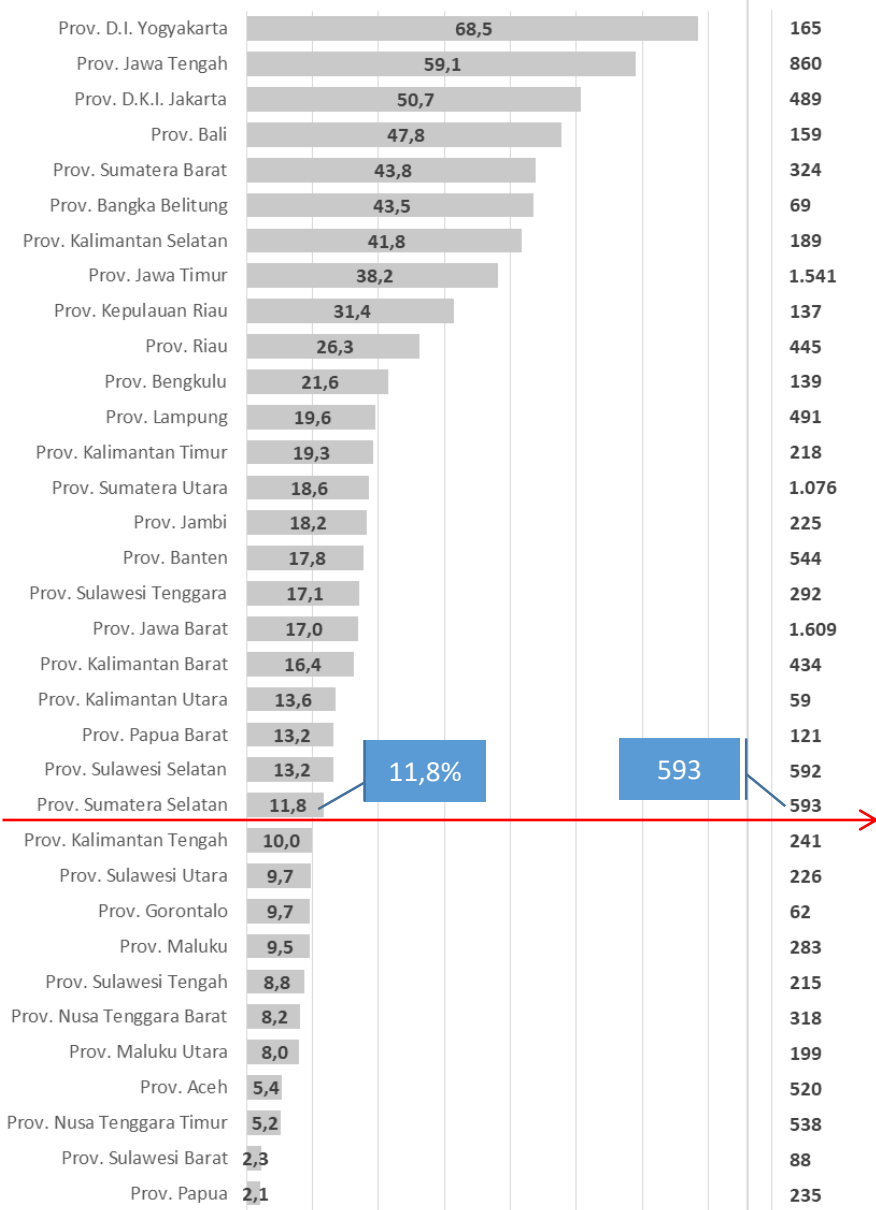
Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP Tiap Kab-Kota, Prov. Sulawesi Selatan

Total Satuan Pendidikan

Kab. Wajo	38,9	18
Kab. Soppeng	38,5	13
Kab. Bone	27,0	37
Kota Palopo	25,0	12
Kab. Toraja Utara	25,0	16
Kab. Enrekang	23,5	17
Kota Parepare	22,2	9
Kab. Sidenreng Rappang	17,6	17
Kab. Tana Toraja	16,7	18
Kab. Luwu Timur	15,8	19
Kab. Pangkajene Kepulauan	14,7	34
Kab. Pinrang	13,3	15
Kab. Maros	12,9	31
Kab. Barru	11,1	9
Kota Makassar	9,2	131
Kab. Kepulauan Selayar	9,1	11
Kab. Bulukumba	9,1	22
Kab. Jeneponto	8,7	23
Kab. Sinjai	6,3	16
Kab. Luwu Utara	5,3	19
Kab. Takalar	4,3	23
Kab. Luwu	4,0	25
Kab. Gowa	2,1	47
Kab. Bantaeng	0,0	8

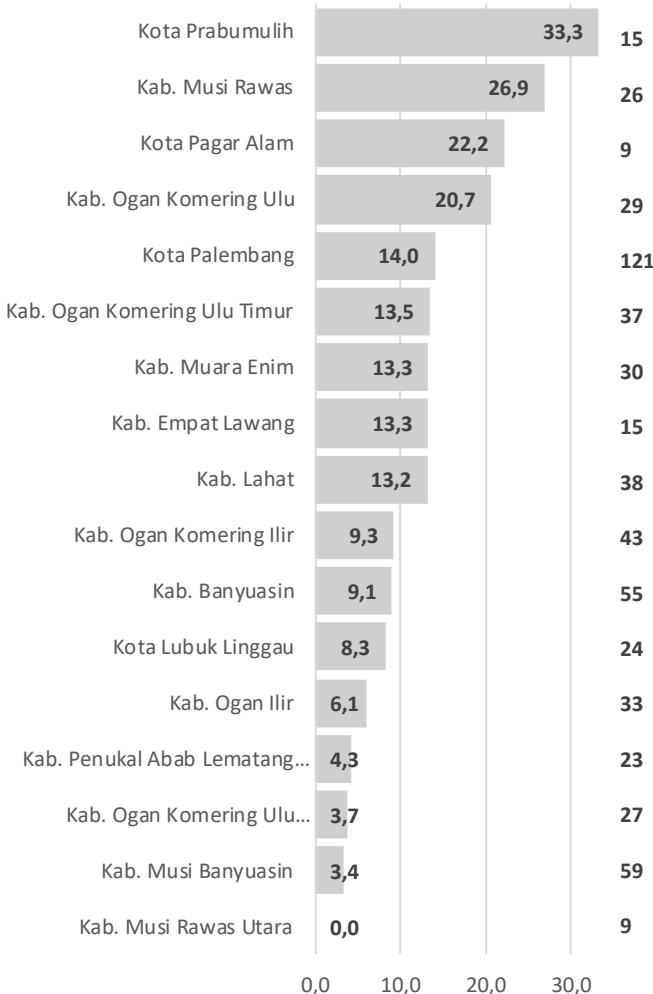
Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Total Satuan
Pendidikan

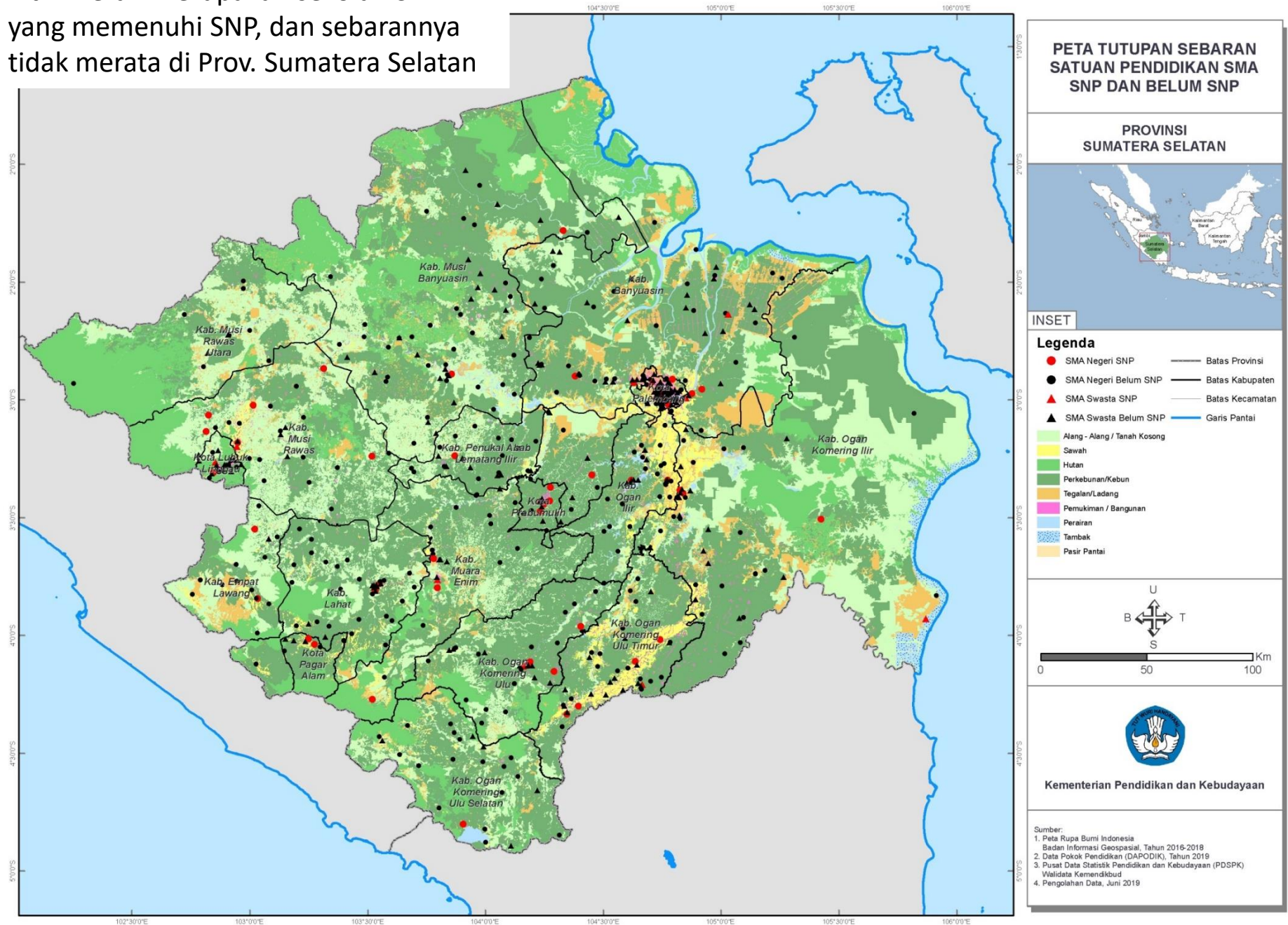


Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP
Tiap Kab-Kota,
Prov. Sumatera Selatan

Total Satuan
Pendidikan



Titik merah merupakan sekolah SMA yang memenuhi SNP, dan sebarannya tidak merata di Prov. Sumatera Selatan



Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Total Satuan Pendidikan

Prov. D.I. Yogyakarta	68,5	165
Prov. Jawa Tengah	59,1	860
Prov. D.K.I. Jakarta	50,7	489
Prov. Bali	47,8	159
Prov. Sumatera Barat	43,8	324
Prov. Bangka Belitung	43,5	69
Prov. Kalimantan Selatan	41,8	189
Prov. Jawa Timur	38,2	1.541
Prov. Kepulauan Riau	31,4	137
Prov. Riau	26,3	445
Prov. Bengkulu	21,6	139
Prov. Lampung	19,6	491
Prov. Kalimantan Timur	19,3	218
Prov. Sumatera Utara	18,6	1.076
Prov. Jambi	18,2	225
Prov. Banten	17,8	544
Prov. Sulawesi Tenggara	17,1	292
Prov. Jawa Barat	17,0	1.609
Prov. Kalimantan Barat	16,4	434
Prov. Kalimantan Utara	13,6	59
Prov. Papua Barat	13,2	121
Prov. Sulawesi Selatan	13,2	592
Prov. Sumatera Selatan	11,8	593
Prov. Kalimantan Tengah	10,0	241
Prov. Sulawesi Utara	9,7	226
Prov. Gorontalo	9,7	62
Prov. Maluku	9,5	283
Prov. Sulawesi Tengah	8,8	215
Prov. Nusa Tenggara Barat	8,2	318
Prov. Maluku Utara	8,0	199
Prov. Aceh	5,4	520
Prov. Nusa Tenggara Timur	5,2	538
Prov. Sulawesi Barat	2,3	88
Prov. Papua	2,1	235

Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP Tiap Kab-Kota, Prov. Kalimantan Tengah

Total Satuan Pendidikan

Kab. Kotawaringin Barat	30,8	13
Kab. Kapuas	23,8	21
Kab. Seruyan	23,1	13
Kab. Sukamara	20,0	5
Kab. Kotawaringin Timur	18,2	22
Kota Palangka Raya	14,8	27
Kab. Pulang Pisau	10,5	19
Kab. Barito Utara	6,7	15
Kab. Murung Raya	0,0	24
Kab. Lamandau	0,0	11
Kab. Katingan	0,0	22
Kab. Gunung Mas	0,0	14
Kab. Barito Timur	0,0	11
Kab. Barito Selatan	0,0	24

Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Total Satuan Pendidikan

Prov. D.I. Yogyakarta	68,5	165
Prov. Jawa Tengah	59,1	860
Prov. D.K.I. Jakarta	50,7	489
Prov. Bali	47,8	159
Prov. Sumatera Barat	43,8	324
Prov. Bangka Belitung	43,5	69
Prov. Kalimantan Selatan	41,8	189
Prov. Jawa Timur	38,2	1.541
Prov. Kepulauan Riau	31,4	137
Prov. Riau	26,3	445
Prov. Bengkulu	21,6	139
Prov. Lampung	19,6	491
Prov. Kalimantan Timur	19,3	218
Prov. Sumatera Utara	18,6	1.076
Prov. Jambi	18,2	225
Prov. Banten	17,8	544
Prov. Sulawesi Tenggara	17,1	292
Prov. Jawa Barat	17,0	1.609
Prov. Kalimantan Barat	16,4	434
Prov. Kalimantan Utara	13,6	59
Prov. Papua Barat	13,2	121
Prov. Sulawesi Selatan	13,2	592
Prov. Sumatera Selatan	11,8	593
Prov. Kalimantan Tengah	10,0	241
Prov. Sulawesi Utara	9,7	226
Prov. Gorontalo	9,7	62
Prov. Maluku	9,5	283
Prov. Sulawesi Tengah	8,8	215
Prov. Nusa Tenggara Barat	8,2	318
Prov. Maluku Utara	8,0	199
Prov. Aceh	5,4	520
Prov. Nusa Tenggara Timur	5,2	538
Prov. Sulawesi Barat	2,3	88
Prov. Papua	2,1	235

Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP Tiap Kab-Kota, Prov. Sulawesi Utara

Total Satuan Pendidikan

Kota Tomohon	70,0	10
Kab. Minahasa Utara	15,0	20
Kota Kotamobagu	14,3	7
Kab. Kep. Sangihe	11,1	18
Kota Manado	8,5	47
Kota Bitung	8,3	12
Kab. Bolaang Mongondow	7,1	14
Kab. Minahasa Selatan	5,3	19
Kab. Kepulauan Talaud	5,0	20
Kab. Minahasa	3,2	31
Kab. Minahasa Tenggara	0,0	12
Kab. Kepulauan Sitaro	0,0	5
Kab. Bolaang Mongondow Utara	0,0	4
Kab. Bolaang Mongondow Timur	0,0	4
Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0,0	3

Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Total Satuan Pendidikan

Prov. D.I. Yogyakarta	68,5	165
Prov. Jawa Tengah	59,1	860
Prov. D.K.I. Jakarta	50,7	489
Prov. Bali	47,8	159
Prov. Sumatera Barat	43,8	324
Prov. Bangka Belitung	43,5	69
Prov. Kalimantan Selatan	41,8	189
Prov. Jawa Timur	38,2	1.541
Prov. Kepulauan Riau	31,4	137
Prov. Riau	26,3	445
Prov. Bengkulu	21,6	139
Prov. Lampung	19,6	491
Prov. Kalimantan Timur	19,3	218
Prov. Sumatera Utara	18,6	1.076
Prov. Jambi	18,2	225
Prov. Banten	17,8	544
Prov. Sulawesi Tenggara	17,1	292
Prov. Jawa Barat	17,0	1.609
Prov. Kalimantan Barat	16,4	434
Prov. Kalimantan Utara	13,6	59
Prov. Papua Barat	13,2	121
Prov. Sulawesi Selatan	13,2	592
Prov. Sumatera Selatan	11,8	593
Prov. Kalimantan Tengah	10,0	241
Prov. Sulawesi Utara	9,7	226
Prov. Gorontalo	9,7	62
Prov. Maluku	9,5	283
Prov. Sulawesi Tengah	8,8	215
Prov. Nusa Tenggara Barat	8,2	318
Prov. Maluku Utara	8,0	199
Prov. Aceh	5,4	520
Prov. Nusa Tenggara Timur	5,2	538
Prov. Sulawesi Barat	2,3	88
Prov. Papua	2,1	235

Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP Tiap Kab-Kota, Prov. Gorontalo

Total Satuan Pendidikan

Kota Gorontalo	25,0	8
Kab. Bone Bolango	11,1	9
Kab. Boalemo	11,1	9
Kab. Gorontalo Utara	9,1	11
Kab. Gorontalo	5,6	18
Kab. Pohuwato	0,0	7

Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Total Satuan Pendidikan

Prov. D.I. Yogyakarta	68,5	165
Prov. Jawa Tengah	59,1	860
Prov. D.K.I. Jakarta	50,7	489
Prov. Bali	47,8	159
Prov. Sumatera Barat	43,8	324
Prov. Bangka Belitung	43,5	69
Prov. Kalimantan Selatan	41,8	189
Prov. Jawa Timur	38,2	1.541
Prov. Kepulauan Riau	31,4	137
Prov. Riau	26,3	445
Prov. Bengkulu	21,6	139
Prov. Lampung	19,6	491
Prov. Kalimantan Timur	19,3	218
Prov. Sumatera Utara	18,6	1.076
Prov. Jambi	18,2	225
Prov. Banten	17,8	544
Prov. Sulawesi Tenggara	17,1	292
Prov. Jawa Barat	17,0	1.609
Prov. Kalimantan Barat	16,4	434
Prov. Kalimantan Utara	13,6	59
Prov. Papua Barat	13,2	121
Prov. Sulawesi Selatan	13,2	592
Prov. Sumatera Selatan	11,8	593
Prov. Kalimantan Tengah	10,0	241
Prov. Sulawesi Utara	9,7	226
Prov. Gorontalo	9,7	62
Prov. Maluku	9,5	283
Prov. Sulawesi Tengah	8,8	215
Prov. Nusa Tenggara Barat	8,2	318
Prov. Maluku Utara	8,0	199
Prov. Aceh	5,4	520
Prov. Nusa Tenggara Timur	5,2	538
Prov. Sulawesi Barat	2,3	88
Prov. Papua	2,1	235

Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP Tiap Kab-Kota, Prov. Maluku

Total Satuan Pendidikan

Kab. Buru	28,6	14
Kota Ambon	26,5	34
Kab. Maluku Tengah	10,1	79
Kab. Seram Bagian Timur	9,1	22
Kab. Maluku Tenggara	5,9	17
Kab. Seram Bagian Barat	5,3	38
Kab. Maluku Barat Daya	4,8	21
Kota Tual	0,0	11
Kab. Maluku Tenggara Barat	0,0	21
Kab. Kepulauan Aru	0,0	11
Kab. Buru Selatan	0,0	15

Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Total Satuan Pendidikan

Prov. D.I. Yogyakarta	68,5	165
Prov. Jawa Tengah	59,1	860
Prov. D.K.I. Jakarta	50,7	489
Prov. Bali	47,8	159
Prov. Sumatera Barat	43,8	324
Prov. Bangka Belitung	43,5	69
Prov. Kalimantan Selatan	41,8	189
Prov. Jawa Timur	38,2	1.541
Prov. Kepulauan Riau	31,4	137
Prov. Riau	26,3	445
Prov. Bengkulu	21,6	139
Prov. Lampung	19,6	491
Prov. Kalimantan Timur	19,3	218
Prov. Sumatera Utara	18,6	1.076
Prov. Jambi	18,2	225
Prov. Banten	17,8	544
Prov. Sulawesi Tenggara	17,1	292
Prov. Jawa Barat	17,0	1.609
Prov. Kalimantan Barat	16,4	434
Prov. Kalimantan Utara	13,6	59
Prov. Papua Barat	13,2	121
Prov. Sulawesi Selatan	13,2	592
Prov. Sumatera Selatan	11,8	593
Prov. Kalimantan Tengah	10,0	241
Prov. Sulawesi Utara	9,7	226
Prov. Gorontalo	9,7	62
Prov. Maluku	9,5	283
Prov. Sulawesi Tengah	8,8	215
Prov. Nusa Tenggara Barat	8,2	318
Prov. Maluku Utara	8,0	199
Prov. Aceh	5,4	520
Prov. Nusa Tenggara Timur	5,2	538
Prov. Sulawesi Barat	2,3	88
Prov. Papua	2,1	235

Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP Tiap Kab-Kota, Prov. Sulawesi Tengah

Total Satuan Pendidikan

Kab. Poso	21,1	19
Kab. Morowali	20,0	10
Kab. Banggai	12,9	31
Kab. Banggai Kepulauan	12,5	16
Kota Palu	11,5	26
Kab. Morowali Utara	10,0	10
Kab. Parigi Moutong	8,7	23
Kab. Tolitoli	7,1	14
Kab. Tojo Una-Una	0,0	12
Kab. Sigi	0,0	19
Kab. Donggala	0,0	19
Kab. Buol	0,0	10
Kab. Banggai Laut	0,0	6

Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Total Satuan Pendidikan

Prov. D.I. Yogyakarta	68,5	165
Prov. Jawa Tengah	59,1	860
Prov. D.K.I. Jakarta	50,7	489
Prov. Bali	47,8	159
Prov. Sumatera Barat	43,8	324
Prov. Bangka Belitung	43,5	69
Prov. Kalimantan Selatan	41,8	189
Prov. Jawa Timur	38,2	1.541
Prov. Kepulauan Riau	31,4	137
Prov. Riau	26,3	445
Prov. Bengkulu	21,6	139
Prov. Lampung	19,6	491
Prov. Kalimantan Timur	19,3	218
Prov. Sumatera Utara	18,6	1.076
Prov. Jambi	18,2	225
Prov. Banten	17,8	544
Prov. Sulawesi Tenggara	17,1	292
Prov. Jawa Barat	17,0	1.609
Prov. Kalimantan Barat	16,4	434
Prov. Kalimantan Utara	13,6	59
Prov. Papua Barat	13,2	121
Prov. Sulawesi Selatan	13,2	592
Prov. Sumatera Selatan	11,8	593
Prov. Kalimantan Tengah	10,0	241
Prov. Sulawesi Utara	9,7	226
Prov. Gorontalo	9,7	62
Prov. Maluku	9,5	283
Prov. Sulawesi Tengah	8,8	215
Prov. Nusa Tenggara Barat	8,2	318
Prov. Maluku Utara	8,0	199
Prov. Aceh	5,4	520
Prov. Nusa Tenggara Timur	5,2	538
Prov. Sulawesi Barat	2,3	88
Prov. Papua	2,1	235

Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP Tiap Kab-Kota, Prov. NTB

Total Satuan Pendidikan

Kab. Sumbawa Barat	30,0	10
Kota Mataram	24,0	25
Kab. Sumbawa	19,2	26
Kab. Lombok Timur	10,0	60
Kab. Lombok Utara	7,7	13
Kota Bima	5,9	17
Kab. Lombok Tengah	3,7	54
Kab. Dompu	3,7	27
Kab. Bima	1,8	57
Kab. Lombok Barat	-	1
Kab. Lombok Barat	-	28

Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Total Satuan Pendidikan

Prov. D.I. Yogyakarta	68,5	165
Prov. Jawa Tengah	59,1	860
Prov. D.K.I. Jakarta	50,7	489
Prov. Bali	47,8	159
Prov. Sumatera Barat	43,8	324
Prov. Bangka Belitung	43,5	69
Prov. Kalimantan Selatan	41,8	189
Prov. Jawa Timur	38,2	1.541
Prov. Kepulauan Riau	31,4	137
Prov. Riau	26,3	445
Prov. Bengkulu	21,6	139
Prov. Lampung	19,6	491
Prov. Kalimantan Timur	19,3	218
Prov. Sumatera Utara	18,6	1.076
Prov. Jambi	18,2	225
Prov. Banten	17,8	544
Prov. Sulawesi Tenggara	17,1	292
Prov. Jawa Barat	17,0	1.609
Prov. Kalimantan Barat	16,4	434
Prov. Kalimantan Utara	13,6	59
Prov. Papua Barat	13,2	121
Prov. Sulawesi Selatan	13,2	592
Prov. Sumatera Selatan	11,8	593
Prov. Kalimantan Tengah	10,0	241
Prov. Sulawesi Utara	9,7	226
Prov. Gorontalo	9,7	62
Prov. Maluku	9,5	283
Prov. Sulawesi Tengah	8,8	215
Prov. Nusa Tenggara Barat	8,2	318
Prov. Maluku Utara	8,0	199
Prov. Aceh	5,4	520
Prov. Nusa Tenggara Timur	5,2	538
Prov. Sulawesi Barat	2,3	88
Prov. Papua	2,1	235

Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP Tiap Kab-Kota, Prov. Maluku Utara

Total Satuan Pendidikan

Kab. Kepulauan Sula	20,0	15
Kota Tidore Kepulauan	17,4	23
Kab. Kepulauan Morotai	15,4	13
Kab. Halmahera Barat	11,1	18
Kota Ternate	10,5	19
Kab. Halmahera Tengah	9,1	11
Kab. halmahera Utara	4,8	21
Kab. Halmahera Selatan	1,9	53
Kab. Pulau Taliabu	0,0	11
Kab. Halmahera Timur	0,0	15

Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Total Satuan Pendidikan

Prov. D.I. Yogyakarta	68,5	165
Prov. Jawa Tengah	59,1	860
Prov. D.K.I. Jakarta	50,7	489
Prov. Bali	47,8	159
Prov. Sumatera Barat	43,8	324
Prov. Bangka Belitung	43,5	69
Prov. Kalimantan Selatan	41,8	189
Prov. Jawa Timur	38,2	1.541
Prov. Kepulauan Riau	31,4	137
Prov. Riau	26,3	445
Prov. Bengkulu	21,6	139
Prov. Lampung	19,6	491
Prov. Kalimantan Timur	19,3	218
Prov. Sumatera Utara	18,6	1.076
Prov. Jambi	18,2	225
Prov. Banten	17,8	544
Prov. Sulawesi Tenggara	17,1	292
Prov. Jawa Barat	17,0	1.609
Prov. Kalimantan Barat	16,4	434
Prov. Kalimantan Utara	13,6	59
Prov. Papua Barat	13,2	121
Prov. Sulawesi Selatan	13,2	592
Prov. Sumatera Selatan	11,8	593
Prov. Kalimantan Tengah	10,0	241
Prov. Sulawesi Utara	9,7	226
Prov. Gorontalo	9,7	62
Prov. Maluku	9,5	283
Prov. Sulawesi Tengah	8,8	215
Prov. Nusa Tenggara Barat	8,2	318
Prov. Maluku Utara	8,0	199
Prov. Aceh	5,4	520
Prov. Nusa Tenggara Timur	5,2	538
Prov. Sulawesi Barat	2,3	88
Prov. Papua	2,1	235

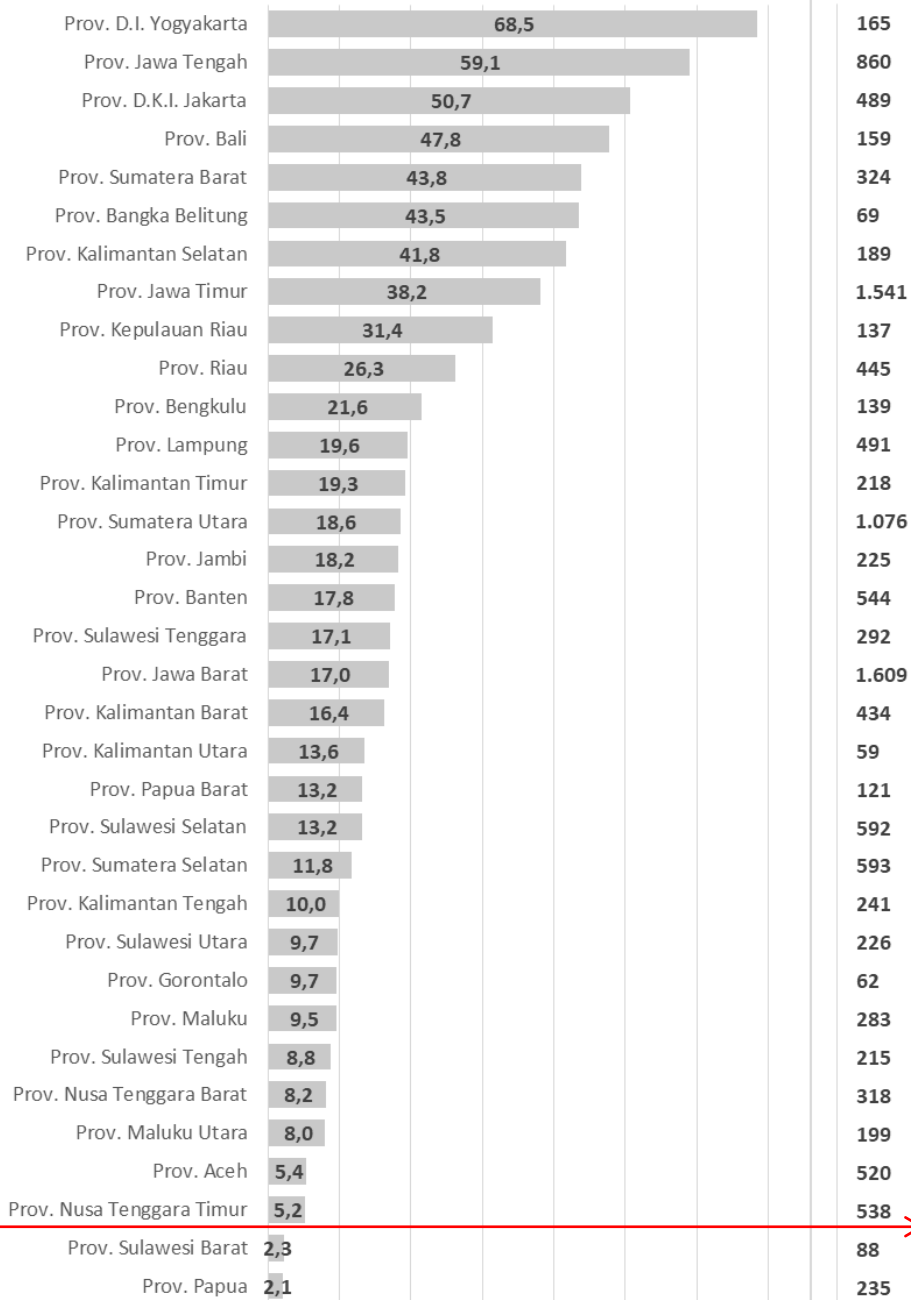
Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP Tiap Kab-Kota, Prov. Aceh

Total Satuan Pendidikan

Kota Lhokseumawe	25,0	12
Kab. Aceh Tengah	20,0	20
Kab. Aceh Selatan	15,2	33
Kab. Aceh Tamiang	11,1	27
Kota Banda Aceh	10,0	30
Kab. Pidie Jaya	7,1	14
Kab. Aceh Jaya	7,1	14
Kab. Aceh Barat Daya	6,7	15
Kab. Aceh Besar	4,8	42
Kab. Aceh Utara	3,7	54
Kab. Aceh Tenggara	3,7	27
Kab. Aceh Timur	3,3	30
Kab. Bireuen	2,9	35
Kota Subulussalam	0,0	12
Kota Sabang	0,0	3
Kota Langsa	0,0	9
Kab. Simeulue	0,0	25
Kab. Pidie	0,0	28
Kab. Nagan Raya	0,0	18
Kab. Gayo Lues	0,0	15
Kab. Bener Meriah	0,0	23
Kab. Aceh Singkil	0,0	13
Kab. Aceh Barat	0,0	21

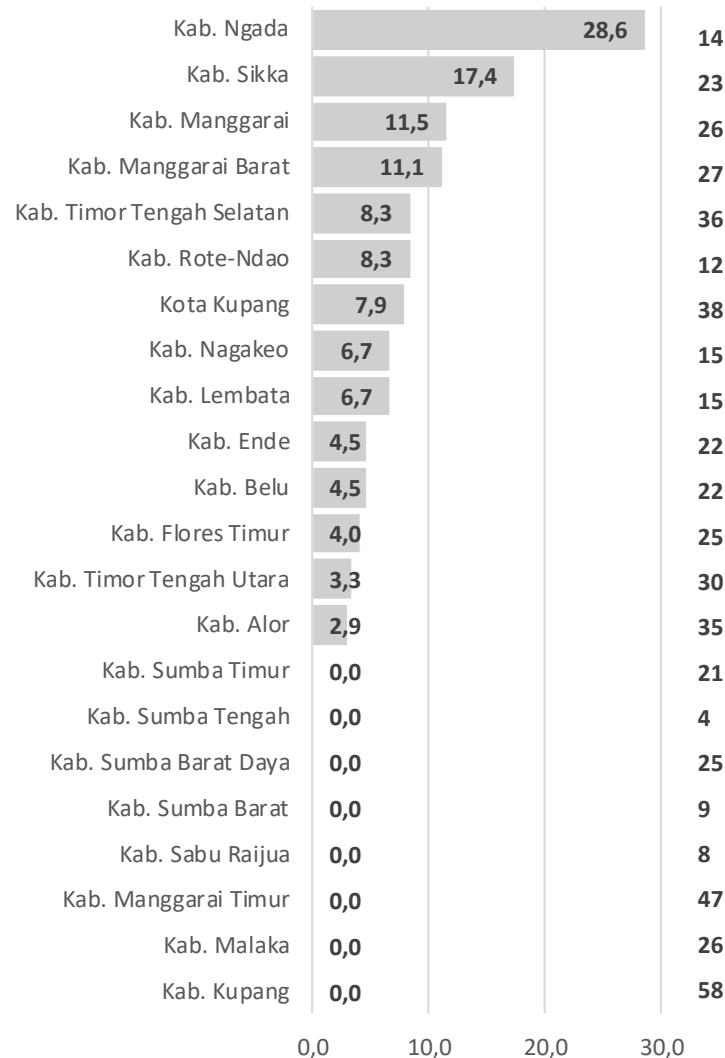
Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Total Satuan Pendidikan



Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP Tiap Kab-Kota, Prov. Nusa Tenggara Timur

Total Satuan Pendidikan



Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Total Satuan Pendidikan

Prov. D.I. Yogyakarta	68,5	165
Prov. Jawa Tengah	59,1	860
Prov. D.K.I. Jakarta	50,7	489
Prov. Bali	47,8	159
Prov. Sumatera Barat	43,8	324
Prov. Bangka Belitung	43,5	69
Prov. Kalimantan Selatan	41,8	189
Prov. Jawa Timur	38,2	1.541
Prov. Kepulauan Riau	31,4	137
Prov. Riau	26,3	445
Prov. Bengkulu	21,6	139
Prov. Lampung	19,6	491
Prov. Kalimantan Timur	19,3	218
Prov. Sumatera Utara	18,6	1.076
Prov. Jambi	18,2	225
Prov. Banten	17,8	544
Prov. Sulawesi Tenggara	17,1	292
Prov. Jawa Barat	17,0	1.609
Prov. Kalimantan Barat	16,4	434
Prov. Kalimantan Utara	13,6	59
Prov. Papua Barat	13,2	121
Prov. Sulawesi Selatan	13,2	592
Prov. Sumatera Selatan	11,8	593
Prov. Kalimantan Tengah	10,0	241
Prov. Sulawesi Utara	9,7	226
Prov. Gorontalo	9,7	62
Prov. Maluku	9,5	283
Prov. Sulawesi Tengah	8,8	215
Prov. Nusa Tenggara Barat	8,2	318
Prov. Maluku Utara	8,0	199
Prov. Aceh	5,4	520
Prov. Nusa Tenggara Timur	5,2	538
Prov. Sulawesi Barat	2,3	88
Prov. Papua	2,1	235

Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP Tiap Kab-Kota, Prov. Sulawesi Barat

Total Satuan Pendidikan

Kab. Mamasa	4,8	21
Kab. Mamuju	4,5	22
Kab. Polewali Mandar	0,0	16
Kab. Mamuju Utara	0,0	12
Kab. Mamuju Tengah	0,0	10
Kab. Majene	0,0	7

Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Total Satuan Pendidikan

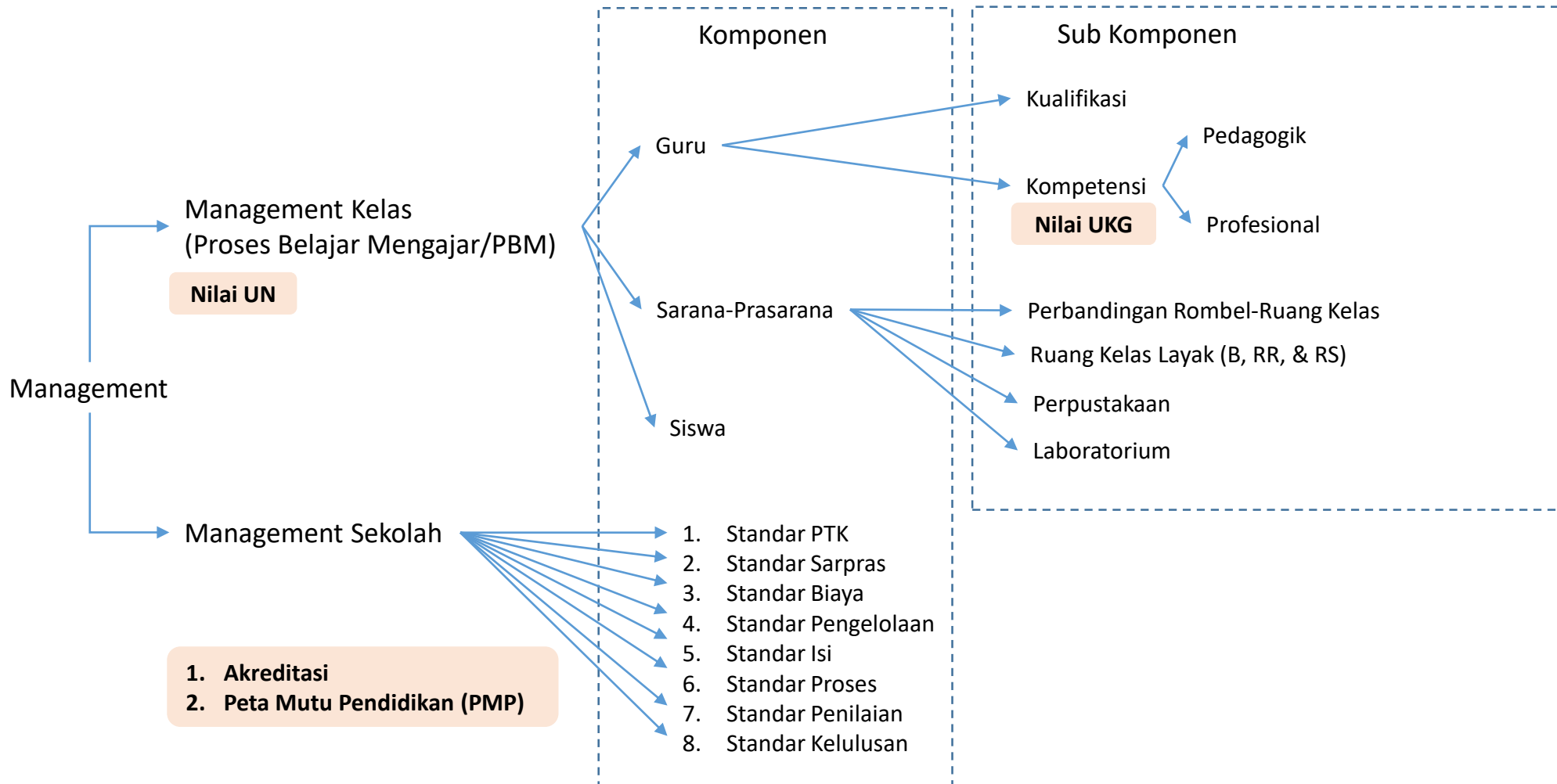
Prov. D.I. Yogyakarta	68,5	165
Prov. Jawa Tengah	59,1	860
Prov. D.K.I. Jakarta	50,7	489
Prov. Bali	47,8	159
Prov. Sumatera Barat	43,8	324
Prov. Bangka Belitung	43,5	69
Prov. Kalimantan Selatan	41,8	189
Prov. Jawa Timur	38,2	1.541
Prov. Kepulauan Riau	31,4	137
Prov. Riau	26,3	445
Prov. Bengkulu	21,6	139
Prov. Lampung	19,6	491
Prov. Kalimantan Timur	19,3	218
Prov. Sumatera Utara	18,6	1.076
Prov. Jambi	18,2	225
Prov. Banten	17,8	544
Prov. Sulawesi Tenggara	17,1	292
Prov. Jawa Barat	17,0	1.609
Prov. Kalimantan Barat	16,4	434
Prov. Kalimantan Utara	13,6	59
Prov. Papua Barat	13,2	121
Prov. Sulawesi Selatan	13,2	592
Prov. Sumatera Selatan	11,8	593
Prov. Kalimantan Tengah	10,0	241
Prov. Sulawesi Utara	9,7	226
Prov. Gorontalo	9,7	62
Prov. Maluku	9,5	283
Prov. Sulawesi Tengah	8,8	215
Prov. Nusa Tenggara Barat	8,2	318
Prov. Maluku Utara	8,0	199
Prov. Aceh	5,4	520
Prov. Nusa Tenggara Timur	5,2	538
Prov. Sulawesi Barat	2,3	88
Prov. Papua	2,1	235

Persentase Satuan Pendidikan Memenuhi SNP Tiap Kab-Kota, Prov. Papua

Total Satuan Pendidikan

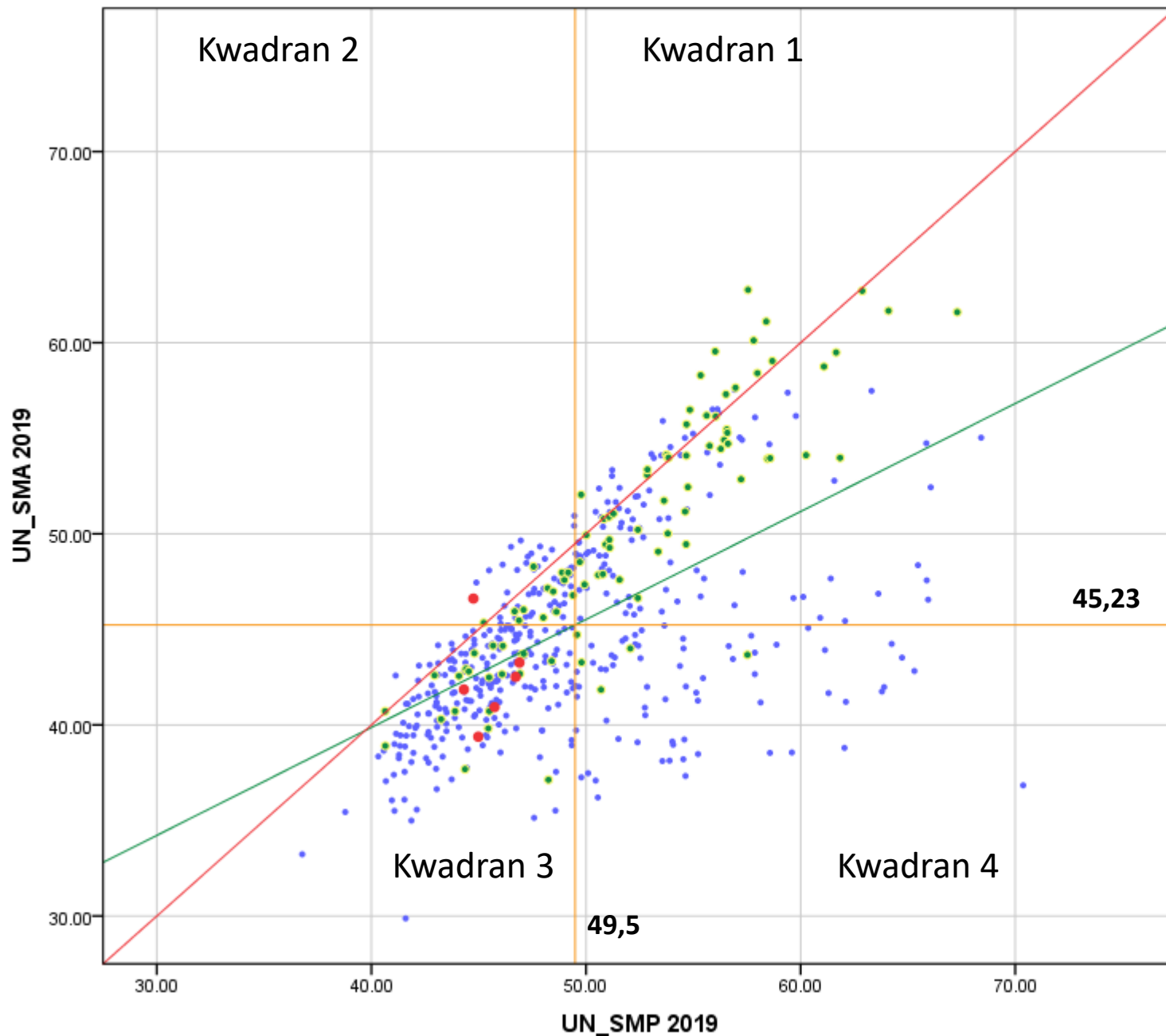
Kab. Paniai	16,7	6
Kab. Keerom	11,1	9
Kab. Nabire	10,5	19
Kab. Jayapura	4,8	21
Kota Jayapura	0,0	22
Kab. Yalimo	0,0	5
Kab. Yahukimo	0,0	8
Kab. Waropen	0,0	4
Kab. Tolikara	0,0	5
Kab. Supiori	0,0	7
Kab. Sarmi	0,0	4
Kab. Puncak Jaya	0,0	2
kab. Puncak	0,0	4
Kab. Pegunungan Bintang	0,0	3
Kab. Nduga	0,0	2
Kab. Mimika	0,0	16
Kab. Merauke	0,0	19
Kab. Membramo Tengah	0,0	5
Kab. Memberamo Raya	0,0	4
Kab. Mappi	0,0	6
Kab. Lanny Jaya	0,0	8
Kab. Kepulauan Yapen	0,0	9
Kab. Jaya Wijaya	0,0	13
Kab. Intan Jaya	0,0	1
Kab. Dogiyai	0,0	2
Kab. Deiyai	0,0	4
Kab. Boven Digoel	0,0	5
Kab. Biak Numfor	0,0	19
Kab. Asmat	0,0	4

Skema Pendekatan Analisis untuk Pendalaman Permasalahan dengan menggunakan Indikator Makro (Nasional) Sebagai Panduan Umum Penelusuran Jenis Intervensi menurut Zona.



Note: Kompetensi Guru ada empat, yaitu 1. Pedagogik, 2. Profesional, 3. Sosial & 4. Kepribadian

Sebaran Kab-Kota menurut Hasil UN SMP 2019 dengan Hasil UN SMA Tahun 2019

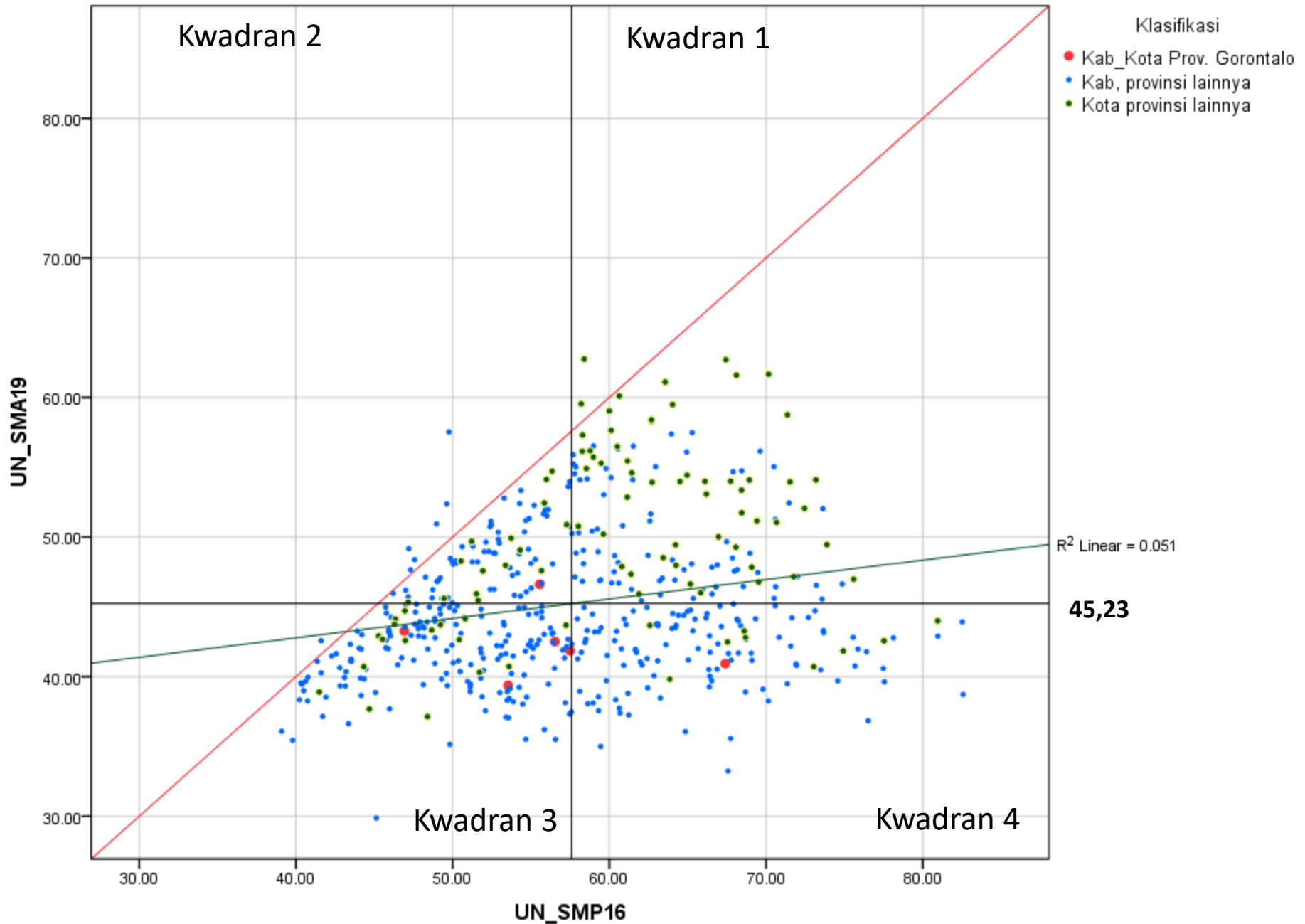


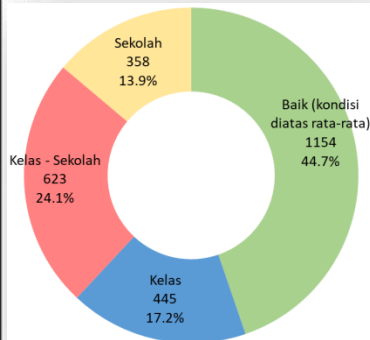
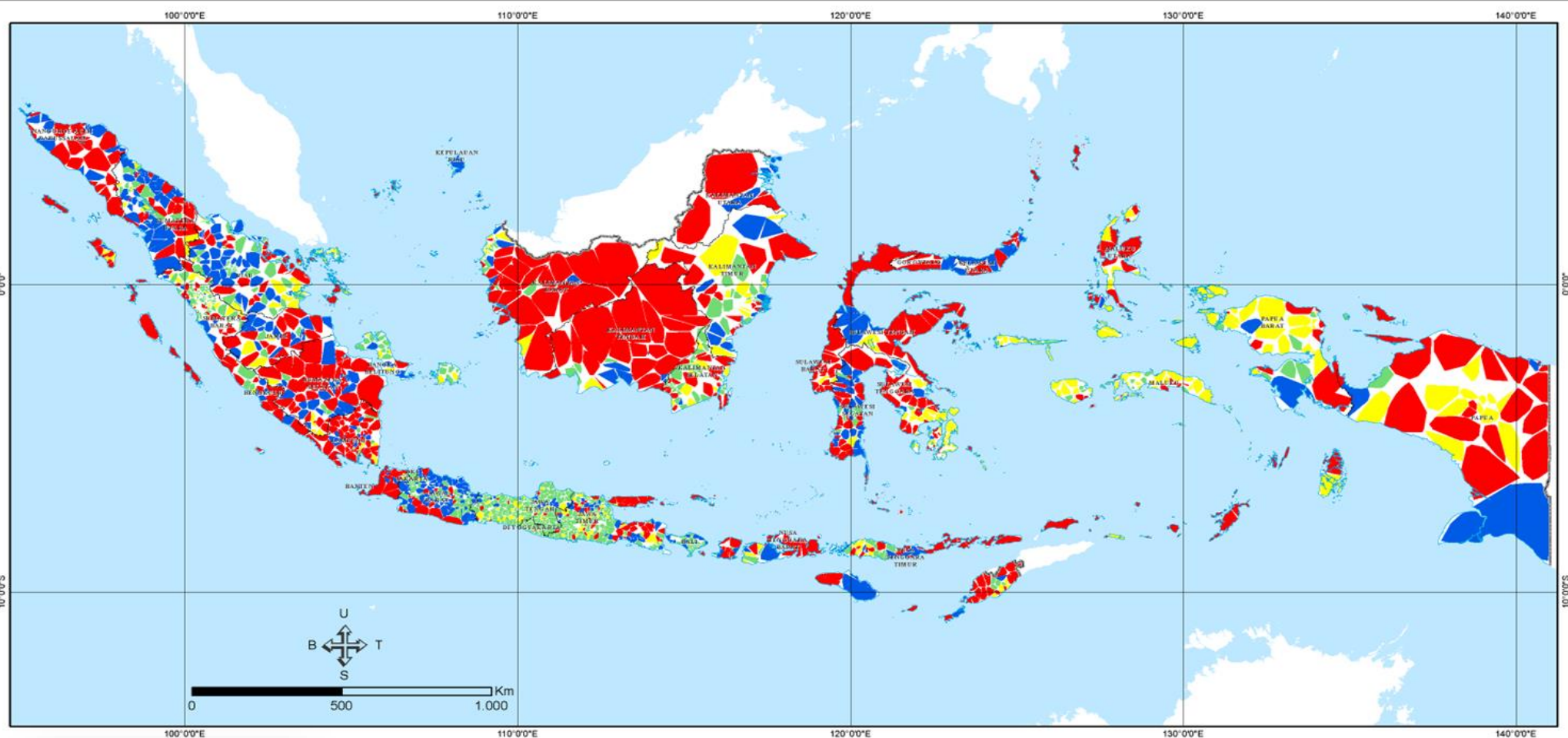
R² Linear = 0.350

Kwadrant	Frequency	Percent
Valid 1	151	29.4
2	60	11.7
3	232	45.1
4	71	13.8
Total	514	100.0

Kwadrant	Wilayah	
	Kab	Kota
1	95	56
2	46	14
3	211	21
4	66	5
	418	96

Sebaran Kab-Kota menurut Hasil UN SMP 2016 dengan Hasil UN SMA Tahun 2019





PETA SEBARAN ZONA BERDASARKAN PRIORITAS MANAJEMEN SATUAN PENDIDIKAN SMA



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sumber:
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia
 2. Badan Informasi Geospasial, Tahun 2016-2018
 3. Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), Tahun 2019
 4. Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK)
 Walidata Kemendikbud
 5. Pengolahan Data, Juli 2019

Keterangan:

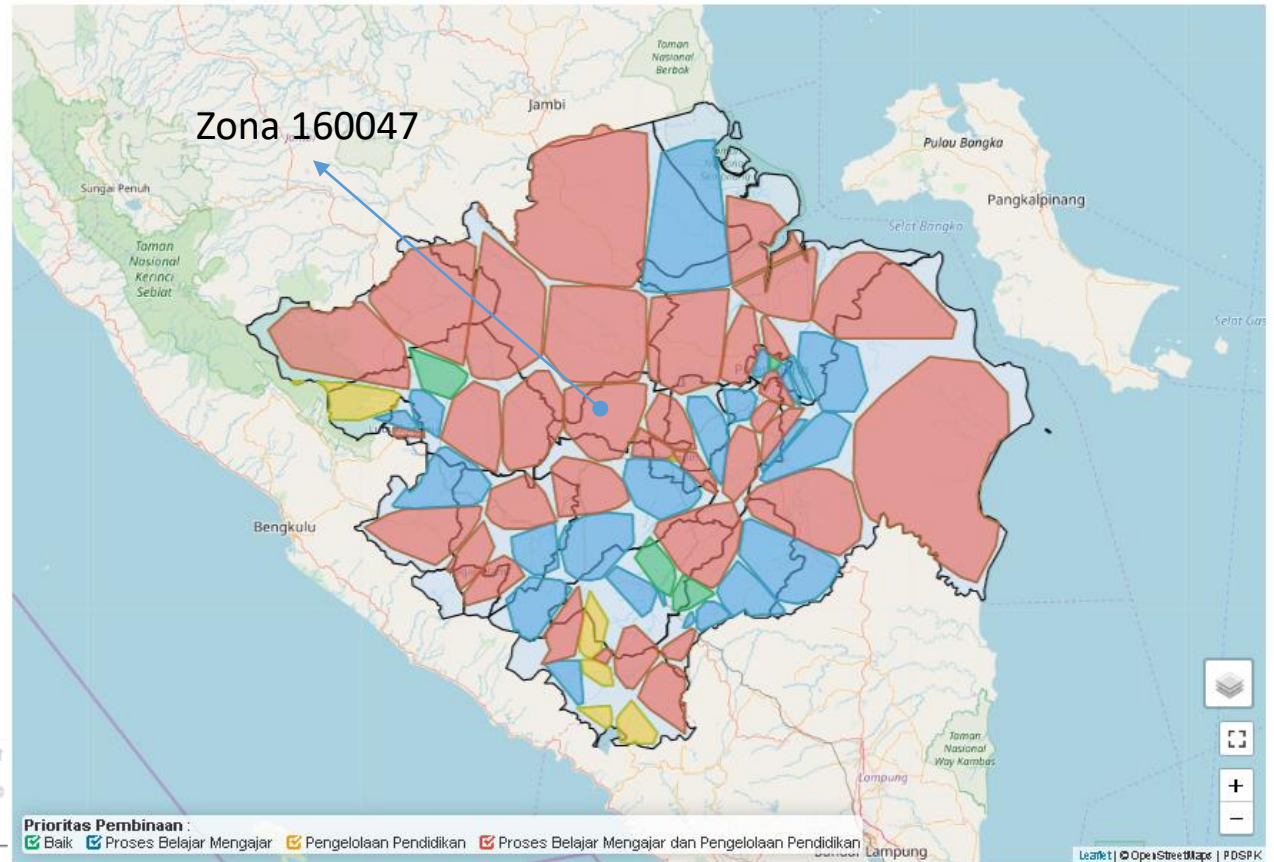
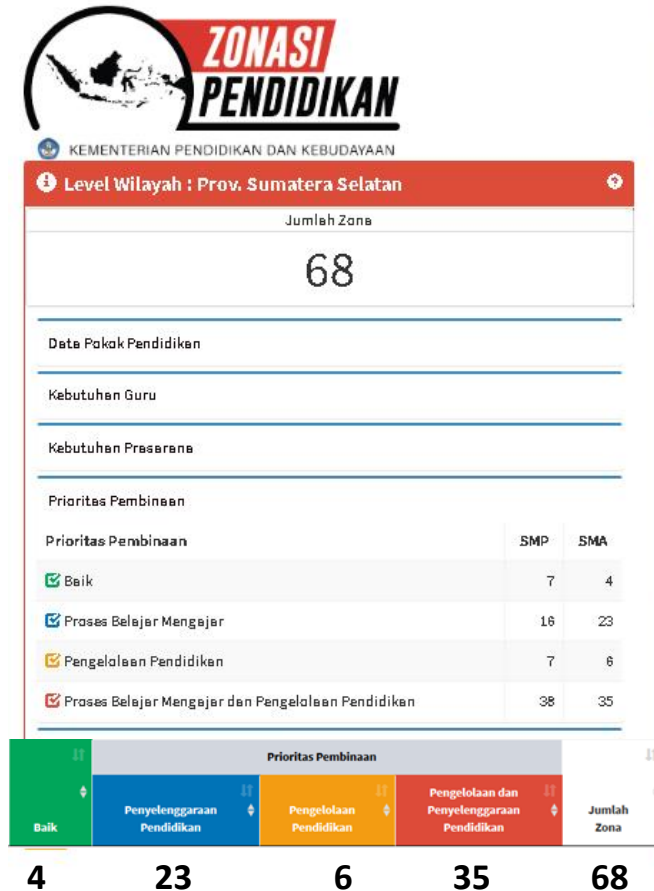
— Batas Negara
 — Garis Pantai
 — Batas Provinsi

Zona Prioritas (Manajemen)

■ Baik
 ■ Kelas
 ■ Sekolah
 ■ Kelas - Sekolah

PENDAYAGUNAAN ZONASI PENDIDIKAN

Wilayah Zona Pendidikan Prov. Sumatera Selatan



Prov. Sumatera Selatan(17 Kab-Kota), terbagi menjadi 68 Zona, dengan klasifikasi Prioritas Pembinaan (hasil analisis):

- 23 Zona (Warna **Biru**) merupakan Zona yang perlu prioritas pembinaan terkait dengan Proses Belajar Mengajar (PBM)
- 6 Zona (Warna **Kuning**) merupakan Zona yang perlu prioritas pembinaan terkait dengan Pengelolaan Pendidikan (Manajemen Sekolah)
- 35 Zona (Warna **Merah**) merupakan Zona yang perlu prioritas pembinaan terkait dengan Pengelolaan Pendidikan dan Proses Belajar Mengajar (PBM)
- 4 Zona (Warna **Hijau**) merupakan Zona secara umum yang memiliki kondisi yang baik (PBM maupun Pengelolaan Pendidikannya).

Potret Pendidikan Setiap Zona Pendidikan (Zona 160047)

Prov. Sumatera Selatan



Kode Zona **160047**

Wilayah Administrasi : Prov. Sumatera Selatan

Profil

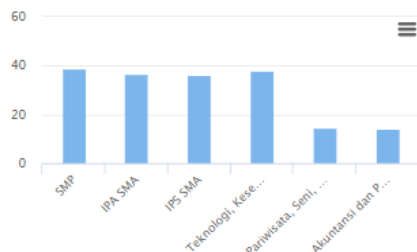
Klasifikasi Prioritas (Management) **SMA : Kelas dan Sekolah, SMP : Kelas dan Sekolah**

Informasi	TK	SD	SMP	SMA	SMK
Satuan Pendidikan	0	158	43	23	7
Rombel Tingkat Awal	0	231	128	88	31
Siswa Tingkat Akhir	0	5238	3743	2294	619
Kapasitas (SNP)	0	6468	4096	3168	1116

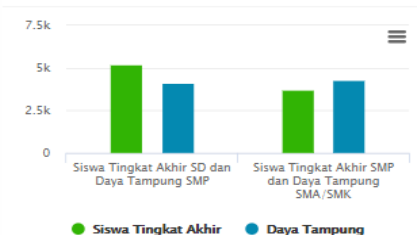
Cakupan Wilayah

No.	Wilayah	TK	SD	SMP	SMA	SMK	Jumlah
1	Kab. Musi Banyuasin	0	20	7	4	0	31
2	Kab. Muara Enim	0	53	7	3	0	63
3	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	0	86	30	16	8	140

Indeks Kompetensi Sekolah



Daya Tampung dan Siswa Tingkat Akhir

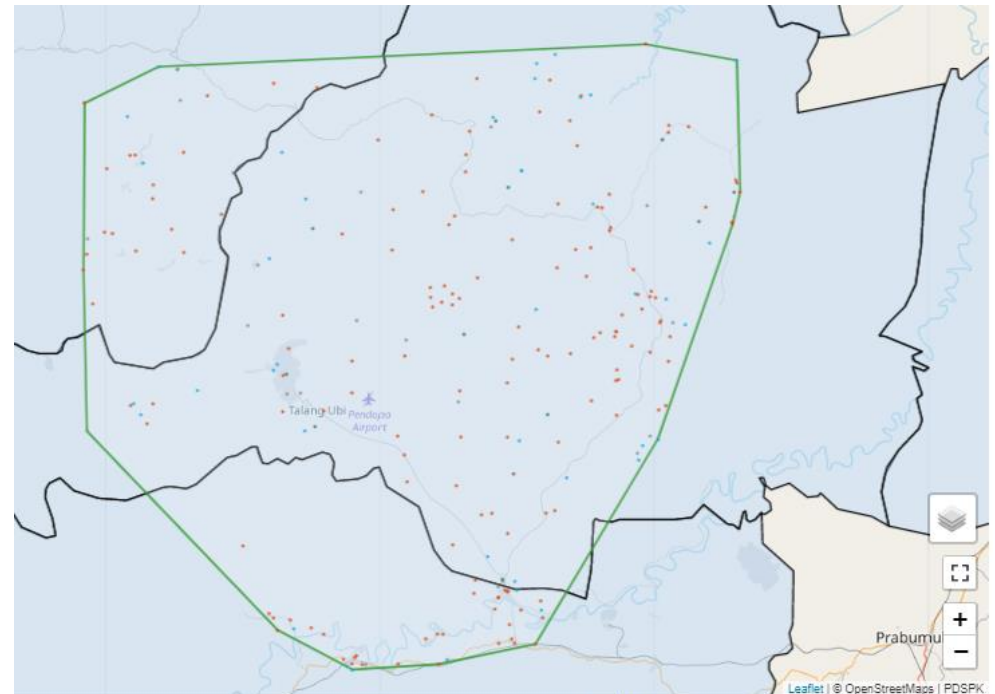


Jumlah sekolah, Rombel dan Siswa Tingkat Akhir setiap Zona

Wilayah Cakupan Zona

Capain Index Kompetensi Sekolah setiap Zona

Daya Tampung SMP dan SMA setiap Zona



Version 1.1.0
Copyright © 2018 Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.
All rights reserved.

Kebutuhan Guru

TK	SD	SMP	SMA	SMK
No.	Jenis	Jumlah Guru	Jumlah Ideal	
1	Kepala Sekolah	131	14	
2	Guru Kelas SD	1,233	1,25	
3	Agama	159	21	
4	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK)	145	21	

Kebutuhan Guru setiap Zona

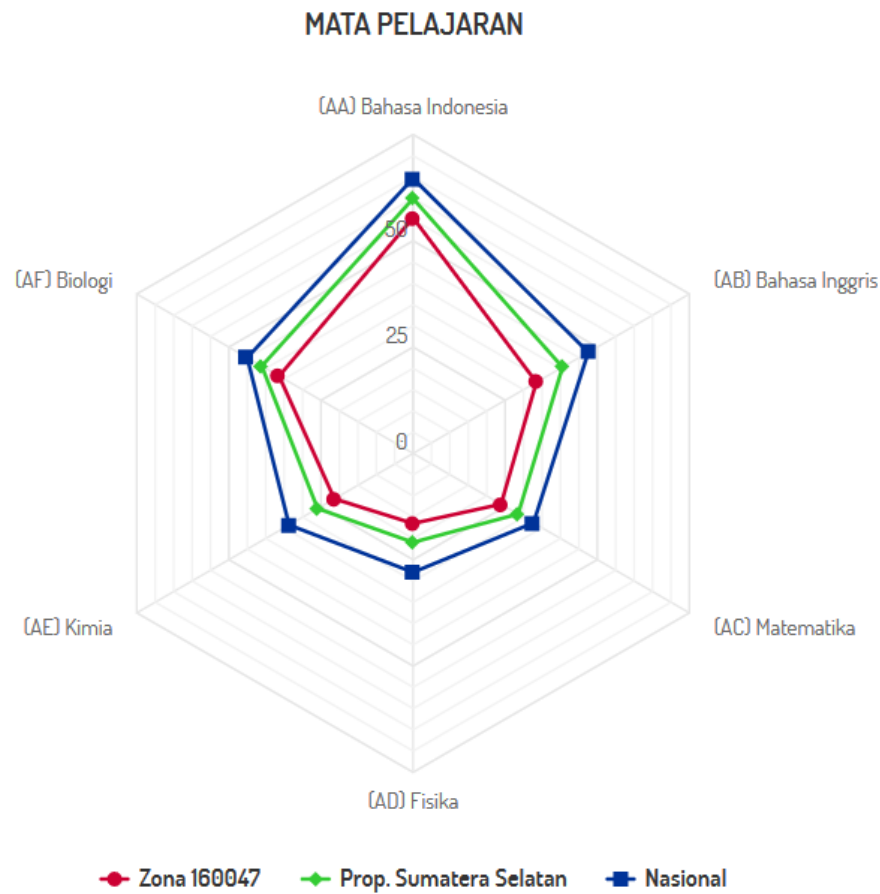
Kebutuhan Ruang Kelas

Jenjang	Jumlah Ruang Kelas	Jumlah Ideal
TK	0	0
SD	1110	1467
SMP	328	419
SMA	231	245
SMK	52	77

Kebutuhan Sarpras setiap Zona

INDEK KOMPETENSI SEKOLAH

Indek Kompetensi Sekolah Zona 160047 Prov. Sumatera Selatan



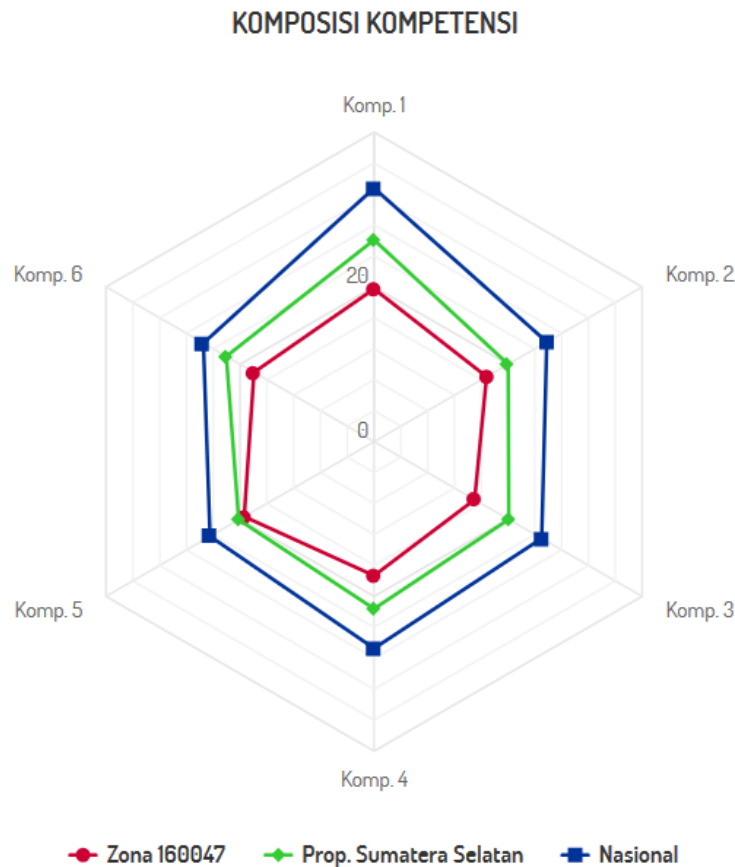
Daftar Nilai Indeks Per Mata Pelajaran

Zona 160047 (IPA SMA)

Mata Pelajaran	Nilai Indeks
(AA) Bahasa Indonesia	55.41
(AB) Bahasa Inggris	33.46
(AC) Matematika	23.88
(AD) Fisika	16.48
(AE) Kimia	21.37
(AF) Biologi	36.37

Capain Indek Kompetensi Sekolah Jurusan IPA pada Zona 160047 (36,62) masih dibawah capaian Nasional dan Provinsi. Pada Zona 160047 kelemahan pada semua mapeL.

Indek Kompetensi Sekolah Zona 160047 Prov. Sumatera Selatan



Daftar Kompetensi

Mata Pelajaran (AD) Fisika

Kompetensi	Keterangan
Komp. 1	Pengukuran dan Kinematika
Komp. 2	Dinamika
Komp. 3	Usaha dan Energi dan Tumbukan
Komp. 4	Kalor
Komp. 5	Gelombang dan Cahaya
Komp. 6	Listrik, Magnet, dan Fisika Inti

Contoh didalam Mapel Fisika meliputi 6 Kompetensi, dari keenam kompetensi tersebut semua masih dibawah rata-rata provinsi dan Nasional, hanya kompetensi Gelombang dan Cahaya (Kompetensi 5) capaiannya mendekati capaian provinsi.

PENATAAN GURU BASIS ZONA

Wilayah Zona Pendidikan: 160047
Prov. Sumatera Selatan

Proses Belajar				
Indikator	SD	SMP	SMA	SMK
Rasio Siswa Sekolah	211	266	342	348
Rasio Siswa Ruang Kelas	32	34	34	40
Rasio Siswa Rombel	25	31	32	29
Rasio Siswa Guru	20	17	17	21
Rasio Rombel Sekolah	8.5	8.8	10.7	12
Rasio Rombel Ruang Kelas	1.3	1.1	1	1.4
Rasio Guru Sekolah	11	16	21	18
Rasio Guru Rombel	2	2	2	2
% Guru Kualifikasi	81.86%	92.95%	97.7%	88.33%
% Guru Sertifikasi	26.2%	18.65%	22.13%	5.83%

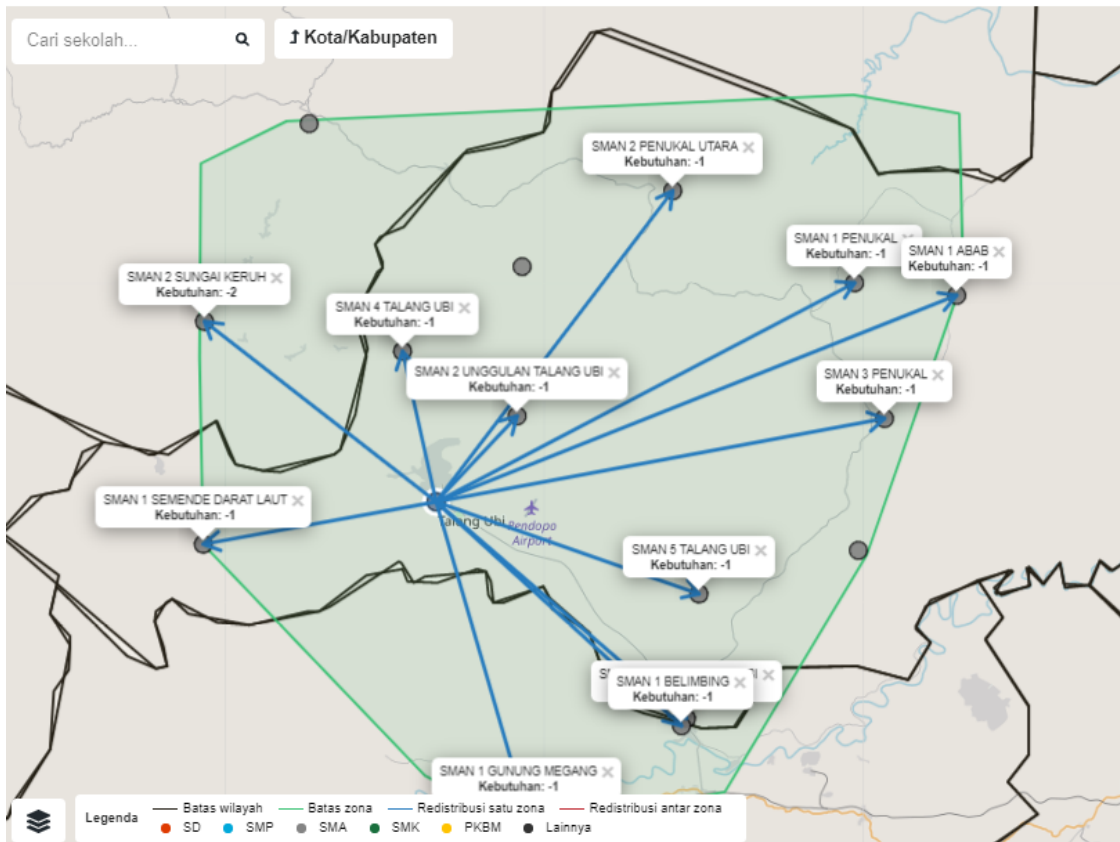
Contoh:

Secara umum bahwa zona 160047 untuk guru lebih ke optimalisasi kompetensi guru, hal ini dapat dilihat dari kondisi rendahnya persentase guru yang bersertifikasi (SD=26,2%; SMP=18,65%, SMA=22,13% dan SMK=5,83%), sedangkan kualifikasi guru sudah sangat tinggi mendekati 100% untuk semua jenjang pendidikan, terutama pada jenjang SMA.

Analisis GTK Info

Selesai memuat titik sekolah ✓

Data Juni 2019



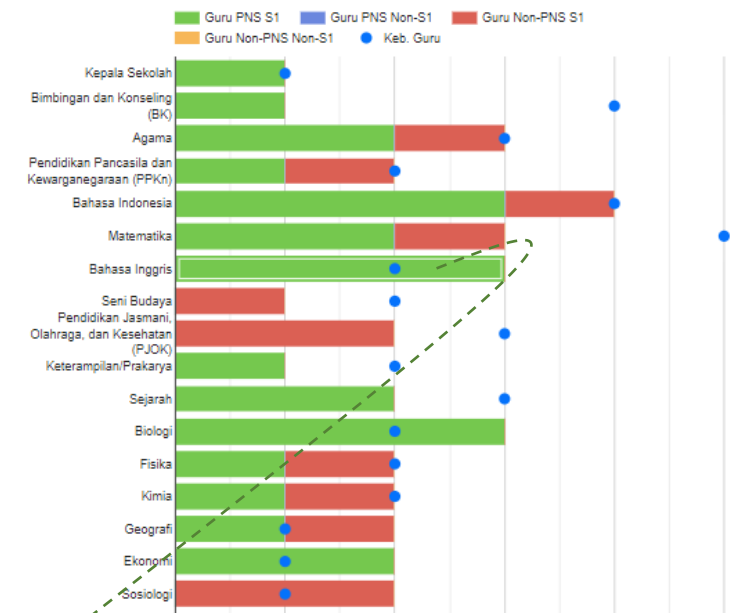
>> Klik untuk menyembunyikan

SMAN 1 TALANG UBI

Kode Zona 160047

Kab. Musi Banyuasin - Kab. Muara Enim - Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
Provinsi Sumatera Selatan

Tinjau Tabel Kebutuhan



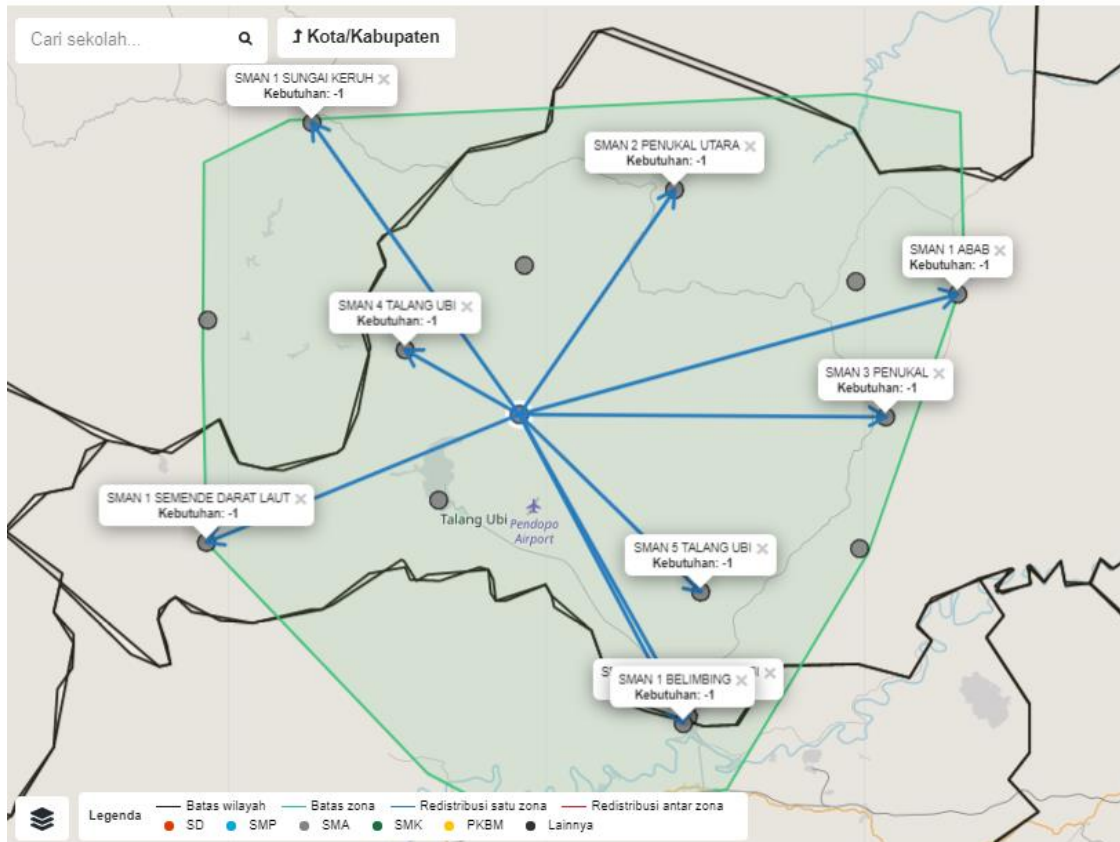
Contoh:

SMAN 1 Talang Ubi, memiliki 3 guru Bahasa Inggris, sedangkan kebutuhannya hanya dua guru, maka dimungkinkan satu guru untuk di tugaskan mengajar di sekolah yang masih kekurangan guru Bahasa Inggris, dalam Zona 160047 dapat dilihat ada banyak sekolah SMA Negeri yang membutuhkan guru Bahasa Inggris (lihat tanda panah warna biru).

Analisis GTK Info

Selesai memuat titik sekolah ✓

Data Juni 2019



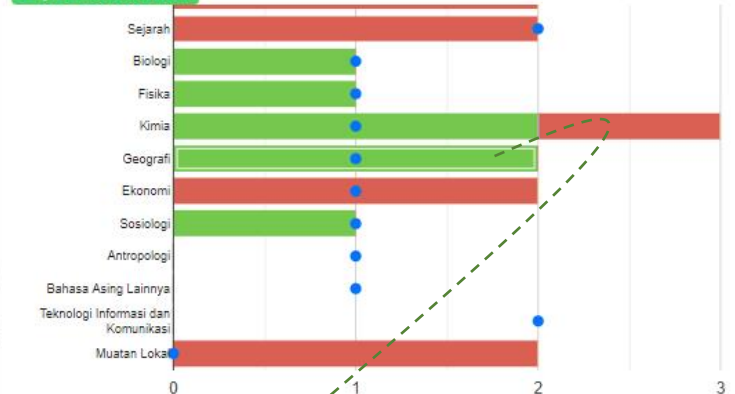
» Klik untuk menyembunyikan

SMAN 2 UNGGULAN TALANG UBI

Kode Zona 160047

Kab. Musi Banyuasin - Kab. Muara Enim - Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
Provinsi Sumatera Selatan

Tinjau Tabel Kebutuhan



Guru Mata Pelajaran Geografi

Elin Sumaya

Annike Putri Leoni

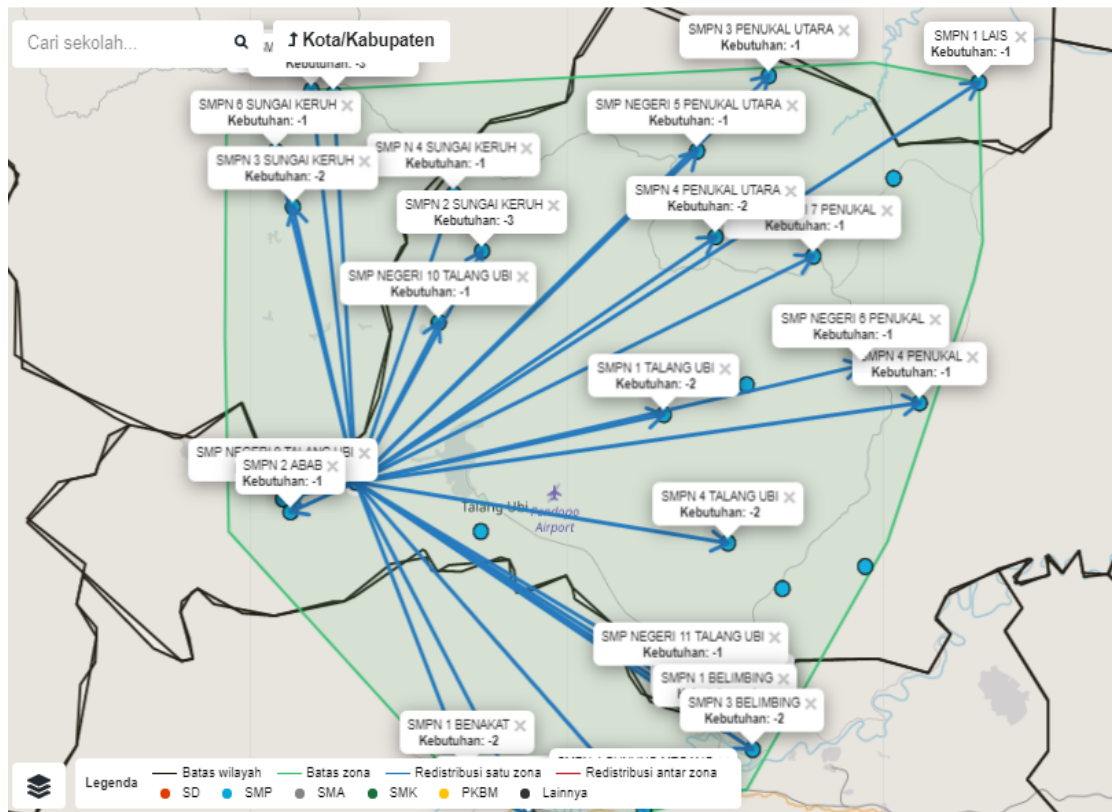
Contoh:

SMAN 2 Unggulan Talang Ubi, memiliki dua (2) guru Geografi, sedangkan kebutuhannya hanya satu (1) guru, maka dimungkinkan satu guru untuk di tugaskan mengajar di sekolah yang masih kekurangan guru Geografi, dalam Zona 160047 dapat dilihat ada banyak sekolah SMA Negeri yang membutuhkan guru Geografi (lihat tanda panah warna biru).

Analisis GTK Info

Selesai memuat titik sekolah ✓

Data Juni 2019



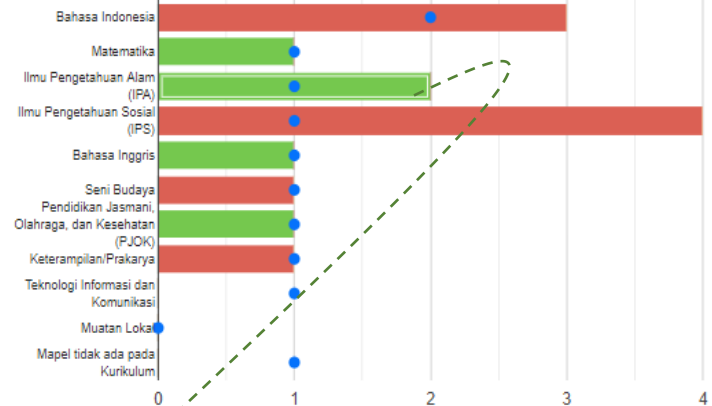
» Klik untuk menyembunyikan

SMPN 6 TALANG UBI

Kode Zona 160047

Kab. Musi Banyuasin - Kab. Muara Enim - Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
Provinsi Sumatera Selatan

Tinjau Tabel Kebutuhan



Guru Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Halma Yulianti

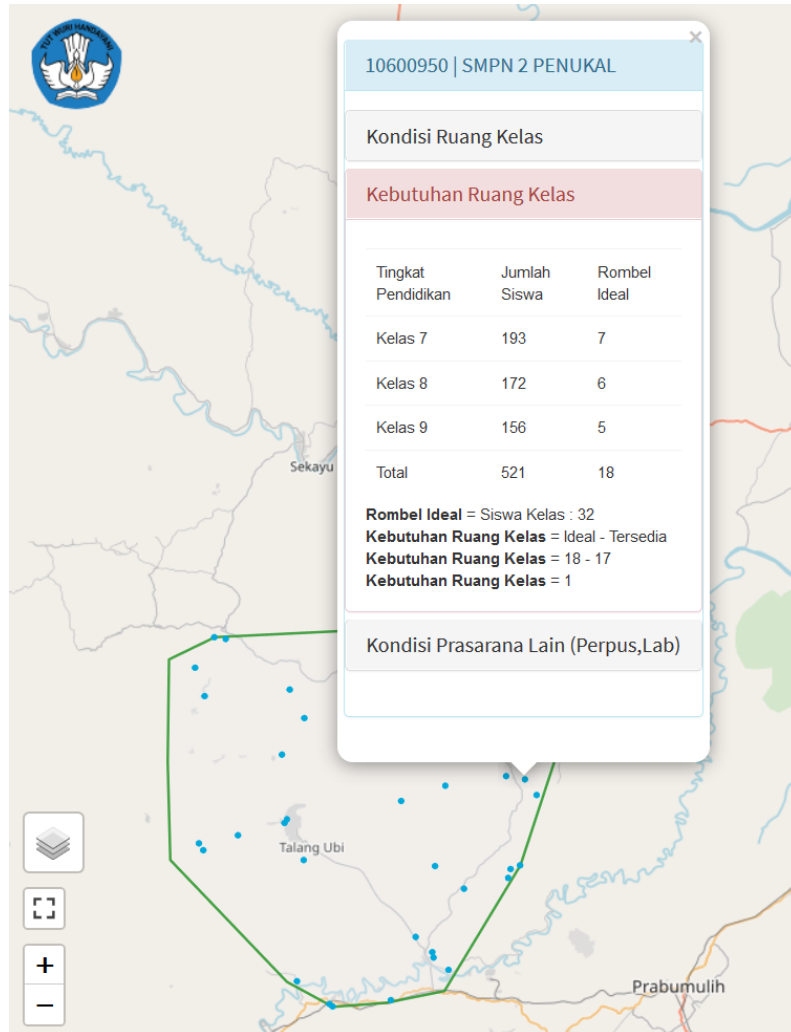
Contoh:

SMPN 6 Talang Ubi, memiliki dua (2) guru IPA, sedangkan kebutuhannya hanya satu (1) guru, maka dimungkinkan satu guru untuk di tugaskan mengajar di sekolah yang masih kekurangan guru IPA, dalam Zona 160047 dapat dilihat ada banyak sekolah SMP Negeri yang membutuhkan guru IPA (lihat tanda panah warna biru).

PENATAAN SARPRAS BASIS ZONA

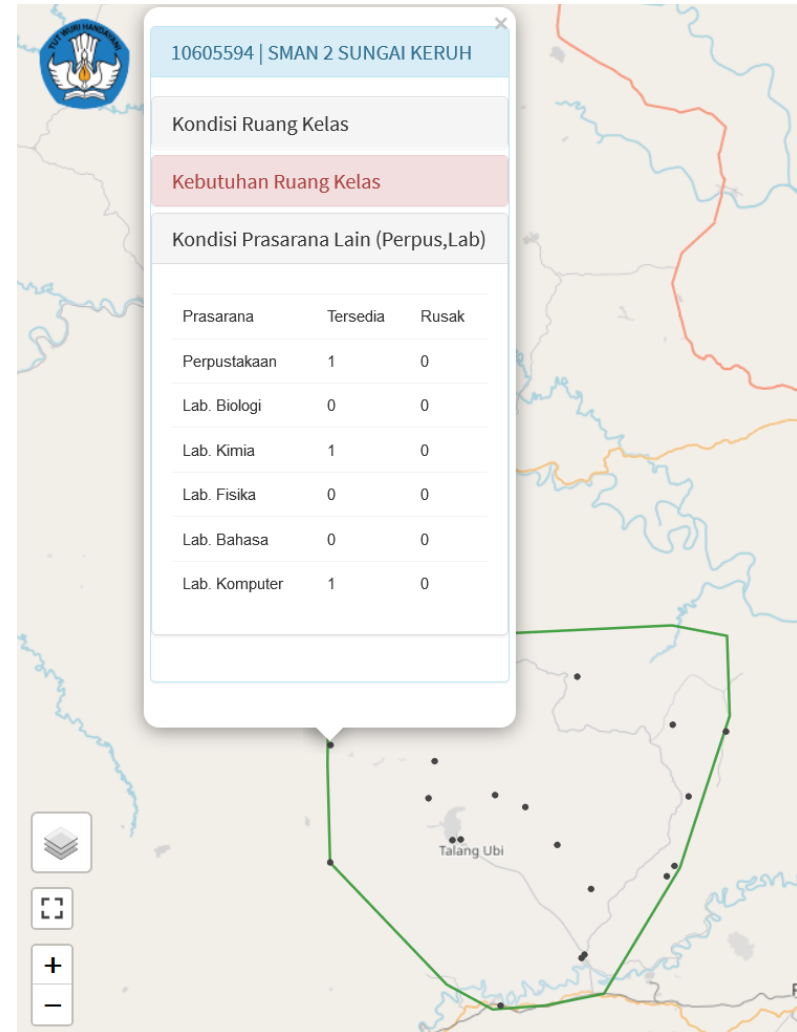
Wilayah Zona Pendidikan: 160047

Prov. Sumatera Selatan



Contoh:

SMPN 2 Penukal, dengan jumlah siswa 521 dengan 18 rombongan belajar, sedangkan jumlah ruang kelas 17, maka masih kurang satu ruang kelas.



Contoh:

SMAN 2 Sungai Keruh, sudah memiliki Perpustakaan, Lab. Kimia, dan Lab. Komputer, namun belum memiliki Lab. Biologi, Lab. Fisika dan Lab. Bahasa.

Wilayah Zona Pendidikan: 160047
Prov. Sumatera Selatan

Sarana Prasarana

Indikator	SD	SMP	SMA	SMK
% Kepemilikan Laboratorium IPA	0.63%	39.53%	26.09%	28.57%
% Kepemilikan Laboratorium Biologi	0%	0%	30.43%	0%
% Kepemilikan Laboratorium Kimia	0%	0%	34.78%	0%
% Kepemilikan Laboratorium Fisika	0%	0%	26.09%	14.29%
% Kepemilikan Laboratorium IPS	0%	0%	0%	0%
% Kepemilikan Laboratorium Bahasa	0%	6.98%	8.7%	0%
% Kepemilikan Laboratorium Komputer	0.63%	16.28%	39.13%	28.57%
% Kepemilikan Laboratorium Multimedia	0%	2.33%	0%	0%
% Kepemilikan Perpustakaan	51.57%	58.14%	69.57%	28.57%
% Kepemilikan Sanitasi Guru	74.84%	65.12%	73.91%	42.86%
% Kepemilikan Sanitasi Siswa	73.58%	62.79%	86.96%	71.43%
% Ruang Kelas Layak *)	94.87%	93.24%	95.95%	100%

*)Ruang Kelas Layak dengan kondisi Baik, Rusak Ringan, dan Rusak Sedang.

Contoh:

Secara umum bahwa zona 160047 masih memerlukan Laboratorium, dan perpustakaan terutama pada jenjang SMK. Sedangkan ruang kelas dengan kondisi yang layak (Baik, Rusak Ringan atau Rusak Sedang) pada zona tersebut persentase nya sudah cukup tinggi.

INTERVENSI PROGRAM DAN PENDANAAN

Wilayah Zona Pendidikan: 160047

Prov. Sumatera Selatan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Zona **160047**

Wilayah Administrasi : **Prov. Sumatera Selatan**

Profil

Cakupan Wilayah

Indeks Kompetensi Sekolah

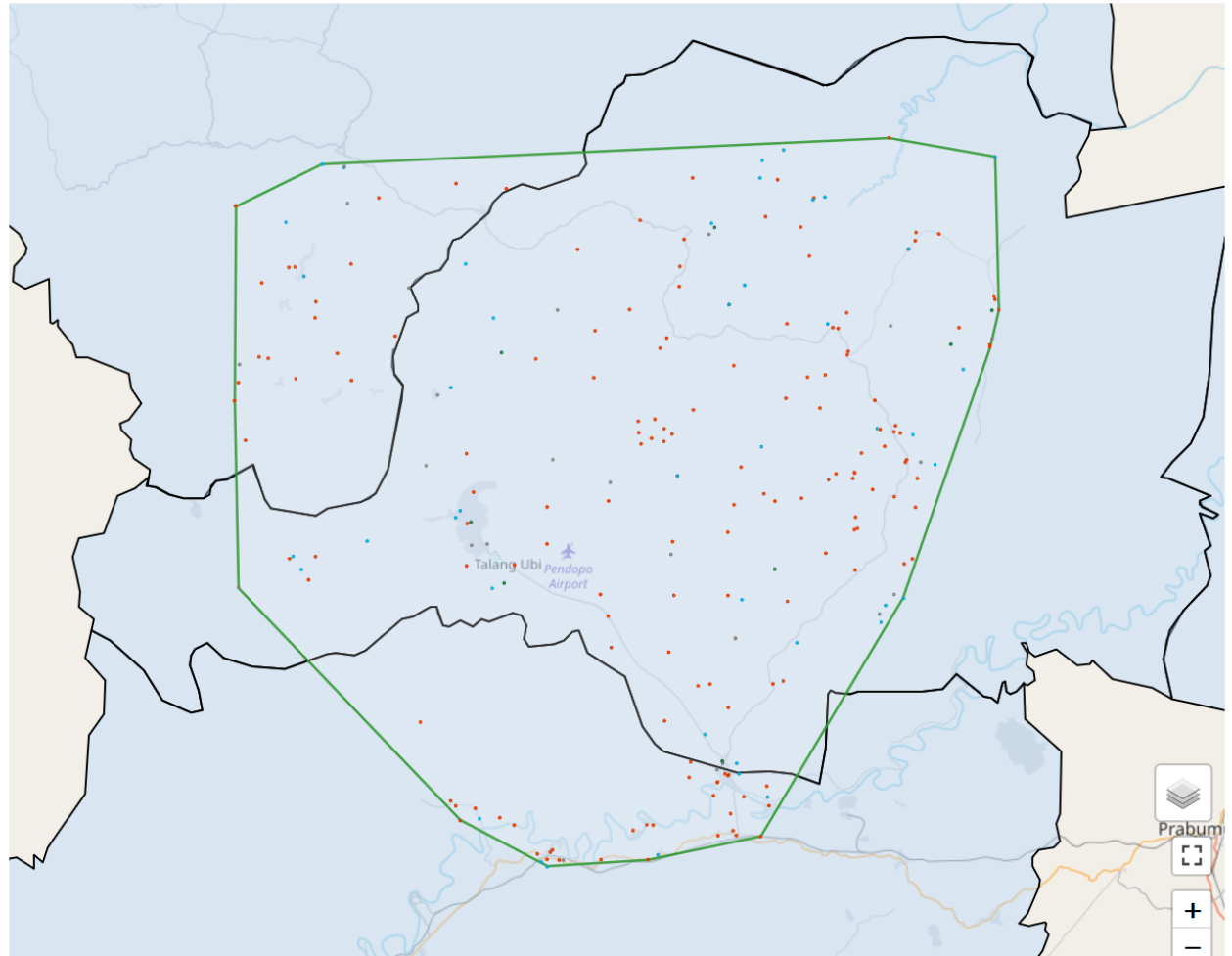
Daya Tampung dan Siswa Tingkat Akhir

Kebutuhan Guru

Kebutuhan Ruang Kelas

Intervensi Program dan Pendanaan

Kelompok	SD	SMP	SMA	SMK
Pembangunan Prasarana	15	8	7	0
Pengadaan Sarana	36	8	4	0
Rehabilitasi Prasarana	20	8	2	0



Pada Zona 160047

Pada jenjang SD mendapat Pembangunan Sarana di 15 SD; Pengadaan Sarana di 20 SD dan 20 SD Rehabilitasi Prasarana, Pada jenjang SMP mendapat Pembangunan Sarana di 8 SMP; Pengadaan Sarana di 8 SMP dan 8 SMP Rehabilitasi Prasarana. Pada jenjang SMA mendapat Pembangunan Sarana di 7 SMA; Pengadaan Sarana di 4 SMA dan 2 SMA Rehabilitasi Prasarana.

UPDATE ZONA PENDIDIKAN OLEH ZONA PPDB

(Yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah)

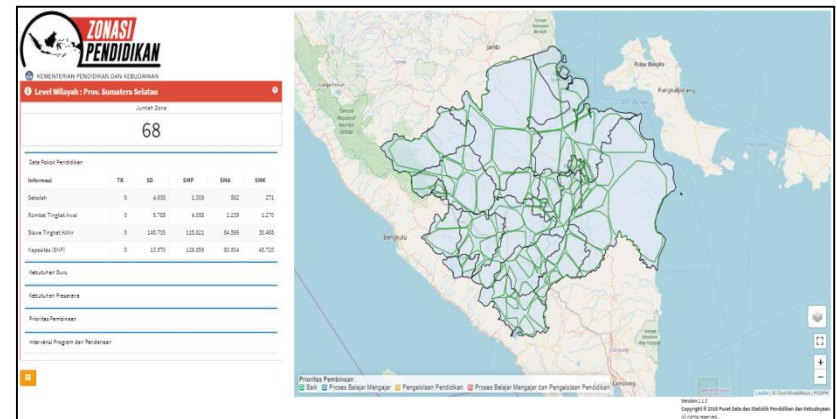
Langkah selanjutnya Penentuan Zona untuk Perencanaan, Money, Pengelolaan, dan Pembinaan Pendidikan.

Zona PPDB oleh PEMDA



Zona Pendidikan oleh Sistem (Tahun 2018)

Update



- Hasil update Wilayah Zona Pendidikan dengan Zona PPDB yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah, menjadi acuan bersama Pusat dan Daerah dalam menyusun Strategi dan Langkah yang terintegrasi, dalam rangka Pemerataan Pendidikan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
- Perubahan Zona (dalam rentang waktu tertentu/disepakati bersama antara Pusat dan Daerah), merupakan hasil dari Intervensi yang terintegrasi di setiap Zona.

Terimakasih

